

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

**ISU KESETARAAN GENDER
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING**

KESELARASAN KESEHATAN DAN BUDAYA UNTUK MENCEGAH STUNTING

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEKERASAN GENDER

**UNITED NATIONS AGAINST POVERTY:
ADDRESSING RURAL-URBAN NEXUS IN SOCIAL PROTECTION**

**PEMIKIRAN MARK DOEL TENTANG *TEACHING SOCIAL WORK PRACTICE*
(SESI *CONTEXT OF PRACTICE TEACHING*)**

**SUPERVISI TERHADAP RELAWAN KEMANUSIAAN
(STUDI KASUS PADA ORGANISASI MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA)**

**KONDISI PSIKOSOSIAL ANAK DALAM PENGASUHAN ALTERNATIF
DI PSAA PUTRA UTAMA 3 CEGER CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR**

ANALISIS SOAL EVALUASI MELALUI PENDEKATAN KUANTITATIF

PUSDIKLAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL RI

Jl. Margaguna Raya No. 1 Radio Dalam, Jakarta Selatan

 (021) 7511721

 (021) 7661664

 pusdiklat_kesos@yahoo.com

 jurnal.pusdiklat@kemosos.go.id

 pusdiklat.kemosos.go.id

 [@pusdiklat_kemosos](https://www.instagram.com/pusdiklat_kemosos)

JURNAL PUSDIKLAT KESOS

TIM REDAKSI

Pengarah
Mulia Jonie

Penanggung Jawab
Dwi Dharmawan

Wakil Penanggung Jawab
Ahmad Zein Arifin

Sekretariat
Ike Mustika
Norya

Editor
Toton Witono
Mujiastuti
Akmal Permatasari

Desain Grafis
Ahmad Fahmi Fatur Rahman

Alamat Redaksi

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial
Jl. Margaguna No. 1 Radio Dalam
Jakarta Selatan
021-7511721
e-mail : jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id

ISSN : 1907-5677

DAFTAR ISI

<i>Pengantar Redaksi</i>	i
<i>Isu Kesetaraan Gender dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting</i> Siti Mulyani	1-15
<i>Keselarasn Kesehatan dan Budaya untuk Mencegah Stunting</i> Hermaini	16-28
<i>Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Gender</i> Jose Segitya Hutabarat	29-41
<i>United Nations Against Poverty: Addressing Rural-Urban Nexus in</i> <i>Social Protection</i> Hino Samuel Jose, Huspidiatul Anwar Gemadiyah, & Nehemia Satya Kamandaka Soetedjo	42-63
<i>Pemikiran Mark Doel tentang Teaching Social Work Practice (Sesi</i> <i>Context of Practice Teaching)</i> Muttaqin	64-78
<i>Supervisi terhadap Relawan Kemanusiaan (Studi Kasus pada</i> <i>Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia)</i> Ahmad Shofwan Syaukani, Sri Sulastris, & Hadiano Achmad Rachim	79-94
<i>Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di PSAA Putra</i> <i>Utama 3 Ceger Cipayung, Jakarta Timur</i> Nana Amalia, Ellya Susilowati, & Rini Hartini Rinda Andayani	95-113
<i>Analisis Soal Evaluasi melalui Pendekatan Kuantitatif</i> Budi Nurdiansyah	114-126
<i>Panduan Penulis Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos</i>	127-129

Pengantar Redaksi

Puji syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Jurnal Pusdiklat Kesos kembali terbit untuk Edisi 17, Mei 2021. Edisi kali ini menerbitkan sejumlah artikel dari peneliti, pengajar, dan praktisi yang membahas sejumlah isu penting terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kediklatan. Ragam isu atau tema yang diangkat meliputi permasalahan *stunting*, kesetaraan gender, kemiskinan, konsep pekerjaan sosial, supervisi relawan sosial, pengasuhan alternatif anak, dan evaluasi pelatihan.

Angka *stunting* di Indonesia tergolong tinggi. Hampir setiap tiga anak ada satu yang mengalami *stunting*. Negara kita berada di urutan keempat dunia dan kedua di Asia Tenggara. Terkait faktor penyebab, edisi ini memuat dua artikel yang melihat masalah besar tersebut dari kaca mata kesetaraan gender dan keselarasan antara kesehatan dan budaya. Keduanya dibahas dari sisi pencegahan dan juga penanganan *stunting*.

Pada artikel pertama, Siti Mulyani menggarisbawahi perkawinan usia anak, kebiasaan pantang makan bagi perempuan pada suku tertentu, kecenderungan pembatasan makanan bagi perempuan, dan kebiasaan diet remaja perempuan dapat mengurangi pemenuhan gizi ketika mereka hamil dan menyusui. Kekurangan gizi, tidak melakukan inisiasi menyusui dini (IMD), dan ditambah lagi tidak mengakses pelayanan kesehatan meningkatkan risiko *stunting* pada anak mereka. Oleh karenanya, penulis merekomendasikan dimensi kesetaraan gender terkait peran, akses, kontrol, dan pemberdayaan perempuan harus menjadi perhatian utama dalam upaya penanganan dan pencegahan *stunting*.

Di artikel berikutnya, Hermaini mengkaji apakah unsur budaya dapat selaras dengan bidang kesehatan dalam upaya pencegahan *stunting*. Budaya di sini dapat merujuk ke adat dan tradisi turun-temurun masyarakat setempat dan juga dari kebiasaan yang dibentuk oleh faktor keluarga dan pendidikan. Artikel ini merinci unsur budaya yang menjadi penyebab *stunting* antara lain: budaya patriarkhi yang kurang menguntungkan perempuan; budaya pantang makan bagi ibu hamil dan menyusui; kecenderungan tidak mempraktikkan IMD dan ASI eksklusif; dan kebiasaan tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kemudian, saran apa saja yang diangkat penulis untuk mengatasi sejumlah penyebab tersebut, patut ditelaah di bagian penutup artikel ini.

Tulisan ketiga disusun oleh Jose Segitya Hutabarat yang mengupas analisis dampak pandemik Covid-19 terhadap kekerasan perempuan secara daring dan upaya memperkuat ketahanan nasional. Tulisan ini mencoba menggambarkan berbagai kekerasan yang dialami perempuan di dunia maya selama masa pandemic Covid-19. Melalui artikel ini, penulis mendeskripsikan dampak kekerasan daring terhadap perempuan, terutama pada kesehatan jiwa. Terakhir, penulis mengusulkan beberapa alternatif kebijakan terkait penanganan kekerasan berbasis gender secara *online*.

Artikel keempat membahas bagaimana kebijakan perlindungan sosial diimplementasikan

menurut perspektif PBB. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, selaras dengan tujuan pertama pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni *zero poverty*. Hino Samuel Jose dkk mengangkat gagasan bagaimana program-program pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada upaya membangun konektivitas dan keseimbangan antara wilayah desa-perkotaan. Selain itu, pembangunan juga harus fokus pada manusianya, pada kesejahteraan rakyat. Artikel ini sangat padat dan kaya akan perspektif global PBB terkait bagaimana konsep pembangunan dan perlindungan sosial dalam rangka pemberantasan kemiskinan di negara berkembang. Sangatlah cocok jika diproyeksikan pada kondisi Indonesia, sehingga kita mampu menentukan kebijakan/program dan bentuk partisipasi global seperti apa jika memang diperlukan.

Artikel selanjutnya ditulis Muttaqin yang mengupas pemikiran Mark Doel tentang bagaimana mengajarkan praktik pekerjaan sosial. Melalui tulisan ini penulis mengajak para pendidik pekerja sosial untuk meningkatkan kemampuan melakukan pelatihan dalam ragam *setting* pelayanan pekerjaan sosial. Penulis menjabarkan beberapa model pembelajaran yang bisa dijadikan referensi bagi institusi pelayanan dan lembaga pendidikan kesejahteraan sosial, sehingga dapat membekali pemahaman dan keterampilan peserta didik sesuai kebutuhan mereka.

Artikel berikutnya adalah hasil penelitian tentang supervisi yang dilakukan oleh Ahmad Shofwan Syauckani bersama dua kolega. Penelitian deskriptif ini mengeksplorasi bagaimana proses supervisi dilakukan terhadap para relawan di lembaga Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Proses supervisi dilihat dari aspek administrasi, edukasi, dan dukungan. Dengan teknik wawancara, studi literatur/dokumen, dan observasi, hasil penelitian menghasilkan deskripsi administrasi proses supervisi terkait rekrutmen dan seleksi awal, kontrak dan penempatan, rencana kerja, penugasan, monev, koordinasi, fungsi komunikasi, dan peran supervisor. Dari aspek edukasi, supervisor punya peran penting mengedukasi relawan agar tumbuh kesadaran dan paham akan tugas-tugasnya. Aspek terakhir, dukungan supervisor dapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan komitmen beserta kepuasan kerja relawan.

Berikutnya adalah artikel hasil penelitian yang dilakukan oleh Nana Amalia dkk tentang kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif. Dengan mengambil lokasi penelitian di salah satu panti sosial anak di Jakarta Timur, tulisan ini menampilkan data temuan penelitian yang sangat menarik untuk dikaji terutama terkait peran pengasuh atau orangtua pengganti. Penulis juga menggambarkan tentang kondisi psikologis anak yang dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan terkait program pengasuhan anak.

Artikel terakhir yang disusun Budi Nurdiansyah sangat relevan dalam bidang kediklatan, yakni terkait kelayakan soal dalam evaluasi pembelajaran. Penulis mengusulkan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kualitas soal-soal, yang biasanya dalam bentuk *post-test* atau ujian komprehensif. Bagaimana mengetahui soal-soal yang dibuat dikatakan layak atau berkualitas? Caranya adalah dengan menghitung koefisien validitas dan reliabilitas serta indeks kesukaran. Soal dianggap valid dan reliabel jika koefisiennya tidak rendah/jelek. Dari sisi indeks kesukaran, soal evaluasi dikatakan layak atau berkualitas baik jika komposisinya

terdiri dari 25 persen mudah, 50 persen sedang, dan 25 persen sukar. Untuk lebih memahami logika dan teknis perhitungannya, sangatlah penting untuk menelaah artikel ini secara lebih saksama.

Kepada para pembaca, selamat menelaah artikel-artikel yang kami sajikan. Kehadiran jurnal ini diharapkan dapat lebih memperkaya khazanah pemahaman dan praktik di bidang kesejahteraan sosial. Semoga bermanfaat.

Tim Redaksi

Isu Kesenjangan Gender dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

Siti Mulyani

Widyaiswara Ahli Muda, BBPPKS Yogyakarta

E-mail: simulkarli84@gmail.com

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang hubungan antara isu kesetaraan gender dengan upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Metode yang digunakan dengan melakukan penelusuran berbagai penelitian terdahulu tentang perkawinan anak, pertumbuhan remaja perempuan, pola asuh orang tua, dan kondisi sosial budaya terkait pantangan makanan yang berdampak pada pemenuhan gizi bagi ibu dan anak balita. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat mengakibatkan anak lahir dengan berat badan rendah, tidak mengakses pelayanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak, dan tidak melakukan inisiasi menyusui dini. Pantang makanan di beberapa suku bangsa di Indonesia dan peminggiran perempuan dalam mendapatkan makanan serta pengaruh diet pada remaja perempuan dapat menimbulkan risiko *stunting*. Berdasarkan hasil studi literatur ini dapat disimpulkan bahwa dimensi kesetaraan gender terkait peran, akses, kontrol, dan pemberdayaan perempuan belum mendapat perhatian yang cukup dalam pemenuhan berbagai kebutuhan praktis dan strategis perempuan.

Kata kunci: *Stunting*, kesetaraan gender, tindakan preventif dan kuratif.

Abstract

This study was conducted to collect sufficient information about the relationship between gender equality issues and stunting prevention and management efforts. The method used was by tracing various previous studies on child marriage, the growth of adolescent girls, parenting patterns, and socio-cultural conditions related to dietary restrictions that have an impact on nutritional fulfillment for mothers and children under five. The results of this study indicate that child marriage can result in children being born with low birth weight, not accessing health services to monitor child development, and not carrying out Early Initiation of Breastfeeding. Abstinence from food in several ethnic groups in Indonesia and the marginalization of women in getting food and the effect of death on adolescent girls can pose a risk of stunting. Based on the results of this literature study, it can be concluded that the dimensions of gender equality related to women's roles, access, control, and empowerment have not received sufficient attention in fulfilling women's practical and strategic needs.

Keywords: *Stunting*, gender equality, preventive and curative intervention.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menargetkan jumlah anak berumur kurang dari lima tahun yang mengalami *stunting* tersisa 14 persen pada 2024. Target itu tak mudah karena jumlah anak balita *stunting* pada 2019 mencapai 27,7 persen dan naik pada 2020 akibat pandemi Covid-19. *Stunting* merupakan kondisi kronis yang mengganggarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. *Stunting* menurut WHO *Child Growth Standard* didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) <-2 SD (WHO, 2013, p.5). Kasus kejadian *stunting* mengindikasikan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas, terhambatnya perkembangan dan fungsi motorik dan mental serta mengurangi kapasitas fisik. Anak dengan keadaan *stunting* tidak mengalami potensi pertumbuhan secara maksimal dan dapat menjadi remaja dan dewasa yang *stunting* (Ricci & Becker, 1996, p. 974).

Terdapat dua kelompok besar yang menjadi faktor penyebab terjadinya *stunting*, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yang dimaksud adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan (UNICEF, 2013, p. 12). Faktor langsung ini berhubungan dengan ketahanan pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pem-

berian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap layanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Sedangkan faktor tidak langsung berhubungan dengan berbagai faktor, antara lain kesenjangan ekonomi, pendapatan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, pembangunan dan pemberdayaan perempuan (Satriawan, 2018, p.10). Makalah ini merupakan kajian literatur (*literature review*) dari berbagai jurnal penelitian yang ingin melihat isu gender apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka pencegahan dan penanganan *stunting*?

B. STUNTING DAN PERKAWINAN ANAK

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan (BPS, 2020, p.1). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia ibu saat menikah dengan angka *stunting*, dimana terlihat kecenderungan semakin muda usia ibu saat menikah maka proporsi balita dengan

status *stunting* semakin meningkat (Afifah, 2011, p.110). Penelitian lain (Raj *et al.*, 2010, p.5) juga menunjukkan bahwa kehamilan yang terjadi pada perempuan yang melakukan perkawinan anak di bawah 18 tahun secara signifikan berkaitan dengan kejadian *stunting* dan *wasting* (kurus), serta *underweight* (gizi kurang).

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* secara langsung seperti yang ditemukan di Kota Yogyakarta pada anak usia 6-24 di Yogyakarta. Anak dengan riwayat kelahiran BBLR berisiko 5,6 kali lebih besar untuk menjadi *stunting* dibandingkan anak dengan riwayat kelahiran normal (Nasution *et al.*, 2014, p.36).

Hasil Susenas 2018 juga menunjukkan hal yang sama (Tabel 1). Presentase bayi dengan berat badan kurang seikit lebih besar (14,95%) yang lahir dari perempuan yang pernah kawin di usia anak dibanding dengan yang lahir dari perempuan yang tidak pernah mengalami kawin (13,57%). Hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia kurang dari 15 tahun maupun 18 tahun ke atas dalam hal melahirkan bayi di bawah 2,5 kg sama-sama berisar 13-14 persen. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 18 tahun ke atas, lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun (81,75 % berbanding 76,33%).

Tabel 1. Persentase perempuan usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama dan berat badan bayi yang dilahirkan 2 tahun terakhir

Usia Perkawinan Anak	Usia Hamil Pertama				
	<2,5 kg	≥2,5 kg	Tidak Ditimbang	Tidak Tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<18	14,95	76,33	5,57	3,15	100,00
18+	13,57	81,75	2,50	2,18	100,00
<15	14,98	70,05	10,89	4,08	100,00
15+	13,78	80,98	2,92	2,32	100,00

Sumber: BPS (2018)

Demikian halnya dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia 15 tahun ke atas. Lebih besar kemungkinannya melahirkan bayi dengan berat badan di atas 2,5 kg dibandingkan dengan mereka yang

menikah di bawah usia 15 (80,98% berbanding 70,05%). Masih ada sebanyak 10,89 persen bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun ternyata tidak

ditimbang. Artinya dari 10 bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 15 tahun, satu di antaranya kehilangan catatan perkembangan berat badannya. Padahal, pantauan terhadap berat badan bayi baru lahir jadi hal yang sangat krusial. Hal ini karena berat badan merupakan panduan untuk mengetahui apakah nutrisi yang didapatkan bisa terserap dengan baik atau tidak. Pembeian gizi dan nutrisi ini akan jadi 'modal' bagi pertumbuhan fisik dan otak bayi.

Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun yang melahirkan bukan di faskes/nakes lebih besar (9,71%) daripada persentase yang sama di antara yang menikah pada usia 15 tahun ke atas (8,03%). Sementara itu yang menikah pada usia 18 tahun ke atas dan melahirkan di faskes/nakes angkanya paling tinggi yaitu mencapai 34,13 persen berbeda 12 poin dengan yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya 22,13 persen.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) atau permulaan menyusui dini mendukung ASI yang telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan membantu memperkuat sistem kekebalan bayi baru lahir untuk melindunginya dari berbagai penyakit. Berbagai manfaat IMD bagi ibu dan bayi, antara lain: meningkatkan kesempatan bayi memperoleh kolostrum. ASI dan kolostrum

adalah makanan terbaik bagi bayi. Selain itu manfaat IMD juga mendukung keberhasilan ASI eksklusif, memperkuat hubungan ibu dan bayi, dan meningkatkan kesehatan bayi.

Hasil Susenas Maret 2017 mencatat persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 18 tahun ke atas yang melakukan IMD mencapai 28,76 persen, jauh berbeda dengan mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun yaitu hanya sebesar 18,83 persen. Sementara itu perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pada usia 15 tahun ke atas yang melakukan IMD juga cukup tinggi yaitu 26,60 persen dibandingkan dengan mereka yang menikah sebelum usia 15 tahun yang hanya 14,73 persen. Perhatikan Tabel 2.

Perkawinan anak sangat lekat dengan masalah kesetaraan dan keadilan gender, karena perempuanlah yang seringkali dikawinkan dalam usia masih anak-anak karena beberapa alasan, antara lain faktor kemiskinan, menjaga hubungan keluarga besar, melindungi dari hamil di luar nikah, dan faktor lainnya. Sedangkan dampak perkawinan anak bagi perempuan tidak sederhana karena rentan menimbulkan persoalan kesehatan reproduksi yang belum siap hingga resiko kematian. Perkawinan anak juga rentan menyebabkan pola pengasuhan dan manajemen keluarga yang juga belum matang sehingga berdampak pada status gizi ibu dan anak.

Tabel 2. Persentase penduduk perempuan berumur 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama, fasilitas melahirkan, dan IMD

Usia Perkawinan Anak	Fasilitas Melahirkan		Melakukan IMD	
	Faskes/Nakes	Lainnya	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<18	22,13	8,32	18,83	11,62
18+	34,13	7,97	28,76	13,34
<15	21,63	9,71	14,73	16,61
15+	31,48	8,03	26,60	12,91

Sumber: BPS (2018)

Sebuah penelitian gabungan yang dilakukan para peneliti *Harvard School of Public Health, Muhimbi University, dan Imperial College London* (WHO, 2013, p.5) menghasilkan kesimpulan bahwa paparan ibu terhadap kekerasan secara substansial meningkatkan resiko *stunting* pada anak-anaknya. Penelitian tersebut menunjukkan hubungan antara KDRT terhadap prevalensi *stunting* terjadi, baik kekerasan yang dialami perempuan dari golongan kaya maupun yang berpendidikan rendah. Dalam beberapa kasus, depresi ibu berkaitan dengan kelahiran anak dengan berat badan rendah, resiko prematuritas yang lebih tinggi dan peningkatan resiko komplikasi persalinan.

Pada masa Pandemi Covid 19 ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia meningkat cukup signifikan. Dari laporan pengaduan kasus yang masuk ke lembaga layanan seperti di LBH APIK Jakarta, selama masa PSBB hingga masa transisi menuju kebiasaan baru (Maret -

Juni 2020) terdapat 110 kasus KDRT atau meningkat lebih dari 40% dari biasanya (LBH APIK Jakarta, 2020, p.13) Dari kacamata pencegahan *stunting*, terdapat resiko terjadinya peningkatan tekanan psikologis pada perempuan sebagai ibu. Artinya potensi meningkatnya angka *stunting*, *wasting* dan *underweight* sebagai dampak pandemi yang harus di waspadai tidak hanya berasal dari persoalan kemiskinan dan akses kesehatan, tapi juga kontribusi dari KDRT.

C. REMAJA PEREMPUAN KURANG GIZI

Stunting pada remaja merupakan hasil jangka panjang konsumsi kronis diet berkualitas rendah yang dikombinasikan dengan morbiditas, penyakit infeksi, dan masalah lingkungan (Semba *et al.*, 2008, p. 325). Banyak penyebab terjadinya *stunting* diantaranya adalah defisiensi mikronutrien. Salah satu mikronutrien yang mempengaruhi status gizi (*stunting*) yaitu zat besi (Fe).

Defisiensi besi mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan remaja, dengan menghambat pertumbuhan linier (Caulfield *et al.*, 2006, p. 565). *Stunting* pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau pra-sekolah. Malnutrisi yang terjadi pada masa balita yang mengindikasikan *stunting*, akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan remaja terhambat.

Dampak jangka panjang dari *stunting* pada kesehatan remaja perempuan adalah berupa perawakan tubuh pendek, peningkatan resiko obesitas, dan penurunan kesehatan reproduksi, sedangkan dampak pada hal perkembangan ialah penurunan prestasi dan kapasitas belajar, serta penurunan kemampuan dan kapasitas kerja (WHO, 2013, p.3). Pola konsumsi makan remaja perempuan merupakan salah satu penyebab terjadinya defisiensi asupan Fe, dikarenakan remaja perempuan cenderung ingin menjaga bentuk badan, sehingga membatasi konsumsi makanan yang menyebabkan kurangnya asupan zat gizi. Asupan makanan yang kurang dapat menyebabkan cadangan besi dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan zat besi untuk proses sintesis pembentukan hemoglobin (Hb). Akibat dari hal tersebut yang terjadi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kadar Hb terus berkurang dan menimbulkan masalah gizi lain, contohnya anemia.

Berdasarkan kajian Bertermann dari lembaga sosial *Girl Effect* dan *Nutrition International*, kepercayaan terhadap sejumlah larangan untuk mengonsumsi makanan-makanan tertentu membuat remaja perempuan Indonesia mengalami kekurangan gizi hingga menghambat pertumbuhannya. Alih-alih menikmati makanan sehat, mereka cenderung memakan kudapan dan makanan cepat saji. Remaja perempuan yang disurvei Bertermann mengaku menghindari mentimun karena dianggap menyebabkan keputihan, dan nanas yang dapat membuat mereka sulit hamil kelak. Penelitian keadaan nutrisi remaja putri berumur 13-18 tahun tersebut dilakukan pada tahun 2017, di antaranya di daerah Lombok. Para peneliti menemukan 10 persen remaja terlalu kurus atau indeks massa tubuhnya rendah, sementara 10% lainnya justru mengalami kelebihan berat badan

Hasil survei “Persoalan dan Pemenuhan Gizi Perempuan Muda di 8 Provinsi di Sumatera” mengindikasikan beroperasinya apa yang dinamakan oleh Wolf (2017, p. 303), dalam konteks mitos kecantikan yaitu semua hal yang berhubungan dengan makan pada perempuan adalah sebuah isu publik, porsi makan (yang lebih sedikit) membenarkan dan memperkuat perasaan inferior perempuan secara sosial. Jadi ketika perempuan tidak bisa menyantap makanan yang sama dengan laki-laki, perempuan tidak mendapatkan status yang sama di dalam masya-

rakat. Penelitian tersebut menyatakan bahwa kosmetik dan pulsa adalah kebutuhan utama bagi remaja perempuan. sehingga pola hidup sehat tidak dipandang sebagai hal yang penting. Diungkapkan anggapan bahwa perempuan yang langsing, putih dan mungil adalah cantik membuat sebagian besar perempuan di Sumatera khususnya Sumatera Barat melakukan diet dengan pola yang tidak sehat. “alih-alih kurus dan putih, banyak perempuan justru pucat dan lemas”. Sementara itu, jika *stunting* terjadi pada laki-laki banyak orang memeranginya, sebab laki-laki dianggap harus kuat dan tinggi. Dari sini kita bisa melihat bias gender masih bermain pada arena penyelesaian *stunting*. Perempuan menjadi tempat kritik jika menghasilkan anak yang tidak sehat, tetapi juga dikontrol dengan mitos agar terlihat seperti yang masyarakat inginkan (Lumbantobing, 2018, p.1).

D. POLA ASUH

Pemahaman umum dalam mengentaskan *stunting* adalah memfokuskan pada upaya kesehatan yang merupakan faktor risiko. Sering kali upaya lainnya yang menjadi faktor protektif dianggap kurang berperan dan tidak dilakukan. Padahal faktor risiko (termasuk diantaranya kondisi kesehatan anak, gizi pada saat hamil) sangat dipengaruhi oleh faktor pelindung dua diantaranya adalah pola asuh orangtua/keluarga. Segala sesuatu yang terjadi pada

masa 1000 HPK menjadi faktor penentu kualitas kehidupan anak kelak. Faktor penentu kualitas kehidupan anak kelak seperti pola asuh anak berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatan dengan anak, memberikan makan, merawat, kebersihan, memberikan kasih sayang sebagainya. Seluruhnya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik dan mental), tentang status gizi, pendidikan umum, penghasilan, pengetahuan, dan keterampilan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau masyarakat, dan sebagainya dari ibu dan pengasuh anak.

Salah satu aspek pola asuh yaitu pemberian makan atau *parental feeding style* adalah bentuk mendidik keterampilan makan, membina kebiasaan makan, membina serela terhadap jenis makanan, membina kemampuan memilih makanan untuk kesehatan dan mendidik perilaku makan yang baik dan benar sesuai kebudayaan masing-masing. Menurut Baumrind (1967, p.87) dalam ranah pemberian makanan tipe pola asuh orang tua dibagi menjadi 4 tipe yaitu demokratis, otoriter, permisif, dan pengabaian. Perbedaan keempat tipe pola asuh tersebut dilihat dari beberapa aspek, yaitu seberapa besar tuntutan atau dorongan orang tua pada anak untuk makan, seberapa besar pendam-pingan atau dukungan orang tua terkait asupan makan anak, serta pemilihan menu makanan apakah mutlak

ditentukan oleh orang tua atau menyesuaikan dengan keinginan anak.

Penelitian Rahmayani (2015, p. 62) tentang hubungan antara pola asuh dengan kejadian *stunting* pada anak umur 12-36 bulan di Kabupaten Sijunjung menunjukkan bukti bahwa pola asuh makan, pola asuh kesehatan, pola asuh psikososial dan status ekonomi merupakan faktor risiko yang mempengaruhi kejadian *stunting*. Penelitian Loya dan Nuryanto (2017, p. 93) tentang Pola Asuh Pemberian Makan Pada Balita *Stunting* Usia 6-12 Bulan di Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur juga menemukan bahwa pola asuh pemberian makan kepada balita *stunting* tidak sesuai dengan kebutuhan gizi subjek. Praktik pemberian ASI yang tidak eksklusif, pemberian MP-ASI yang terlalu dini pada subjek sebelum 6 bulan. Jenis MP-ASI yang tidak variatif, frekuensi pemberian makan yang tidak sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Rendahnya pengetahuan ibu mengenai pola asuh pemberian makan pada balita adalah faktor ketidak-sesuaian pemberian ASI dan pemberian MP-ASI kepada subjek penelitian. Penelitian lain Hubungan Pola Asuh Ibu dengan kejadian *stunting* pada balita usia 25-59 bulan di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan pada pengukuran antara variabel pola asuh ibu dengan kejadian *stunting* didapatkan hasil p-value 0.0001 (<0.05), sehingga ada hubungan antara pola asuh ibu dengan

kejadian *stunting* (Sari, 2019 *et al.*, p. 57). Dari beberapa penelitian pada usia yang bervariasi di bawah lima tahun dan tiga daerah yang berbeda menunjukkan kecenderungan yang sama.

E. BUDAYA DAN BIAS GENDER

Bias gender terjadi ketika identitas laki-laki dan perempuan diberi 'nilai' yang berbeda di dalam komunitas mereka dilahirkan, menyebabkan anak laki-laki dan perempuan menerima perlakuan, perawatan dan sumber daya yang berbeda sesuai untuk 'nilai' mereka. Dalam beberapa konteks, laki-laki dianggap sebagai penyangga ekonomi generasi mendatang, dan anak perempuan adalah membebani sumber daya dan pada akhirnya akan meninggalkan rumah keluarga karena pola pernikahan. Orang tua mungkin telah membuat pilihan pragmatis berdasarkan persepsi mereka tentang betapa berguna atau berharganya seorang laki-laki.

Di beberapa daerah di Indonesia masih memegang teguh budaya patriarki yaitu kekuasaan ada dipihak laki-laki. Perbedaan gender telah melahirkan ketidak-setaraan gender yang berimbas pada posisi yang disandang oleh kaum perempuan. Perempuan yang mengalami subordinasi dalam keluarga disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kodrat (*nature*) dan faktor budaya atau konstruksi sosial (*nurture*) yang dibentuk oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak negatif subordinasi perempuan yaitu membatasi pere-

mpuan untuk mendapatkan akses dalam kehidupan sejak lahir sampai dewasa (Nawir & Risfaisal, 2015, p.36). Perlakuan subordinasi dalam keluarga yang didapatkan yaitu mendahulukan pemenuhan kebutuhan anak laki-laki dari pada anak perempuan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Hal ini bisa menyebabkan kebutuhan gizi balita teru-tama anak perempuan tidak terpenuhi sehingga bisa menyebabkan terjadinya anemia pada anak perempuan. Di beberapa daerah, perempuan biasanya makan terakhir, termasuk selama kehamilan, karena adanya keyakinan konservatif yang menganggap suami sebagai pencari nafkah sehingga layak mendapatkan gizi makanan yang terbaik.

Fenomena tabu makanan pada perempuan di Indonesia masih menjadi masalah karena banyak jenis makanan yang seharusnya dikonsumsi tapi ternyata dihindari. Akibatnya, perempuan, terutama mereka yang sedang hamil atau menyusui, tidak berani mengonsumsi makanan tertentu yang berakibat pada status gizi mereka. Dari situasi ini, tersirat adanya permasalahan yang diasumsikan bersumber dari adanya ketidaksetaraan gender. Dalam penelitian Sukandar (2006, p.55), diketahui bahwa di Banjar, Jawa Barat, makanan tabu bagi perempuan dewasa cukup banyak yaitu ada 16 macam makanan. Nanas, pisang ambon, dan daun singkong adalah makanan yang paling sering disebutkan sebagai makanan tabu bagi perempuan dewasa.

Sementara tabu makanan di Barito Kalimantan Selatan, Sukandar (2007a, p. 47) mencatat dua macam makanan yang terlarang bagi perempuan dewasa, yaitu telur dan pisang kembar. Menurut kepercayaan setempat, pisang kembar dapat menyebabkan ibu melahirkan bayi kembar dempet. Kepatuhan untuk menghormati larangan ini sebenarnya sangat merugikan perempuan dewasa karena untuk kesehatannya, mereka sebenarnya perlu mengonsumsi telur yang mengandung protein yang tinggi dan terjangkau harganya. Sedangkan pada risetnya di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sukandar (2007b. p. 45) menemukan bahwa makanan tabu yang utama bagi perempuan di wilayah tersebut adalah buah mangga dan berbagai jenis ikan. Mangga harus dijauihi perempuan karena dipercaya dapat menyebabkan bau badan dan haid yang tidak berhenti. Sedangkan berbagai macam ikan seperti balle-balle, balana, hiu, dan ciko pantang dikonsumsi dengan alasan sumpah nenek moyang untuk tidak memakannya karena mereka pernah ditolong oleh ikan-ikan tersebut. Jika ada perempuan yang tidak patuh dan memakannya, ia akan menderita penyakit kulit. Jayati *et al.* (2016, p. 36) menyatakan bahwa di wilayah Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat, makanan yang tabu dimakan oleh perempuan adalah pisang ambon, ikan dan kerang yang memengaruhi densitas asupan protein.

Perempuan yang mendapatkan tabu makanan berikunya adalah Perempuan hamil. Kehamilan dipandang sebagai peristiwa publik. Satu-satunya peristiwa pribadi dalam suatu kehamilan adalah bahwa janin tumbuh di suatu tubuh subjek perempuan. Bahkan karena visibilitasnya, subjek hamil sesungguhnya tidak dapat menyembunyikan proses di dalam tubuhnya itu. Dengan demikian, kehamilan sangat berpotensi menjadi ruang ketika semua orang merasa dapat berpartisipasi dan mempunyai hak atas kehamilan itu. Kehamilan mempublikasikan subjek hamil (Prabasmoro, 2006, p. 16).

Campur tangan orang tua dan suami sangat jelas menjadi sumber dari pantangan-pantangan makan bagi perempuan hamil. Tabu makanan yang dipercaya perempuan hamil, menurut Rofi'ah *et al.* (2017, p.3) dapat memengaruhi pemilihan makanan sebagai bentuk asupan nutrisinya. Berbagai jenis makanan memang dianjurkan dikonsumsi untuk memperlancar proses kehamilan dan persalinannya. Namun, ibu hamil juga harus melakukan pemilihan dan pantangan makanan tertentu karena ingin menghormati anjuran orang tua (ibu atau ibu mertua) dan untuk menghindari berbagai konflik yang dapat timbul nantinya. Munculnya pandangan tentang makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan seperti ini menimbulkan kategori 'bukan makanan' sebagai sebutan makanan yang tidak boleh

dimakan (Anderson & McFarlane, 2006, p. 313).

Pasangan yang ingin mendapatkan keturunan pun misalnya sering ditakuti untuk tidak mengonsumsi kedelai dan produk turunannya seperti tahu dan tempe yang dianggap membuat alat reproduksi tidak subur (Dewi, 2009, p. 3). Perempuan hamil juga tidak boleh memakan telur (Dewi, 200, p. 6) karena dikhawatirkan ASI nya nanti berbau amis. Perempuan yang sedang mengandung juga pantang memakan ikan laut, karena dapat membuat ASI menjadi bau amis dan menyebabkan luka jahit sisa persalinan menjadi sulit kering.

Menurut Fannania (2017, p.1), ada tujuh jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi perempuan hamil, yaitu: (1) gurita, karena diyakini janin akan terbelit ariari ketika dilahirkan dan juga akan mengakibatkan penyakit gatal pada ibu dan janinnya, (2) ikan hiu, yang dapat mengakibatkan janin sulit keluar dan akan terjadi perdarahan saat melahirkan, (3) ikan yang dapat menyebabkan bau badan ibu dan janin dalam kandungan menjadi amis, (4) udang yang masih dipercaya dapat membuat anak yang dilahirkan menjadi bungkuk. Budaya tabu lainnya adalah bila ibu hamil mengonsumsi (5) jantung pisang, bentuk kepala bayi akan menjadi lonjong seperti jantung pisang. (6) Salak juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena menyebabkan perempuan susah buang air besar. Sedangkan buah (7) durian dan nanas dipercaya akan

menyebabkan keguguran dan juga dianggap membuat kelamin perempuan ‘becak’ dan mengalami keputihan Dewi (2009, p.5).

Penelitian yang dilakukan Sukandar (2007a, p. 46) mengungkapkan bahwa tabu makanan pada perempuan hamil sebenarnya berkaitan dengan [ketakutan pada] kelahiran yang sulit, menyakitkan, atau menyebabkan keguguran. Ada tujuh jenis makanan yang dihindari untuk dikonsumsi perempuan daerah Barito Kalimantan Selatan, yaitu: es, pisang kembar, kelapa muda, air kelapa, nenas muda, ikan, dan ikan tauman. Pada penelitian lainnya dengan tema serupa di Jenepono Sulawesi Selatan, Sukandar (2007b, p. 44) menemukan jumlah tabu makanan yang lebih banyak, yang terdiri dari tumbuhan seperti buah tala, daun kelor, terong; dan sejumlah ikan seperti pari, toka-toka, gurita dan cumi-cumi. Makanan yang ditabukan bagi ibu hamil memang sangat banyak dan alasan yang diberikan oleh responden tidak selalu masuk akal masyarakat umum. Sebagai contoh, pepaya ditabukan karena akan menyebabkan bayinya susah keluar, anak dalam perut akan sakit, akan terasa sakit waktu melahirkan, dan lain-lain. Cumi-cumi, ikan pari dan ikan toka-toka sebenarnya sangat baik bagi perempuan hamil karena merupakan sumber protein yang tinggi.

Studi literatur menunjukkan bahwa banyak masyarakat dari berbagai budaya percaya adanya hubungan antara makanan dengan kesehatan ibu nifas yang

sebenarnya salah. Mereka memberikan perlindungan yang bersifat protektif terhadap ibu nifas, sehingga keputusan untuk mengonsumsi makanan ditentukan oleh pihak yang dianggap punya kewenangan, yaitu suami, orang tua serta orang yang memiliki kemampuan seperti dukun (Baumali, 2009, p.89). Secara tradisional, pembuatan keputusan keluarga dilakukan oleh suami, namun keluarga besar terutama ibu atau ibu mertua juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya tentang pemilihan makanan yang boleh dikonsumsi ibu nifas karena ibu atau ibu mertua dianggap lebih tahu tentang apa saja yang harus dilakukan saat masa nifas.

Jenis makanan yang dipantang ibu nifas bervariasi, utamanya adalah cumi-cumi, dengan alasan cumi-cumi tersebut dianggap beracun dan dipercaya dapat mempengaruhi perubahan warna ASI sehingga ibu nifas khawatir bayi yang disusunya kulitnya akan hitam. Ibu nifas juga ada yang berpantang pada ikan laut, udang, ikan sembilang, ikan lele, daging kambing, telur, nanas, durian, jantung pisang dan terong. Ibu nifas mengaku tidak mempunyai keberanian untuk menolak pantangan-pantangan selama masa nifas yang merupakan tradisi turun temurun dan dianjurkan atau didukung oleh ibu maupun ibu mertua dari ibu nifas dengan alasan takut menanggung akibat apabila melanggar aturan tersebut. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Alwi dan Oemiati (2004, p.70) yang mene-

liti tentang tradisi makanan sehari-hari dan makanan pantang ibu-ibu Papua selama hamil dan setelah persalinan. Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi bermakna antara pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai, kepercayaan, budaya dan pengalaman dengan pantang makanan. Mas'adah dan Sukesu (2010, p.7) meneliti hubungan antara kebiasaan berpantang makanan tertentu dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas.

F. PENUTUP

Perlu disadari bahwa penanganan *stunting* tidak hanya mempersoalkan dimensi kesehatan dan gizi yang selama ini digunakan sebagai unsur pengurangan *stunting*. Masalah *stunting* juga harus dianggap sebagai fenomena sosial budaya karena memang ada banyak faktor kompleks yang terkait dengan masalah tersebut yaitu perkawinan anak, persepsi remaja tentang tubuh, pola asuh dan budaya yang bias gender.

Ada dimensi lain yang tidak banyak mendapat perhatian dengan upaya pengurangan *stunting* selama ini, yaitu dari aspek kesetaraan gender, peran, akses, kontrol dan pemberdayaan perempuan. Padahal yang berperan lebih besar dalam perawatan bayi dan balita adalah perempuan. Dalam kerangka pendampingan keluarga untuk pencegahan dan penanganan *stunting* diperlukan intervensi

dengan memberi perhatian pada kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis serta memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumberdaya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.

Referensi

- Afifah, T. (2011). Perkawinan Dini dan Dampak Status Gizi pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia* Volume 34 (2), pp.109-119.
- Alwi, Q. & Oemati, R. (2004). Tradisi makanan sehari-hari dan makanan pantang ibu-ibu Papua selama hamil dan setelah persalinan. *Jurnal Kedokteran Yarsi*, Vol 12. No. 3, pp. 61-71
- Anderson, E.T & McFarlane, J. (2006). *Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- BPS (2018). *Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS (2020). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen)*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/ (3 Februari 2021)
- Baumali, A. (2009). *Pemenuhan Zat Gizi Ibu Nifas dan Budaya Se'l pada*

- Masyarakat Suku Timor Dawan di Kecamatan Molo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tesis pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Baumrind, D. (1967). Child Care Practices Antecedent Three Patterns of Preschool Behavior. *Genetic Psychology Monographs*, 75 (1), pp. 43-88.
- Cahyono, E.D. (2014). *Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region*. Disertasi di The Ohio State University.
- Caulfield, L.E., Richard, S.A, Rivera, J.A, Musgrove, P. & Black, R.E., (2006). “Stunting, Wasting, and Micronutrient Deficiency Disorders” in Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd edition. Washington (DC): *The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank*, Washington DC. pp. 551-565.
- Dewi, R.D.K, (2009). “Pandangan Masyarakat mengenai Makanan Pantangan yang Justru adalah Makanan Bergizi.” dalam <https://rizqidyan.wordpress.com/2012/10/11/pandangan-masyarakat-mengenai-makanan-pantangan-yang-justru-adalah-makanan-bergizi>
- Fannania (2017). *7 Budaya Tabu Makanan pada Masa Kehamilan*. Diakses dari <https://www.brilio.net/creator/7-budaya-tabu-makanan-pada-masa-kehamilan-111735.html> (30 Mei 2021)
- Jayati, L. D., Madanijah, S. & Khomsan A. (2016). Pola Konsumsi Pangan, Kebiasaan Makan, dan Densitas Gizi pada Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Gizi Makan* Volume 37, No. 1, pp. 33-42
- LBH APIK Jakarta (2020). *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara Untuk Menciptakan Ruang Aman Dari Kekerasan*. Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Periode 2020.
- Loya, R.R.P. & Nuryanto, N. (2017). Pola asuh pemberian makan pada bayi *stunting* usia 6-12 bulan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Journal of Nutrition College*, vol. 6, no. 1, pp. 84-95, Jul. 2017. <https://doi.org/10.14710/jnc.v6i1.16897>
- Lumbantobing, D. (2018). “MAMPU Diskusikan Isu Perempuan dan Stunting”, <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/mampu-diskusikan-isu-perempuan-dan-stunting>
- Mas’adah, S. & Sukes (2010). *Hubungan antara Kebiasaan Berpantang Makanan Tertentu dengan Penyembuhan Luka Perineum pada Ibu Nifas*. Edisi Khusus Hari Kesehatan Internasional, Hardiknas dan Hari Bidan/creator/7-budaya-tabu-makanan-pada-masa-kehamilan-111735.html

- Nasution, D., Nurdianti, D.S. & Huriyati, E. (2014). Berat badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian *stunting* pada anak usia 6-24 bulan. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia* Volume 11 No. 1, pp.31-37
- Nawir, M. & Risfaisal (2015). Subordinasi Anak Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume III No. 1, 29-36.
- Rahmayani, N. (2015). *Hubungan Pola Asuh Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Umur 12-36 Bulan di Wilayah Puskesmas Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*. Diploma Thesis, UPT. Perpustakaan Unand. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/458/>
- Nurdianti, D.S. & Huriyati, E (2014). Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian *Stunting* pada Anak Usia 6-24 Bulan. *Jurnal Klinik Gizi Indonesia* Volume 11 No. 0, pp. 31-37.
- Prabasmoro, P.A. (2006). *Penumbuhan Kehamilan: Narasi, Subjektifitas dan Tantangan Patriarkal*. Makalah untuk didiskusikan pada Institut Nalar Jatinangor, 11 Februari 20026
- Raj, A., Niranjana Saggurti., Michael Winters, Alan Labonte, Michele R. Decker, Donta Balaiah, Jay G. Silverman. (2010). The Effect of Maternal Child Marriage on Morbidity and Mortality of Children Under 5 in India: Cross Sectional Study of Nationally Representative Sample. *BMJ* Volume 340: b4258. pp: 1-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.b4258>
- Ricci, J.A. dan & Becker, S. (1996). Risk faktor for wasting and stunting among children in Metro Cebu, Philippines. *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 63, Issue 6, June 1996, pp. 966–975, <https://doi.org/10.1093/ajcn/63.6.966>
- Rofi'ah, S.Z., Husain, F., & Arsi, A.A. (2017). Perilaku Kesehatan Ibu Hamil dalam Pemilihan Makanan di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. *Solidarity*, Vol. 6 No. 2. pp.109-121.
- Sari, C.O., Arum, D.N.S. & Maryani, T. (2019). *Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Tahun 2018*. Skripsi pada Poltekkes Kemenkes, Yogyakarta
- Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024. Makalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Semba, R.D., de Pee, S., Sun, K., Sari, M., Akhter, N., & Bloem, M. W. (2008). Effect of parental formal education on risk of child *stunting* in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study. *The Lancet*, 371(9609), 322–328. doi:10.1016/s0140-6736(08)60169-5
- Sukandar, D. (2006). Makanan Tabu di Banjar Jawa Barat. *Jurnal Gizi dan Pangan*, Volume 1, No. 1, pp.51-56. <https://doi.org/10.25182/jgp.2006.1.1.51-56>

- Sukandar, D. (2007a). Makanan Tabu di Barito Kuala Kalimantan Selatan, *Jurnal Gizi Dan Pangan*, Volume 2, No. 2, pp. 44-48. <https://doi.org/10.25182/jgp.2007.2.2.44-48>
- Sukandar, D. (2007b). Makanan Tabu di Janeponto Sulawesi Selatan. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, Volume 2, No 1, pp. 42-46. <https://doi.org/10.25182/jgp.2007.2.1.42-46>
- UNICEF (2013). *Improving Child Nutrition The achievable imperative for global progress*. Diakses dari www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf (18 Januari 2021).
- WHO (2013). *Childhood Stunting: Challenges and Opportunities 14 October 2013* – WHO Geneva.
- Wolf, N. (2017). *Mitos Kecantikan: Menafsir Kecantikan dalam Berbagai Konteks* (Terj, A.S. Witakania Sundasari & L.M. Rahayu Ed.). Bandung: UNPAD Press.

Keselarasan Kesehatan dan Budaya dalam Mencegah *Stunting*

Hermaini Siswati

Widyaswara Ahli Muda, BBPPKS Regional I Sumatera, Kementerian Sosial
dan Pemerhati Masalah Anak dan Perempuan
E-mail: hermainihamzah@gmail.com

Abstrak

Selama ini *stunting* dipandang dari perspektif kesehatan, ekonomi dan pendidikan yang kurang memiliki keterpaduan paradigma. Dimana kemiskinan dan pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kelas bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Namun faktanya *stunting* juga terjadi di masyarakat kelas menengah ke atas di daerah perkotaan. Mereka yang secara ekonomi, pendidikan, informasi dan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan untuk mencegah *stunting*. Untuk itu perlu membangun kesadaran masyarakat agar terlibat dalam menciptakan pola hidup sehat yang selaras dengan budaya setempat sehingga mudah diterapkan. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanganan *stunting* dapat bersifat terpadu dimana dimensi kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan budaya setempat.

Kata kunci: *Stunting*, kesadaran masyarakat, kesehatan, dan budaya lokal.

Abstract

Recently *stunting* is seen from the perspective of health, economy and education which lacks an integrated paradigm. Where poverty and low education cause the lower class to be unable to meet nutritional needs in the first 1000 days of a child's life. However, the fact is that *stunting* also occurs in the upper middle class in urban areas. Those who have economic, educational, information and easy access to health facilities to prevent *stunting*. For this reason, it is necessary to build public awareness to be involved in creating a healthy lifestyle that is in harmony with local culture so that it is easy to implement. Thus, *stunting* prevention and management efforts can be integrated where the health dimension is closely related to local cultural life.

Keywords: *Stunting*, public awareness, health, and local culture

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan kerentanan dan kecanduan *gadget* pada anak. Di saat bersamaan anak juga berisiko mengalami *stunting*. Kalau ditelusuri

berdasarkan data yang ada terdapat sekitar 24 juta balita berisiko lebih tinggi mengalami kurang gizi atau gizi buruk (*Selain Pandemi Covid-19 ...*, 11 Juli 2020). Sungguh angka yang luar biasa.

Persoalan *stunting* bukanlah persoalan baru di Indonesia akan tetapi merupakan persoalan lama yang mencuat kembali. Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2013 sekitar 37 persen anak balita mengalami *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas). Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesardi dunia. Dari 159 juta anak yang *stunting* di seluruh dunia, 9 juta di antaranya tinggal di Indonesia (TNP2K, 2017).

Dalam perjalananya upaya pemerintah menurunkan angka *stunting* membuahkan hasil. Tercatat di tahun 2019 *stunting* ada di kisaran 27,67 persen berdasarkan Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Selama kurun waktu enam tahun terjadi penurunan 10 persen dari 37 persen ke 27 persen jumlah *stunting* di tanah air. Walaupun prevalensi *stunting* mengalami penurunan akan tetapi masih tinggi. Karena di atas batas yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen. Upaya penurunan *stunting* kembali dilakukan dengan menetapkan 100 kabupaten/kota menjadi lokus untuk melakukan intervensi penurunan *stunting* berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021.

Menurut buku ringkasan 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi anak Kerdil yang disusun oleh TNP2K

stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Kondisi *stunting* baru tampak setelah bayi berusia dua tahun dari ciri fisik, tinggi badan terlihat lebih pendek dari anak seumurannya.

Untuk lebih mengetahui apakah anak menderita *stunting*, perlu diperhatikan ciri yang melekat. Terdapat beberapa ciri anak *stunting* berdasarkan pandangan Kemen-desa PDTT RI (2017) dalam Nurlailis (2020) yaitu pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, pertumbuhan gigi terlambat, usia 8 sampai 10 bulan menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan *eye contact*, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar termasuk mengalami keterlambatan pubertas. Jadi ada beberapa ciri yang harus dipastikan dimiliki oleh seorang anak ketika anak tersebut dinyatakan *stunting*. Tidak cukup hanya dengan melihat ukuran tinggi badan saja yang selama ini diyakini publik bahwa anak *stunting* adalah anak pendek. Karena tidak semua anak pendek mengalami *stunting*.

Stunting mengakibatkan penderitaan pada anak. Dalam jangka pendek dapat mengganggu perkembangan otak dan kecerdasan anak, mengganggu perkembangan fisik dan metabolisme. Jangka panjang akan

menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit terutama diabetesmelitus, obesitas, jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, serta disabilitas pada usia tua. Kesemuanya akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktivitas dan daya saing bangsa (Nurlailis, 2020). Dengan demikian *stunting* bukan hanya berdampak pada anak tetapi juga masa depan bangsa karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Mengingat parahnya bahaya *stunting* maka perlu diketahui penyebab terjadinya sehingga ditemukan cara efektif dalam melakukan pencegahan dan penanganan *stunting* di masyarakat. Disamping aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi maka aspek apa lagi yang berpotensi menimbulkan *stunting*. Tulisan ini akan mencoba membahas ke arah sana.

B. PENYEBAB STUNTING DI INDONESIA

1. Budaya Menentukan Perilaku Masyarakat

Dari perspektif kesehatan menurut Ramli *et al.* (2009), *stunting* disebabkan oleh berat badan bayi lahir rendah, air susu ibu (ASI) yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai, diare berulang, dan infeksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa *stunting* tidak *ujuk-ujuk* terjadi akan tetapi merupakan proses panjang kekurangan gizi kronis pada anak. Proses ini telah dimulai

semenjak anak dalam kandungan sampai anak umur dua tahun yang lebih dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga Ketika dilahirkan anak mempunyai berat badan rendah, diikuti dengan pemberian ASI yang tidak memadai, makanan pendamping ASI yang kurang gizi sehingga anak gampang terserang penyakit terutama diare dan infeksi. Serangkaian kejadian inilah yang membuat anak mengalami *stunting*.

Dalam kenyataannya *stunting* bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi gizi anak dan kehilangan pengetahuan mengenai kesehatan. Akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Karena sebanyak 30 persen penderita *stunting* di Indonesia berasal dari anak dengan tingkat ekonomi menengah ke atas yang tinggal di perkotaan (30 Persen...., 3 Mei 2018). Artinya *stunting* tidak hanya dialami oleh keluarga miskin yang berada di pedesaan akan tetapi dari keluarga kaya yang tinggal di kota. Dengan demikian faktor kesehatan, ekonomi dan pendidikan tidak secara otomatis dapat mencegah terjadinya *stunting* pada anak.

Keluarga yang memiliki ekonomi dan pendidikan yang baik tidak secara langsung mempunyai pola hidup sehat. Sebaliknya mereka terbiasa mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk peningkatan kesadaran baik pada masyarakat kelas

bawah maupun menengah ke atas yang dapat mendorong pada perilaku hidup sehat. Artinya perlu menumbuhkan kebiasaan yang baik dan mengikis kebiasaan buruk yang ada dalam masyarakat.

Pola hidup seseorang ditentukan oleh kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “budhayah”, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990). Sedangkan menurut Tylor (dikutip dari Tilaar, 2002) budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dapat disimpulkan budaya memuat kompleksitas dari pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, seni, adat istiadat, tradisi yang ada di masyarakat. Keseluruhannya menjadi pedoman kehidupan di masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial bukan makhluk individu. Setiap individu dituntut untuk menyesuaikan perilakunya melalui proses belajar atau yang dikenal dengan internalisasi dan sosialisasi.

Internalisasi menurut Kalidjernih (2010) adalah proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian, dan

sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan normanorma sosial dari perilaku suatu masyarakat”. Sedangkan sosialisasi menurut Charles R. Wright (Sutaryo, 2004, p. 156) adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu normanorma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.” Jadi akan belajar agar diterima menjadi bagian dari masyarakat, kemudian ia mengikat dirinya ke dalam nilai dan norma sosial dari perilaku kelompoknya di masyarakat. Penerimaan ini penting agar setiap individu bisa hidup rukun dalam masyarakat. Sebaliknya bila perilaku individu tidak sesuai dengan budaya maka konsekuensi sosial akan diterimanya seperti pengucilan bahkan pengusiran dari komunitasnya.

Proses internalisasi dan sosialisasi inilah yang akan mendasari tindakan individu dalam masyarakat yang oleh Max Weber (Turner, 2012, p. 115) yang dimasukkan dalam tindakan tradisional yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mengakar secara turun temurun. Tindakan tradisional ini melingkupi tindakan yang melingkupi siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai ke kematian. Berbagai ritual dilakukan termasuk dalam menyambut kelahiran dan perawatan ibu hamil, ibu menyusui dan pengasuhan anak.

2. Budaya Pantang Makan Makanan Tertentu pada Ibu Hamil dan Menyusui

Setiap masyarakat mengembangkan nilai-nilai sosial yang berwujud ritual di setiap siklus kehidupan manusia. Ritual ini dimulai sejak bayi dalam kandungan, menyambut bayi lahir, memasuki dunia anak dan remaja, dewasa dan menikah sampai pada kematian. Seperti *Slametan* tujuh bulan, turun mandi, Ngaben, dan lain sebagainya. Tidak hanya *Slametan*, akan tetapi termasuk apa yang boleh dan pantang untuk dikonsumsi.

Di berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia hamper semuanya mengenal pantang makan makanan tertentu pada saat hamil dan menyusui. Sebagai contoh dalam masyarakat Suku Sasak ibu hamil dan menyusui pantang makan gurita, udang, cumi-cumi, kerang, ikan khususnya ikan hiu, jantung pisang, salak, nanas, duren dan biji-bijian/kacang-kacangan yang keras. Karena dikhawatirkan memberi dampak buruk bagi kesehatan ibu dan janinnya. Jika dikonsumsi diyakini dapat membelit ari-ari, bayi sulit keluar saat dilahirkan dan terjadi perdarahan saat melahirkan. Hal senada diperkuat oleh temuan Fannania (2017) terdapat tujuh jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi perempuan hamil, yaitu di antaranya: (a) gurita, karena diyakini janin akan terbelit ariari ketika dilahirkan dan juga akan mengakibatkan penyakit gatal pada ibu dan janinnya; (b) ikan hiu,

yang dapat mengakibatkan janin sulit keluar dan akan terjadi perdarahan saat melahirkan; (c) ikan yang dapat menyebabkan bau badan ibu dan janin dalam kandungan menjadi amis; (d) udang yang masih dipercaya dapat membuat anak yang dilahirkan menjadi bungkok. Budaya tabu lainnya adalah bila ibu hamil mengonsumsi; (e) jantung pisang, bentuk kepala bayi akan menjadi lonjong seperti jantung pisang. (f) Salak juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena menyebabkan perempuan susah buang air besar. Sedangkan buah (g) durian dan nanas dipercaya akan menyebabkan keguguran.

Dalam suku Sasak perempuan yang baru melahirkan atau operasi hanya boleh makan tahu dan tempe tanpa garam (*nganyep*), dilarang makan makanan yang amis (seperti makanan laut, telur, daging, dan terasi). Makanan harus disangrai/dibakar. Saat menyusui pantang makanan pedas, pisang, labu dan ikan. Jika ibu menyusui makan makanan pedas dipercaya oleh masyarakat Suku Sasak akan mengakibatkan bayi yang disusui mengalami diare, dan jika makan pisangmakabayi akan menderita sariawan. Anak balita jika sakit dilarang makan pisang, telur, ikan laut, ayam, dan makanan amis lainnya. Jika pantangan ini dilanggar, penyakit balita akan semakin parah (Nurbaiti, *et al.*, 2014)

Begitu juga di masyarakat Pucakwangi, Pati Jawa Tengah, ditemukan bahwa perempuan hamil pada umumnya ditabukan

makan berbagai jenis ikan, udang dan kerang, juga buah-buahan seperti kurma, salak, anggur, durian, dan papaya. Informasi tentang larangan-larangan ini menurutnya didapatkan sebagian besar dari orang tua, bidan, dan internet (Rofi'ah., 2017, p. 7). Hal senada juga ditemui pada masyarakat Barito, terdapat 11 jenis makanan yang ditabukan bagi ibu menyusui termasuk telur dan ikan (Sukandar, 2007a, p. 46). Demikian juga di Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sukandar, 2007b, p. 45) tabu ibu menyusui makan ayam, ikan, dan udang karena dapat mengalami bau badan yang busuk, lumpuh, atau sakit cacar.

Di daerah Jawa Barat, perempuan menyusui mempercayai bahwa lalapan sayur lebih baik untuk dikonsumsi daripada ikan, daging sapi dan ayam, karena ASI mereka terbukti menjadi lebih banyak secara kuantitas, dan jika memakan makanan dari golongan hewani dapat menyebabkan sulit melahirkan, rasa ASI menjadi amis dan badan gatal. Tanpa sadar, mereka mengabaikan kualitas ASI sendiri, dan karena tubuhnya kekurangan protein hewani, perempuan Sunda banyak yang mengalami anemia (Angraini, 2013).

Pantang makan ini juga saat melahirkan khususnya yang menjalani operasi Caesar. Berdasarkan pengalaman penulis, pasca menjalani operasi dilarang makan telur dan ikan karena dapat menyebabkan luka operasi gatal sehingga akan memakan waktu yang lama untuk sembuh.

Hanya diperbolehkan makan tahu tempe, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Padahal protein justru akan mempercepat kesembuhan luka pasca operasi. Juga memenuhi gizi ibu menyusui dan kualitas ASI menjadi baik apalagi mengingat masa pemberian ASI eksklusif.

Pantang makanan tertentu saat hamil akan berpengaruh terhadap gizi ibu hamil. Status gizi ibu hamil sangat memengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Gangguan pertumbuhan dalam kandungan dapat menyebabkan berat lahir rendah (WHO, 2014). Ada hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan *stunting*. Balita yang mempunyai berat lahir rendah, memiliki risiko menjadi *stunting* sebesar 1,7 kali dibandingkan dengan balita yang mempunyai berat lahir normal (Fitri, 2012). Artinya ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan anak yang kurang gizi pula yang berpotensi mengalami *stunting*.

3. Kebiasaan Masyarakat Tidak Melakukan IMD dan Memberikan ASI Eksklusif

Di samping kekurangan gizi saat hamil sebagian masyarakat masih banyak yang belum terbiasa untuk memberikan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). IMD tidak diberikan karena tidak adanya pengetahuan akan pentingnya IMD. Bahkan air susu pertama yang berwarna kuning dibuang karena dianggap susu basi. Padahal ASI

pertama yang keluar setelah melahirkan yang disebut dengan kolostrum akan memperkuat imunitas tubuh bayi. Pada usia ini, bayi masih rentan terkena penyakit, sehingga zat pembentuk kekebalan tubuh dari ASI sangat diperlukan.

Selanjutnya yang sangat menentukan gizi bayi di 1000 hari pertama kehidupan adalah pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif menjadi penting dilakukan karena besarnya resiko jika tidak diberikan. Sebagaimana diungkapkan (Fikadu *et al.*, 2014) bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama beresiko tinggi mengalami *stunting*. Sebagai mana hasil penelitian juga oleh Nugroho (2016) menunjukkan faktor yang mempengaruhi *stunting* pada anak umur 1-3 tahun di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung adalah pemberian ASI tidak eksklusif.

Dalam realitasnya ASI eksklusif seringkali tidak diberikan karena kurangnya pengetahuan akan manfaat ASI eksklusif. Di samping itu juga karena berbagai pertimbangan yang terkait dengan peran perempuan dalam keluarga. Saat ini perempuan mempunyai beban ganda. Perempuan dituntut untuk bertanggung jawab atas anak, suami dan rumah termasuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah banyak dilakukan di luar rumah sehingga bayi yang dilahirkan tidak memungkinkan dibawa bekerja setelah menjalani cuti melahirkan. Untuk mensiasati peran

ganda itu maka banyak dari ibu menyusui telah mencampur ASI dengan susu formula semenjak bayi dilahirkan dengan keyakinan bayi tidak rewel saat ditinggal bekerja.

Untungnya saat ini sudah ada pengetahuan akan memompa ASI. ASI bisa disimpan di lemari es yang bisa diberikan saat bayi tidak bersamanya. Hanya saja terkadang pencampuran susu dianjurkan oleh tenaga kesehatan di tempat melahirkan seperti klinik, bidan atau rumah sakit. Ada promosi terselubung dengan merk susu formula tertentu. Realitas ini dulu sudah menjadi rahasia umum, entahlah kalau sekarang, apakah masih ditemui atau tidak. Semoga tidak ada lagi.

Di samping itu adanya keyakinan kalau anak sering menangis tandanya anak tidak kenyang dengan ASI sehingga diberikan pisang, jeruk dan madu pada bayi diusia enam bulan ke bawah. Juga promosi makanan pendamping ASI yang dijual bebas dipasaran untuk anak umur 4 bulan ke atas. Sehingga umur 4 bulan anak sudah diberikan makanan tambahan. Hal ini diperkuat lagi dengan persepsi yang salah di masyarakat bahwa makanan pendamping ASI adalah makanan yang dijual di pasaran. Padahal makanan pendamping ASI yang dibuat di rumah lebih sehat dan higienis, bebas dari pengawet, pewarna dan pemanis buatan.

ASI eksklusif juga tidak dapat diberikan karena tidak keluarnya puting susu ibu. Ibu yang berusia muda organ

reproduksinya belum berkembang dengan baik. Ditambah dengan belum adanya pengetahuan tentang perlunya membersihkan puting susu dengan kapas yang dibasahi air hangat semenjak hamil. Sehingga ketika melahirkan puting susu ibu sudah keluar dan bisa dihisap oleh bayi. Ada juga sebagian pandangan ibu-ibu muda jika menyusui anak maka payudaranya akan kendor dan tidak menarik lagi.

Padahal pernikahan anak semakin parah saat pandemi covid 19 sebagaimana yang dikemukakan oleh KemenPPN/Bappenas, bahwa sekitar 400 - 500 anak perempuan usia 10 - 17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Mengapa hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang terus menurun ini telah memaksa orang tua membiarkan anaknya menikah sehingga anak tak lagi menjadi beban keluarga. Sebagaimana ditemukan bahwa terdapat 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada Januari hingga Juni 2020, yang 97 persennya dikabulkan (*Pernikahan Dini Melonjak ...*, 16 September 2020). Angka ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu saat pandemi (*Gawat! Perkawinan Anak ...*, 30 November 2020). Dispensasi perkawinan dikarenakan anak masih berusia di bawah 18 tahun.

Pernikahan dini terjadi juga karena pendidikan seks belum masuk dalam kurikulum yang harus diberikan di sekolah. Remaja menjadi buta akan resiko perbuatan yang dilakukan. Banyak dari remaja yang terjebak dengan pergaulan bebas. Hamil saat masih dijenjang pendidikan. Umumnya remaja putri yang hamil akan dinikahkan oleh orang tua untuk menutupi malu pada masyarakat. Padahal di usianya yang masih belia mempunyai kecendrungan hamil yang beresiko. Di samping itu tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan ikut andil dalam persoalan *stunting* pada anak.

Kekurangan asupan gizi ibu hamil akan semakin parah apabila sebelum menikah sudah mengalami gizi buruk. Berdasarkan data yang ada terdapat 46,6 persen remaja putri di Indonesia pada usia 15 - 19 tahun berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK). Dan 24,2 persen wanita usia subur 15 - 49 tahun hamil dengan resiko KEK dan Anemia 37.1. KEK adalah kondisi ketika seseorang mengalami kekurangan gizi yang berlangsung menahun (kronis) sehingga menimbulkan gangguan kesehatan (Prawita *et al.*, 2017).

Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun memiliki risiko KEK yang lebih tinggi. Ibu hamil yang umumnya terlalu muda dapat meningkatkan risiko KEK secara bermakna (Mulyaningrum, 2009). KEK ternyata berdampak pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana diungkapkan

Sandalayuk bahwa KEK berisiko tinggi untuk melahirkan anak yang juga akan mengalami KEK di kemudian hari (Paramata & Sandalayuk, 2019). Artinya saat remaja kekurangan gizi ketika hamil akan mengalami gizi kronis sehingga besar kemungkinan anak yang dilahirkan juga mengalami gizi kronis.

4. Budaya Patriarki Mempengaruhi ASI dan Pola Asuh Anak

Kuantitas dan kualitas ASI ditentukan oleh tingkat kesehatan ibu. Kesehatannya dipengaruhi oleh tanggung jawabnya dalam keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang masih kental budaya patriarki yang menempatkan menempatkan laki-laki/suami sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya menyebabkan beban ganda pada perempuan/ibu. Beban ganda merupakan salah satu ketidakadilan gender yang diderita perempuan selain marginalisasi, subordinasi, *stereotype* dan kekerasan (Fakih, 2013, p. 21).

Penggambaran panjangnya pekerjaan ibu dalam rumah sering diungkapkan pekerjaannya telah dimulai sebelum matahari terbit sampai mata suami terpejam. Demikian panjangnya jam kerja ibu. Semenjak pagi menyiapkan sarapan untuk keluarga, mencuci, menyapu, membersihkan rumah, merawat anak bahkan sampai mengurus dan melayani suami. Apalagi saat sekarang perempuan juga banyak yang bekerja di publik. Dapat

dibayangkan betapa beratnya tanggung jawab perempuan. Pekerjaan publik dan domestik tanggungjawabnya.

Panjangnya jam kerja dan beratnya tanggungjawab ibu/perempuan menyebabkan kelelahan fisik dan menimbulkan tekanan secara psikologis. Kondisi fisik dan psikologis inilah yang akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Apalagi kalau perempuan hamil dan melahirkan. Padahal diketahui kesehatan fisik dan psikis anak yang ada dalam kandungan dan anak yang disusunya sangat tergantung pada kesehatan ibunya. Akan lebih parah bila suami secara ekonomi pas-pasan dan tidak peduli dengan pekerjaan domestik dan merawat anak. Sehingga tak jarang ada yang ASInya sedikit bahkan tidak keluar sama sekali. Pada akhirnya anak terpaksa diberi susu formula. Anak juga akan kurang mendapatkan stimulasi/rangsangan yang penuh kasih sayang. Karena ibu sibuk dengan aktivitasnya mengurus rumah.

Padahal secara teori stimulasi penting bagi anak semenjak ia dalam kandungan. Sebagaimana menurut Depkes RI (2005), dalam Khasanah *et al.* (2013), stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir (bahkan sebaiknya sejak janin dalam kandungan) dilakukan setiap hari, untuk merangsang sistem indra (pendengaran,

penglihatan, paraba, pencium dan pengecap). Begitu pentinga stimulasi sehingga perlu dilakukan bukan hanya oleh ibu akn tetapi juga ayah sehingga perlu kerjasama dalam mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah.

5. Kebiasaan Kurang Menjaga Kebersihan Diri dan Lingkungan

Infeksi penyakit juga dapat menyebabkan anak *stunting* (Aridiyah, 2015). faktor yang mempengaruhi terjadi-nya *stunting* pada anak disamping ASI tidak eksklusif juga riwayat penyak infeksi. Terdapat hubungan bermakna antara *stunting* dengan angka kejadian diare pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Tikala Manado (Taliwongso *et al.*, 2015. Diare dan penyakit infeksi banyak dipengaruhi oleh kurangnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan rumah. Kebiasaan mencuci tangan tidak menggunakan sabun, buang air besar tidak di jamban berkontribusi terhadap penyakit diare dan infeksi yang diderita anak.

Kebiasaan mencuci tangan tidak menggunakan sabun dapat dilihat saat acara slametan baik dalam siklus kehidupan, mendirikan rumah, pesta pernikahan maupun acara adat lainnya. Seperti dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan makan *bajamba*. Dalam sebuah acara ketika akan makan maka beberapa orang kondisikan untuk makan di piring yang besar. Begitu juga saat makan sehari-hari baik di

rumah maupun di rumah makan. Hanya disediakan cuci tangan di kobokan tanpa menggunakan sabun dan kobokan gunakan oleh banyak orang. Dapat dibayangkan bagaimana kotornya air kobokan itu. Begitu-
tulah kondisi tangan saat akan makan.

Mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir juga belum terbiasa ketika akan memberikan makanan anak. Apalagi saat makan kemudian anak buang air besar maka biasanya ibu akan membersihkan kotoran anak dan melanjutkan makan atau aktifitas lainnya. Akan lebih ironis bagi keluarga yang sulit mengakses sumber air bersih. Bisanya di masyarakat pedesaan banyak yang sumber air bersihnya di sumur yang ada di pinggir sawah atau di sungai. Penggunaan air sangat dihemat dan hanya digunakan untuk memasak dan hanya sedikit yang digunakan untuk mencuci tangan. Dan kebiasaaan untuk buang air di sungai “kalau tidak terendam tidak keluar.” Padahal sungai digunakan untuk mencuci pakaian, peralatan masak dan mandi. Masih lumayan kalau sungainya besar tak jarang air sungainya kecil dan keruh. Bagaimana kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui serta kesehatan anak.

C. PENUTUP

Kebiasaan baik yang mendukung untuk mencegah terjadiya *stunting* perlu diadopsi untuk ditumbuh dan dikembangkan yang dapat membentuk kesadaran berperilaku sehat. Sehat dalam pengertian

merawat kebersihan, baik diri maupun lingkungan, selain mampu menentukan makanan sehat, juga makanan yang mudah didapat dari sekitarnya.

Pendekatan yang memposisikan diri sebagai pengamat dalam upaya mencegah terjadinya *stunting* dapat mendorong ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dimana cara pencegahan *stunting* yang diprogram pemerintah belum mempertimbangkan potensi budaya dan lingkungan setempat. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui penemuan-penemuan baru yang bersumber dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang dapat diperagakan oleh mereka secara bertanggung jawab.

Penemuan itu baru dapat dilakukan dengan FGD/kelompok diskusi terkecil dimana hasil diskusi dapat diterapkan di komunitas. Seperti SDM kesejahteraan sosial dapat mengadakan pertemuan bulanan yang diadakan oleh Pendamping PKH. Sesi FGD tentang pencegahan *stunting* menjadi rangkaian kegiatan pemberian materi FDS. Tentu saja pelaksanaan FGD dalam kondisi pandemi covid 19 perlu memenuhi protokol kesehatan yang salah satunya membatasi jumlah yang ikut FGD. Tetapi di lain sisi dapat memberi dampak positif dimana interaksi dalam FGD lebih detail dan mendalam.

Dalam FGD itu dapat dikoreksi hal-hal yang tidak tepat dalam masyarakat dan diperkuat hal-hal yang baik untuk

memperkuat pencegahan *stunting*. Sehingga apa yang sudah menjadi standar medis dalam penanganan *stunting* dapat diterapkan sesuai dengan kondisi kehidupan mereka dan dilaksanakan dengan sadar tanpa merasa keberatan.

Budaya merupakan pondasi dalam berperilaku masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada budayanya dapat merumuskan dan mempraktikkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pola hidup sehat yang dapat mencegah dan menangani persoalan *stunting* yang dilakukan akan lebih efektif. Semoga dapat mencapai target penurunan angka *stunting* menjadi 14 persen di tahun 2024.

Referensi

- 30 Persen Anak Kelas Menengah Atas Juga Alami *Stunting* (3 Mei 2018). Diakses dari <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1032704-30-persen-anak-kelas-menengah-atas-juga-alami-stunting> (22 April 2021).
- Angraini, D. (2013). Pantangan Makan Ibu Hamil dan Pasca Melahirkan di Desa Bongkot Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Jurnal Biokultur*, Vol. II No. 2, 167-178.
- Aridiyah, F.O. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3 (1) Januari 2015, 163-170.

- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikadu, T., Assegid, S. & Dube, L. (2014). Factor associated with *stunting* among children age 24 to 59 months in Meskan District, Gurage Zone, South Ethiopia: A case-control study. *BMC Public Health*, 14 (800), 1-7.
- Fitri (2012). *Berat Badan Lahir sebagai Faktor Dominan Terjadinya Stunting pada Balita (12-59 bulan) di Sumatera (Analisis Data Riskesdas 2010)*. Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- Gawat! Perkawinan Anak Melejit Karena Pandemi Covid 19 (30 November 2020). Dikases dari <https://www.suara.com/health/2020/11/30/172126/gawat-perkawinan-anak-melejit-karena-pandemi-covid-19?page=all> (23 April 2021)
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara.
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
- Khasanah, U., Fitriyani, Khanifah, M. (2013). Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Stimulasi Perkembangan Janin. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK)* Vol V, No.II, September 2013
- Koentjaraningrat (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Djambata
- Mulyaningrum (2009). Hubungan Faktor Risiko Ibu Hamil dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Barru. *Media Gizi Pangan*, VII (1).
- Nugroho, A. (2016). Determinan Growth Failure (*Stunting*) Pada Anak Umur 1 s/d 3 Tahun (Studi Di Kecamatan Tanjung Barat Kota Bandar Lampung). *Jurnal Kesehatan*, Volume VII, Nomor 3, November 2016, 470-479.
- Nurbaiti, L., Adi, A.C., Devi, S.R., Harthana, T. (2014). Kebiasaan makan balita *stunting* pada masyarakat Suku Sasak: Tinjauan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 27, No. 2, 104-112. <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V27I22014.104-112>
- Nurlailis, S. (2020). *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
- Paramata, Y., & Sandalayuk, M. (2019). Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Health*, 2(1), 120. <https://doi.org/10.32662/gjph.v2i1.390>
- Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi (16 September 2020) Diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikaha>

- n-dini-melonjak-selama-pandemi (23 April 2021).
- Ramli, Agho, K. E., Inder, K. J., Bowe, S. J. Jacobs, J. & Dibley, M. J. (2009). Prevalence and risk factors for *stunting* and severe *stunting* among under-five in North Maluku Province of Indonesia. *BMC Pediatrics*, 9-64. doi:10.1186/1471-2431-9-64
- Rofi'ah, S. Z. (2017). Perilaku Kesehatan Ibu Hamil Dalam Pemilihan Makanan Di Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. In *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* (Vol. 6).
- Selain Pandemi Covid-19, Anak Indonesia Juga Menghadapi Stunting (11 Juli 2020). Diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/11/200400823/selain-pandemi-covid-19-anak-indonesia-juga-menghadapi-stunting?page=all> (23 April 2021).
- Sukandar, D. (2007a). Makanan Tabu di Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Jurnal GIZI DAN PANGAN*, Vol. 2 No. 2, 44-48.
- Sukandar, D. (2007b). Makanan Tabu di Jeneponto Sulawesi Selatan. *Jurnal GIZI DAN PANGAN*. Vol. 2 No. 1, 42-46.
- Sutaryo (2004). *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taliwongso, F., Ch. Manoppo, J.I, & Adrian, U. (2017). Hubungan Stunting dengan Angka Kejadian Diare pada Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Tikala Manado. *Jurnal e-Clinic*, 5 (2).
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- TNP2K (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Diakses dari <http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Ringkasan%20Stunting.pdf> 23 April 2021
- Turner, B.S. (2012). *Teori Sosial: Dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- WHO (2014). *Situation: Underweight In Children In Global Healthy Observatory*

Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Perempuan secara Daring dan Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional

Jose Segitya Hutabarat
SMP Dian Harapan Manado
E-mail: jose.hutabarat@sdh.or.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 memunculkan kekerasan perempuan secara daring harus segera ditangani sekarang. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang disaksikan selama krisis menyebar ke ruang *online*, hal ini mengubah jalur kehidupan internet menjadi ruang yang tidak bersahabat. Berbagai bentuk ancaman dan kekerasan digital hingga pelecehan seksual dan berbagi gambar intim tanpa izin serta pelecehan *online* yang menimbulkan kerugian mental dan fisik yang menghancurkan bagi perempuan dan anak perempuan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe dan strategi studi kasus deskriptif dan di analisis dari tinjauan dokumen resmi. Serangkaian rekomendasi untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara daring dimulai dari pemerintah yang memastikan sistem hukum dan penegakan hukum perlu disiapkan bagi perempuan untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, hingga perusahaan teknologi yang menerapkan desain produk dan layanan berbasis gender. Memastikan bahwa pemberian layanan bagi korban terintegrasi di seluruh bidang yang relevan dan kebutuhan serta keamanan bagi para korban dipertimbangkan saat bergerak menuju mode komunikasi yang lebih berbasis elektronik selama krisis Covid-19.

Kata kunci: Kekerasan perempuan, pelecehan daring, dan ketahanan nasional.

Abstract

The Covid-19 pandemic, which led to women's violence online, must be addressed now. The increase in domestic violence against women witnessed during the crisis spread to the online space, turning the lifeline of the internet into a hostile space. Various forms of threats and digital violence to sexual harassment and sharing of intimate images without permission and online harassment cause devastating mental and physical harm to women and girls. This paper uses a qualitative approach, with descriptive case study types and strategies and is analyzed from official document reviews. A series of recommendations for dealing with violence against women online starts from the government ensuring that the legal system and law enforcement needs to be prepared for women to take legal action against perpetrators, to technology companies that implement gender-based product and service designs. Ensure that service delivery for victims is integrated in all relevant areas and that the needs and security of victims are taken into account when moving towards a more electronic-based mode of communication during the Covid-19 crisis.

Keywords: *Women's violence, online harassment, and national resilience*

A. PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi sosial dari pandemi Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat mendorong kekerasan terhadap perempuan. Ketidakmampuan untuk keluar rumah, kehilangan interaksi sosial, kehadiran sepanjang hari anak-anak penutupan sekolah, ketegangan yang melekat kemungkinan besar merupakan sebuah alasan untuk membenarkan kekerasan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang sering dilakukan oleh laki-laki, sangat mengakar dalam maskulinitas patriarki yang mengarah pada kekuasaan dan kendali laki-laki atas perempuan. Pelaku kekerasan mungkin ingin menegaskan kembali kontrol mereka dan mengekspresikan frustrasi mereka yang disebabkan oleh *lockdown* melalui peningkatan adegan kekerasan.

Sekarang masyarakat menjalani kehidupan virtual dan sering mengalami kekerasan luring telah meluas ke daring, yang memudahkan orang untuk melakukan kekerasan tanpa konsekuensi. Perempuan menjadi sasaran utama kekerasan secara daring, pelecehan daring dapat mencakup penindasan daring, penguntitan dunia maya, pencemaran nama baik dan perkataan yang mendorong kebencian, penghinaan di depan umum, serta pencurian dan peretasan identitas. Ketika perempuan menjadi targetnya, pelecehan daring dengan cepat berubah menjadi

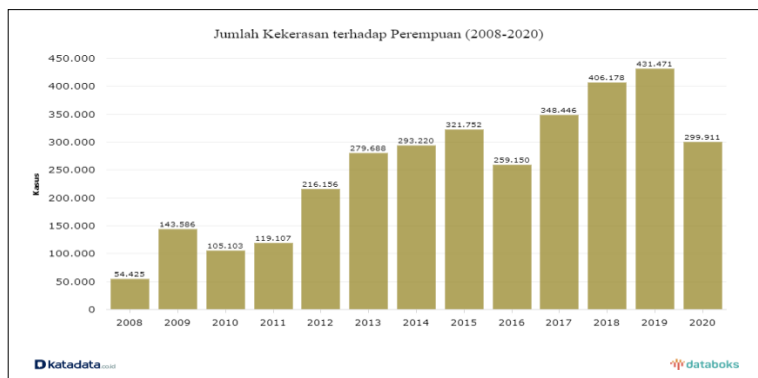
kebencian atau ancaman seksual. Kekerasan berbasis gender *online* adalah ekspresi terbuka dari ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan masalah universal. Kekerasan akan mengakibatkan dampak parah pada korban, keluarga, dan ikatan masyarakat, terutama pada saat pandemi Covid-19. Hal ini diperparah karena stres akibat ekonomi dan sosial ditambah dengan gerakan terbatas oleh langkah-langkah isolasi dan sosial, sehingga kekerasan berbasis gender meningkat secara eksponensial selama Covid-19. Kekerasan terhadap perempuan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan daring yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan terjadi dalam konteks yang luas menyebarkan diskriminasi berbasis gender yang sistemik. Sedangkan secara global masih kekurangan definisi yang komprehensif dan data kekerasan daring yang difasilitasi TIK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan ditargetkan secara tidak proporsional dan menderita serius sebagai konsekuensi akibat perempuan memiliki akses ke internet. Mereka menghadapi kekerasan daring lebih sering dari pada laki-laki melalui suatu kontinum

dari berbagai bentuk, berulang dan saling terkait kekerasan berbasis gender. UN Women (2020b) melaporkan frekuensi perempuan menggunakan internet selama pandemi meningkat dan menimbulkan kesenjangan digital berbasis gender, saat tindakan kebijakan nasional untuk karantina wilayah telah meningkatkan penggunaan internet 50 persen sampai 70 persen, perempuan dan laki-laki beralih ke internet untuk bekerja, sekolah, dan kegiatan sosial. Selama periode ini, pengguna dengan keterbatasan keterampilan digital lebih berisiko mengalami kekerasan dunia maya. Namun, menariknya pembagian gender digital, perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami bentuk kekerasan.

Dalam konteks ini, kekerasan yang difasilitasi TIK telah menyebar di bawah bayang-bayang pandemi terhadap kekerasan perempuan. UN Women (2020a) juga melaporkan perempuan mengalami kekerasan daring berupa ancaman fisik, pelecehan seksual, menguntit, *zoom-bombing*, dan *sextrolling*. Kasus-kasus khusus telah didokumentasikan oleh media dan organisasi hak-hak perempuan dengan cara perempuan diminta membuat video porno dan ditampilkan saat perempuan berpartisipasi dalam acara sosial daring. Lebih lanjut UN Women (2020a) ancaman kekerasan dan konten seks yang berbahaya saat *zoombombing* selama panggilan video ditampilkan materi yang bermuatan rasial dan seksual eksplisit kepada peserta.



Gambar 1. Jumlah kekerasan terhadap perempuan (2008-2020)
Sumber: Jayani (2021a)

Komnas Perempuan dalam (Jayani, 2021a) mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang

dilaporkan sebanyak 299.911 kasus pada 2020, menurun 31,5 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai

431.471 kasus (lihat Gambar 1). Secara rinci, ada 291.677 kasus kekerasan yang berasal dari Pengadilan Agama. Sementara, 8.234 kasus berasal dari data kuesioner lembaga penyedia layanan. Merujuk hasil survei KTP di masa pandemi virus corona Covid-19, penurunan laporan terjadi karena korban dekat dengan pelaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Korban juga cenderung mengadukan kasus kekerasan pada keluarga atau diam. Ada pula faktor literasi teknologi dan model layanan pengaduan yang belum siap pada masa pandemi Covid-19, layanan pengaduan ini berkaitan dengan adaptasi menjadi sistem daring.

Dalam konteks ini, kasus kekerasan daring menggunakan TIK terhadap perempuan dan anak perempuan cenderung meningkat bahkan setelah fase darurat karena melemahkan penegakan dan persentase individu yang menggunakan internet. Bentuk kekerasan dalam jaringan terhadap perempuan dan anak perempuan berimplikasi pada psikologis, hubungan sosial, dan kesehatan reproduksi. Tidak hanya secara daring, kekerasan fisik dan seksual luring pun sering terjadi. Kekerasan daring dilakukan dalam kontinum antara daring dan luring, dan sulit untuk membedakan konsekuensi dari tindakan yang dimulai dalam lingkungan digital dari realitas luring, dan sebaliknya. Penelitian ini

juga mengungkapkan beberapa konsekuensi tentang dampak daring pengalaman perempuan meningkatkan kecemasan yang lebih tinggi, gangguan stres, depresi, trauma, serangan panik, kehilangan rasa percaya diri dan rasa tidak berdaya dalam kemampuan mereka. Perasaan ini mungkin saja ditingkatkan dalam konteks karantina dan isolasi yang terbatas pada rumah tangga mereka termasuk masalah ekonomi, hubungan sosial dan tekanan politik sehingga meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu analisis mengenai kondisi yang dialami perempuan di masa pandemi Covid-19 yang mengalami kekerasan secara terkini di Indonesia. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, selain itu kajian pustaka juga melalui jurnal-jurnal penelitian nasional dan internasional dan laporan atau *brief* dari *United Nations Women* entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan dari sumber berita *daring* dan cetak resmi.

1. Kekerasan Perempuan secara Daring

Perempuan cenderung membatasi akses mereka secara daring sebagai akibat

dari kekerasan secara daring. Negara yang terkena Covid-19 menyediakan beragam layanan daring, termasuk sekolah kelas, bahan makanan, pasar/perdagangan elektronik, lingkungan kesehatan dan dukungan hukum dan layanan penting. Meningkatkan kekerasan daring mengubah penggunaan internet oleh perempuan dan akses ke layanan *daring*. Di sisi lain, keamanan alat digital dan internet, terjangkau dan inklusif dalam skala besar berpotensi meningkatkan partisipasi perempuan secara daring untuk mengurangi jenis kesenjangan digital. Suara dan partisipasi perempuan sebagai warga aktif digital sering dikecam dan dilecehkan dalam media *daring* selama Covid-19.

Partisipasi inklusif dari perempuan, terutama dari mereka yang biasanya tertinggal, sangat penting untuk menanggapi, memitigasi demi pemulihan dari krisis. Namun, bukti menunjukkan bahwa perempuan sering kali jadi target diskriminasi *daring* dan mendapatkan ujaran kebencian. Akibatnya, kecenderungan menarik diri dari perdebatan dan diskusi di media sosial. Selama pandemi, lebih banyak perempuan menggunakan internet dan media sosial untuk mengadvokasi hak-hak mereka dalam tautan terbuka. Risiko lebih tinggi ditargetkan telah terjadi pembaharuan minat menggunakan internet dan media sosial untuk terhubung dengan komunitas lokal, upaya memberikan kesempatan terbaik untuk

dukungan terus-menerus kohesi sosial, ketika akses ke ruang publik terbatas.

2. Ketahanan Nasional dalam Perspektif Perempuan

Merebaknya Covid-19 dan ekstrimisme agama semakin meningkatkan potensi konflik. Kondisi ini mempengaruhi kapasitas membangun dan mencapai cita-cita nasional. Dalam setiap kondisi konflik tersebut, perempuan menjadi korban secara langsung maupun tidak langsung dan posisi ini tidak lepas dari konstruksi gender di dalam masyarakatnya. Karenanya, penting membangun kesadaran akan gender untuk memastikan bahwa stereotip gender tidak terus dilestarikan dan hak-hak perempuan tidak diabaikan. Masyarakat harus memiliki perspektif keadilan gender, membangun pengetahuan yang berbasiskan kekhasan pengalaman perempuan, khususnya dalam konteks konflik, perdamaian, dan ketahanan nasional (*Membangun perdamaian dunia ...*, 30 November 2020).

Menurut United Nations Development Programme (2011), perempuan secara konsisten diidentifikasi sebagai salah satu kelompok paling rentan terhadap bahaya marjinalisasi sosial, kurangnya mobilitas dan pengucilan dari pengambilan keputusan. Proses tersebut diperparah dengan kerentanan yang mereka alami. Namun, pemerintah perlu

mengembangkan upaya yang dapat memberdayakan perempuan sampai akar rumput untuk mengubah kondisi kehidupan keluarga dan komunitas mereka dan untuk membalikkan kerentanan ini. Dalam pembuatan kebijakan, misalkan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan kemiskinan. Perempuan tidak dapat dipisahkan terkait membangun ketahanan nasional dengan memajukan prioritas pembangunan. Mengeksplorasi hubungan antara ketidaksetaraan berbasis gender didukung oleh serangkaian menunjukkan kepemimpinan perempuan dalam mengamankan sumber daya untuk mengatasi masalah pembangunan yang paling mendesak dari komunitas mereka. Memberdayakan perempuan untuk menjadipemimpin dan penggerak proses pembangunan yang akan membantu mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kerentanan perempuan.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020) persoalan kekerasan juga memiliki keterkaitan dengan persoalan ketahanan nasional. Hal ini bisa dipahami bila melihat ketahanan nasional sebagai kemampuan merespons, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari ancaman pada martabat kemanusiaan

perempuan di Indonesia yang seharusnya dapat hidup dengan rasa aman dan damai. Oleh karenanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara meluas merupakan persoalan yang terkait dengan aspek pancagatra ketahanan nasional yaitu aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek pertahanan keamanan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman besar bagi kemajuan kesetaraan gender. Pelu memastikan ruang digital *online* adalah tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Teknologi digital menjadi satu cara bagi perempuan untuk diserang, ditekan, dan dipinggirkan daripada menjadi platform untuk bersuara, meraih peluang dan melakukan perubahan yang positif bisa terjadi. Itulah mengapa sangat penting bagi perusahaan teknologi dan pemerintah untuk bekerja sama dengan aktivis perempuan dan komunitas teknologi sipil yang lebih luas untuk mengatasi kekerasan secara daring dan membuat web aman serta memberdayakan semua orang. Kekerasan perempuan secara daring ada dalam konteks yang mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Itu sama merusaknya dengan kekerasan *offline*.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Rukin (2019)

penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel (Arikunto, 2006). Tipe dan strategi yang digunakan studi kasus untuk memahami suatu persoalan mengenai kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik. “Penelitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, holistik dan sistematis tentang orang. Metode dan teknik menggunakan banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf 2017).” Dalam konteks penelitian ini kasus yang diteliti kelompok perempuan dengan klasifikasi studi kasus deskriptif.

Desain penelitian kualitatif bersifat umum fleksibel dan terbuka. Data dianalisis secara deskriptif dari sumber dokumen yang dikaji pada saat penelitian dilakukan. Menurut Moleong (2018) penggunaan dokumen membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki yaitu dokumen resmi eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita

yang disiarkan kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah fenomena yang akan diteliti. Menganalisis dokumen tersebut secara sistemik dengan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Menampilkan data kuantitatif yang berbobot bersama analisis kualitatif.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak bentuk pelecehan *online* telah meroket selama krisis Covid-19 karena kehidupan telah bergeser secara daring dan orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di perangkat digital. Alhasil menempatkan perempuan diposisi yang lebih rentan. Misalnya, ada lonjakan dalam berbagi gambar tanpa persetujuan yang dirancang untuk mengancam, mempermalukan, dan mengontrol perempuan.

Distribusi atau ancaman berbagi gambar intim non-konsensual juga terjadi sebagian besar dalam konteks kekerasan pasangan intim. Pelecehan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesejahteraan mental para korban karena mereka sering dibiarkan sendiri dengan pengalaman mereka, sebuah pengalaman yang dinormalisasi dan tidak terlihat di media sosial dan di masyarakat secara umum, mendorong korban untuk diam dan malu, mengekspos mereka kepada pelakunya, dan terkadang membuat mere-

ka menyakiti diri sendiri, depresi, dan bunuh diri.

1. Tren dan Dampak Kekerasan Secara Daring

Pandemi Covid-19 berdampak pada akses perempuan ke berbagai layanan penting seperti sosial, kesehatan dan layanan hukum. Tantangan tersebut antara lain: kesadaran terbatas akan layanan tersebut dan ketersediaan akses ke teknologi, serta langkah-langkah tertentu untuk mengekang pandemi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tantangan untuk membuat platform lebih aman telah diperburuk karena moderator media sosial membuat moderasi konten lebih bergantung pada alat kecerdasan buatan yang tidak sempurna. Seiring waktu, perusahaan teknologi telah mengembangkan beberapa solusi produk seperti alur pelaporan yang lebih baik untuk pelecehan. Tetapi jauh lebih banyak yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman pelecehan perempuan dan anak perempuan terutama pada saat-saat seperti kekerasan daring terjadi.

Perempuan memiliki informasi terbatas dan kesadaran tentang layanan yang tersedia. Disebabkan oleh gangguan layanan umum dan ketidakteraturan penyediaan layanan. Di sisi lain liputan media sangat terfokus tentang pandemi, dengan penyebaran di berbagai wilayah. Alih-alih perempuan mengalami keke-

rasan dan layanan untuk menjangkau perempuan dibatasi oleh kebijakan jaga jarak fisik, atau kurangnya efektivitas saluran komunikasi. Kebijakan untuk mengatasi pandemi, yaitu dengan jaga jarak fisik dan instruksi agar tetap berada di dalam rumah, ternyata telah mengganggu ketersediaan dan aksesibilitas kepada layanan bagi korban kekerasan.

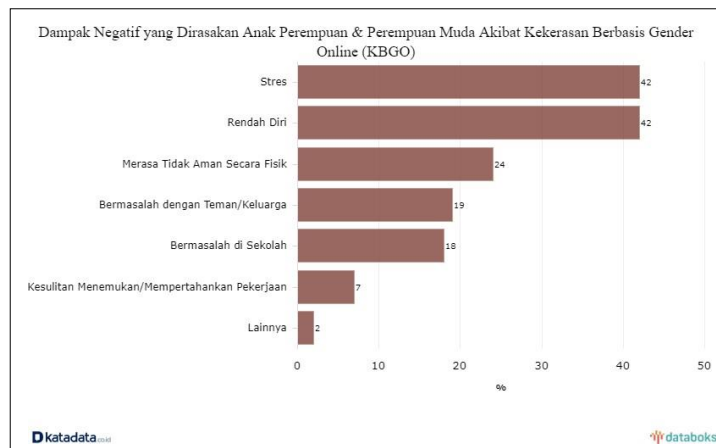
Korban kekerasan perempuan kesulitan dalam mengakses tempat penampungan, mencari saluran bantuan layanan psiko-sosial yang dihadapi imbas penutupan operasional serta kurang kesiapan untuk merespons pandemi. Masyarakat diwajibkan mengisolasi diri atau memberikan bukti medis sebelum dirawat di tempat penampungan pasien Covid-19. Padahal layanan tertentu tersedia dari jarak jauh yang dapat diakses ke layanan daring karena keterbatasan kuota/jaringan internet.

2. Dampak dan Pelaku Kekerasan Daring terhadap Perempuan

Dalam laporan Databoks Indonesia Tahun 2020 dalam (Jayani, 2021) terhadap Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dialami anak perempuan dan perempuan muda memiliki dampak negatif terhadap kehidupannya sehari-hari. *Riset Plan International* menunjukkan, sebanyak 42 persen korban mengalami gangguan mental atau stres. Selain itu, korban juga mengalami rendah

diri (42%) dan merasa tidak aman secara fisik (24%). Perhatikan Gambar 2. Riset yang dilakukan melibatkan 14 ribu anak

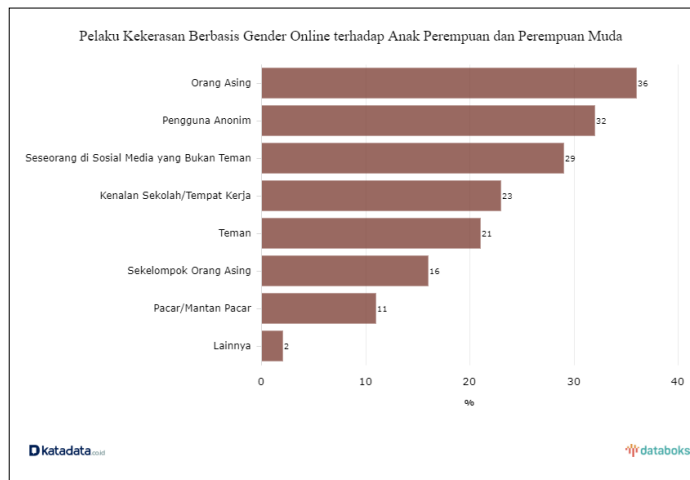
perempuan di 31 negara dunia. Sebanyak 500 anak dan perempuan muda Indonesia terlibat dalam riset tersebut.



Gambar 2. Dampak negatif akibat kekerasan berbasis gender online (KBGO)
Sumber: Jayani (2021b)

Selanjutnya dalam (Jayani, 2021b) dari keseluruhan responden, mayoritas mengaku tidak mengenal pelaku KBGO. Rinciannya, 36 persen adalah orang asing, 32 persen pengguna tanpa identitas (anonim), 29 persen seseorang di media sosial yang bukan teman, dan 16 persen sekelompok orang asing. Namun, bukan berarti orang terdekat tidak berpotensi menjadi pelaku. Sebanyak 23 persen pelaku merupakan kenalan di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, sebanyak 21 persen merupakan teman dan 11 persen pacar/mantan pacar. Lihat Gambar 3.

Data yang tersedia, dari laporan media semuanya mengarah pada peningkatan kerentanan dan risiko faktor kekerasan bagi perempuan dan anak perempuan selama pandemi. Kasus-kasus kemungkinan besar merupakan perkiraan yang diremehkan dari tingkat besarnya masalah, karena pandemi dan keadaannya membuat lebih sulit bagi perempuan untuk membuat laporan atau mencari bantuan. Dampak pandemi pada keluarga dan pendapatan perempuan meningkatkan risiko yang berujung menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi.



Gambar 3 Pelaku KGBO terhadap anak perempuan dan perempuan muda
Sumber: Jayani (2021b)

Krisis atau tanggap darurat membutuhkan upaya terkoordinasi dan terpadu oleh semua tokoh yang relevan. Lembaga pemerintah perlu mengoordinasikan tanggapan untuk mendukung korban kekerasan. Membuat mekanisme untuk mendukung perempuan tentang informasi bagaimana melaporkan kasus kekerasan dan cara mengakses layanan melalui telepon atau situs web resmi. Melakukan penilaian cepat untuk memahami kebutuhan perempuan, dengan pemangku kepentingan untuk memahami dan menialai kebutuhan selama krisis (UN Women, 2020a). Organisasi perempuan bekerjasama dengan mitra pembangunan untuk memastikan sosio-ekonomi dalam lensa gender di intervensi

upaya mengatasi peningkatan risiko kekerasan bagi perempuan.

Dibutuhkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan secara daring adalah masalah besar. Ini adalah kekerasan nyata dengan dampak nyata, dan terkadang berpindah dari daring ke luring. Perlu keamanan digital untuk melindungi identitas seseorang secara daring. Keamanan digital gender mencakup keterampilan perempuan dan anak perempuan untuk melindungi diri mereka sendiri, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan saat *online*. Perempuan dan anak perempuan harus tahu bahwa mereka adalah bagian dari media sosial dan itu adalah hak mereka untuk *online*. Upaya membantu agar perempuan aman dalam aplikasi daring seperti

Instagram yang baru-baru ini menambahkan alat anti-intimidasi, membatasi komentar yang tersedia untuk semua orang.

F. PENUTUP

Pada dasarnya, semua respons kebijakan terhadap krisis harus menanamkan lensa gender dan memperhitungkan kebutuhan unik perempuan, tanggung jawab dan perspektif. Sangat penting untuk mengatasi peningkatan kekerasan daring menggunakan perangkat TIK terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Diperlukan tindakan berbasis bukti hingga upaya bersama dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil. Tanggapan dan rencana aksi yang ditujukan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah perlu memperkuat protokol hukum yang terspesialisasi, jelas, dan efisien oleh penegak hukum dalam menangani kekerasan terhadap perempuan secara daring selama pandemi Covid-19.

Terus berinvestasi pada upaya dalam menangani kekerasan secara daring dengan pendekatan hak asasi manusia dan gender. Memberi informasi kepada pengguna internet tentang protokol, tempat melaporkan kasus kekerasan secara daring yang, dengan cara mengakses layanan penting secara daring selama pandemi Covid-19. Memberi arahan untuk menangani eksploitasi seksual bagi

anak perempuan secara daring dan pornografi anak. Memberikan contoh praktik baik yang menjanjikan secara efektif dalam menangani, memfasilitasi dengan teknologi untuk menginformasikan kepada berbagai pemangku kepentingan (perempuan di akar rumput, organisasi perempuan, pemerintah, penyedia teknologi dan pengembang).

Secara aktif melibatkan organisasi hak-hak perempuan untuk mengembangkan panduan dan praktik yang baik tentang keamanan dan inklusif TIK untuk perempuan. Menjaga dan memperluas saluran bantuan khusus untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang telah menjadi sasaran kekerasan berbasis gender daring dan luring selama pandemi Covid-19. Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pembela perempuan, pendidik, dan pengguna internet untuk mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan yang difasilitasi secara daring dan oleh bentuk kekerasan berbasis TIK lainnya. Memberikan alat dan sumber daya tentang cara mengidentifikasi, mendokumentasikan dan melaporkan pelecehan daring dan bentuk lainnya. Menghasilkan materi komunikasi dalam format sederhana dan ramah pengguna yang menunjukkan bahaya dampak kekerasan terhadap kelompok perempuan dan anak perempuan bagi mereka yang berada di kehidupan politik.

Membagikan pemahaman dan pendekatan titik temu untuk komunitas yang mengalami berbagai bentuk penindasan dan pelecehan daring, sebagai bagian dari rangkaian kekerasan. Mempromosikan kepemimpinan perempuan adalah elemen fundamental yang diperlukan dalam mengurangi kerentanan perempuan terhadap akses tantangan ke depan dan dalam memastikan perdamaian bisa terlaksana dengan menghasilkan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan nasional. Mendalami ancaman yang dialami oleh perempuan, termasuk risiko spesifik yang mereka hadapi dalam bentuk ujaran kebencian rasial dan pelecehan seksual serta ancaman dan serangan yang berbasis gender dan rasial. Mendesain kebijakan di mana hak-hak perempuan bagi perusahaan teknologi bekerja sama untuk membangun kebijakan dan produk untuk menangani kekerasan berbasis gender *online*.

Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi VI)* (13th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Jayani, D.H. (2021a). *Hampir 300 Ribu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Terjadi pada 2020*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/12/hampir-300-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-terjadi-pada-2020> (21 April 2021).
- Jayani, D.H. (2021b). *Ragam Dampak Negatif Kekerasan Online terhadap Anak Perempuan*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/16/ragam-dampak-negatif-kekerasan-online-terhadap-anak-perempuan> (21 April 2021).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2020). *Menata langkah dalam ketidakpastian: Menguatkan gerak juang perempuan di masa pandemi Covid-19*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rukin (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia.
- Membangun perdamaian dunia dan ketahanan nasional dengan pengakuan kontribusi berarti dan pelibatan substantif perempuan*. Siaran Pers Komnas Perempuan dan Lemhannas (30 November 2020). Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-and-lemhannas-membangun-perdamaian-dunia-dan-ketahanan-nasional-dengan-pengakuan-kontribusi-berarti-dan-pelibatan-substantif-perempuan-30-november-2020> (21 April 2021).

UN Women (2020a). *Impact of covid-19 on violence against women and girls and service provision: UN Women rapid assessment and findings*. Diakses dari <https://data.unwomen.org/publications/impact-covid-19-violence-against-women-and-girls-and-service-provision-un-women-rapid> (21 April 2021).

UN Women (2020b). *Online and ICT-facilitated violence against women and girls during Covid-19*. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief>

-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19 (21 April 2021)

United Nations Development Programme (2011). *Leading resilient development: Grassroots women's priorities, practices and innovations*. Diakses dari <https://www.undp.org/publications/leading-resilient-development-grassroots-practices-innovations> (21 April 2021)

Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan* (4th ed.). Jakarta: Kencana.

**United Nations Against Poverty:
Addressing Rural-Urban Nexus in Social Protection**

Hino Samuel Jose¹, Huspidiatul Anwar Gemadiyah², & Nehemia Satya Kamandaka Soetedjo³

¹Department of International Relations, UPN Veteran Jakarta

²Department of International Relations, Universitas Brawijaya

³Department of Bioprocess Engineering, Universitas Brawijaya

E-mail: abrahamsamueljose@gmail.com

Abstract

Social protection is one of the key solutions to alleviate poverty and to increase the productivity of populations. However, the intertwined nexus of rural-urban development should be concerned when it comes to the problems' resolution. The United Nations agreed upon the SDGs and establish UNDP back in the 90s to alleviate poverty and achieving the set 5Ps. However, many systemic and structural challenges impact the people's livelihood about the social protection issues. Multilateral and national engagement should be more people-oriented and able to address the new challenges especially during the global recovery against the Covid-19 pandemic. This article discuss how the interchangeable notion of rural-urban development, urban bias, transmigration, multilateral cooperation, and other welfare concerns should be considered when resolving the challenges of social protection for the people.

Keywords: Development, social protection, poverty, urban, and rural.

Abstrak

Perlindungan sosial adalah salah satu solusi utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas populasi. Namun, keterkaitan dari pembangunan area rural dan urban harus diperhatikan dalam resolusi permasalahan tersebut. PBB telah menyetujui SDGs dan mendirikan UNDP pada tahun 90-an untuk mengatasi permasalahan kemiskinan global dan mencapai target 5P. Sayangnya, banyak permasalahan sistemik dan struktural yang muncul yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup rakyat banyak dalam isu perlindungan sosial. Partisipasi dan perhatian dari level multilateral dan nasional harus berorientasi pada rakyat dan harus mampu mengatasi permasalahan pemulihan ekonomi global dari Covid-19. Artikel ini membahas bagaimana gagasan yang saling berkaitan dalam nexus pembangunan area rural dan urban, urban bias, transmigrasi, kerjasama multilateral, dan berbagai permasalahan lainnya dibahas ketika menyelesaikan tantangan kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat.

Kata kunci: Pembangunan, perlindungan sosial, kemiskinan, urban, dan rural.

A. INTRODUCTION

Vic George defines poverty as a lack of material goods or services. This set of understanding consists of core necessities as well as a list of other necessities that change over time and place (Spicker, 2007). These particular needs are food, clothing, fuel, or shelter. In addition, Baratz and Grigsby associate poverty with inadequate economic resources and consumption (Spicker, 2007). More relatively, it also implies that poverty according to these experts is related to “welfare values including self-esteem, aspirations, and stigma and ‘deference’ values, including aspects of status and power. However, the aforementioned explanations are an interpretation of a socially constructed definition of poverty (Spicker, 2007).

On the other hand, the World Bank simply defines people that live in poverty are living under or equivalent to \$1.90 a day (*World Bank Group's Operational ...*, 25 Mei 2021). Additionally, International Labour Organization (ILO) also considers poverty must be one of the matters that should be eradicated as ILO defines a proper social protection system for people and families having security in the face of vulnerabilities and contingencies (Gracia et al., 2003). These matters had been inculcated by the international community through article 22 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 9 of the

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights in regards to social security. As ILO already defines that social protection as the set of public measure that society provides for its members to protect them against economic and social distress, it then includes the protection of various contingencies such as sickness, maternity, employment injury, unemployment, death, health care, and another form of insurance on the socio-economic aspect of their life (Gracia et al., 2003). However, with the current perilous situation and condition of uncertainty, the conflict that occurred, economic disparities, alongside the pandemic that struck the global economy, it is sure then the member states would need a major shift within the state to recover from such crises.

Firstly, we need to define what is rural. There are several methods to determine and define the rural area, it could be defined based on the purpose of their usage such as for empirical studies, policy measure, analytic tool, or spatial/ performance indicator (Pechrova, 2015, p. 197-204). According to OECD, rural areas could be identified by observing the density of population on a certain area, and determine that an area could be identified as rural if the population within the local units (administrative entities) is below 150 inhabitants per square km (OECD, 2011, p. 3). The European Union established another

criterion in determining rural areas, the EU defined rural areas as all areas outside urban clusters, “urban clusters” are clusters of contiguous grid cells of 1 square kilometer with a density of at least 300 inhabitants per square km and a minimum population of 5.000 (Eurostat, 2020).

There are also definitions based on the spatial characteristics such as driving time to the nearest city, landscape, and land cover or settlement structure of the municipality or according to prevailing economic activities (Pechrova, 2015, p. 197-204). Although there are no agreed definitions of rural areas, it could be concluded that an area could be determined as rural if it is not “urban” in nature. Each nation has its characteristics of the urban area, but most of the time, an urban area is classified by categorizing them based on population density, economic function, etc. A scholar argues that there is a need to differentiate the concept of “rural area” and the concept of “village”. The concept of the village is heavily emphasized on the homogeneity of the local community, while the concept of the rural area was distinguished based on certain characteristics or a set of characteristics as stated above. Although most scholars agree that rural areas should be defined based on certain characteristics or a set of characteristics, the characteristic itself differs and is up to interpretation from every independent state.

This section is meant to give a glimpse of how social protection systems, in general, came to be. Social protection was marginal to mainstream understandings of development up until the early 1990s. The World Bank even rejected programs on workers’ social protection in the 1980s, calling it economically harmful and socially unjust. However, the general paradigm on the idea of social protection systems shifted when the 90s rolled in, especially after the 1997 Asian economic crisis. A heightened awareness of many negative impacts of global poverty resulted in social protection being a preferred instrument of the Millennium Development Goals. In a paper written by (Merrien, 2013, p. 84), it is even said that the World Bank promoted social protection as a “key component of international poverty reduction strategies” or social risk management. In the 1990 World Development Report released by the World Bank, the organization legitimized social ‘safety net’ programs meant to protect people against two types of economic hindrances; the inability to resume work /earn and/or a reduction of the ability to do so during times of politic, economical, and environmental upheaval. As stated by (Gentilini, 2005, p. 139), these safety nets are mostly based on monetary transfers or the provision of food supplies. These programs were often coupled with initiatives to curb “the trap of dependency” by also providing additional measures such

as public work programs.

The year 2000 was arguably remembered for the adoption of the Millennium Development Goals (MDGs). With the MDGs adopted, social protection was no longer a minor debate in discussions regarding development within the international community. By this time, the major contributors to the topic were the World Bank, the UK's DfID, Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations, UNICEF, and the UNDP. The general tenor of discussion during those days was focused more on peaceful accommodation as opposed to confrontation. However, (Merrien, 2013, p. 88) further stated that both approaches were still discussed; one expressed in primary terms of instrumental efficiency championed by the World Bank, and another promoted by DfID, with more attention to social rights and advocacy. The 2000s saw a compromise reached between the formerly incompatible positions of "social risk management" and "transformative social protection" where social protection is no longer seen as an expenditure but as a means of strengthening social and human capital. Accordingly, it quickly became a key element of development policies. However, as can be seen, today, poverty is still rampant and existing systems are far from perfection.

B. ANALYSIS AND DISCUSSION

1. Rethinking Rural-Urban Development

and Economic Growth

Generally, the concept of rural-urban development is always been associated with the term of 'peri-urbanisation'. Peri-urbanisation itself has the definition of urbanizing the rural areas to embrace a more urban character both physically and socially (Webster, 2002). This kind of phenomenon is usually caused by the changes of rural population, agricultural economic changes, and the likelihood of being pressed by the demand to develop their rural areas to be more attractive and competitive in international economic competition (Woltjer, 2014). Periurbanisation itself tend to be happening in developing countries, especially in Asian cities where modernization has encouraged the rural population to embrace urban lifestyle (Hudalah, Winarso, & Woltjer, 2007, p. 9-11). To relate this narrative further to economic growth in combating poverty, a research by Nguyen et al (2018) concluded that urbanization does show a tangible correlation and relationship with positive economic growth, however the connected results seems to be non-linear and it may obstruct the growth projection after reaching a certain threshold (Nguyen & Nguyen, 2018). This finding is relevant with Chen et al. (2014) where it concluded that economic benefits catalyzation can be happening after a higher urbanization, however it may not reach an optimum expected benefits for the people's welfare. This will surely force

countries' to adjust their policy expectations and be more attentive towards the other factors like the transition of institutions, development of education and social care, and the reforms within the rural areas' governance (Chen, et al, 2014).

From the paragraph above, in relation with the multilateral engagement from the UN, it can be concluded that the UN and member states should work together in mapping out and identifying the underlying factors that may possible impede economic growth whilst maintaining a healthy pace of modernization. UN-Habitat through its publication in 2019 recommended that the member states should be acquiring the following guiding principles in developing their rural-urban areas, these principles are: (a) implementing a localized and local-based policy and governmental interventions; (b) encouraging a more integrated governance; (c) adopting a more spatial and functional system as the approach; (d) providing an inclusive financial climate and ecosystem; (e) balancing partnership between the public and private sectors; (f) caring for a more human rights-driven approach; (g) providing social protection; (h) sustainable for the environment; (i) engaging all actors to be participative; and (j) formulating the evidence-based and scientifically-proven policies and approaches (UN-Habitat, 2019). To support this, a research argued that the sustainability of rural-urban areas must be driven by a smart

and practical development reflecting from the SDGs and mapping out a critical criterion of the development should be carefully assessed to be coherent with the goals and policy clarity (Sheikhnejad & Yigitcanlar, 2020, p.20-21).

2. Rural-Urban Nexus on Social Protection and Development

The rural-urban nexus is one of the important controversies to be scrutinized. Social protection is intertwined with development, economy, social livelihood, human security, labor, and even the human rights spectrum. With social protection policies being influenced by a dynamic economic and political situation, decentralization of policies from the central to regional government becoming more important to cope with the best actual policy practices (Hofman & Kaiser, 2006). This decentralization can catalyze a greater and stronger regional government application of policies because decentralization can lower the burden of the central government in maintaining particularly a wide and numerous rural areas; and second, the decentralization can eventually help the regional government to prescribe their policy adjusting to their needs and capacity. Theoretically speaking, there have been numerous academic discourses explaining the urban settlement of rural populations and the reciprocity of these migrations to social protection in a human capital approach (Xie et al., 2020).

Talking specifically about rural-urban nexus in regards to social protection and development, IFAD (2015) through its publication argued that urbanization is linked with rural development, wherein this case the intense migration of people and trade connectivity triggers the massive growth of remittance between rural and urban area – particularly in the developing countries. In regards to social protection program procurement, the government should minimize sub-optimal progress and colliding policies from the central to the regional bureaucracy (World Bank, 2012). Aside from the governmental effort, the public plays a key role in bridging the gap between the rural and urban human resource & economic development (micro sectors). The public itself or we would like to refer to it as the ‘civil society’ will run their business and check & balance government interventions in the economic cycle. We have to understand that the more productive the industries and the people themselves, then the more benefits could still be secured without hassling to maintain the balance between cash flows and welfare systems. The potentials that can be reached if this nexus is connected can be an innovative solution for the member states to apply suitable to their economic and human development characteristics.

In regards to economic development especially in LDCs and conflict-torn countries, the destabilization of financial

and monetary policies affects macro/ and microeconomic matters. This will not only disabled countries to achieve the SDGs and other development projects in regards to social protection, but also can prolong the unhealthy and exacerbated conditions like inflation, loss of investments, and others. According to UN DESA, there are several matters that should be considered when assessing the economic performance for development (including social protection): (a) The need for a more risk-based analysis to preserve economic growth and inclusive welfare program; (b) economic and development balancing, either in environmental, social, and multi-sectoral context; (c) the livelihood of the people either about the food security, environment, mitigation efforts against disaster, and health situation; (d) Income inequality, economic disparity, and social conflict of interest between each social class which hamper the goals of effective sustainable solutions since society is the key pinnacle actor behind the circle of economy; and (e) Financial crisis, pandemic, emigration, urbanization, and the resilient building mechanism for all communities in every member states to be more cohesive and the existence of financial crisis brings the importance of economic liberalization based on effective long term financing, investments, fiscal policies, and all business class empowerment to achieve effective control and entrepreneurship (DESA, 2013). The use of economic

stimulus must be effective and dedicated through the mainstreaming of improved coordination, a universal approach for all communities, and policy mapping with feasible partners and visible parameters to achieve the development goals (Jaiyesimi, 2016).

3. Urban Sprawl (Urban Bias)

A large collection of the literature shows that a country's economic development has never been detached from agricultural development. A lot of the now-developed nations were once reliant on agriculture and are now enjoying robust economic stability laid upon years of agricultural development based in rural areas. Despite its importance, there has been a systemic bias against agriculture and the rural economy in terms of development resources allocation. This bias is called the urban bias. To say the least, urban bias is present at the grassroots level of financial and political institutions worldwide. As Bezemer and Headey (2008, p. 1342) argued, "The bias is systemic because it has fundamental institutional causes grounded in the political economies of both the developing and the developed countries, and in the development profession itself".

Although universally present, urban bias affects least developed countries (LDCs) the worst. Within LDCs, political strife, unstable markets, various colonial inheritance, and overpopulation poses a

significant hindrance to the achievement of significant development due to the unattractively pessimistic economic climate said prerequisites has brought. To be more appealing to investors, both domestic and international, and to curb overpopulation, LDC governments tend to intensify urbanization rather than paying attention to the rural developments and this practice has given birth to urban bias from within.

Varshney (1993, p. 14) dissected the concept of urban bias and explored the possibility of its elimination. While it is true that most raw resources are located in the rural areas far from the city centers, it is in the urban areas that political and economic power is located and the latter being more articulate. To sum up, the countryside is economically poor because it is politically powerless – and this is one of the considerable status quo that needs to be scrutinized. However, a multiparty political system or a state-centered approach could help be the decisive factor in eroding urban bias. A prime example of the multiparty approach is the one adopted by India where every political party has been attempting to attract and concern the rural interests. Meanwhile, local governments in China served as a model of a state-centered approach to improving rural wellbeing. Rural wellbeing according to the FAO is the key measurement to decide the best merit-based approach in solving the multidimensionality of poverty in rural areas (Sen, 1981).

4. Transmigration Problem between the Rural and Urban Areas

Transmigration could occur simply due to the opportunity that an individual or a group of people wants to find in a “new land”. On the other hand, transmigration is a program issued by the government to transfer the people from a densely populated area into a lesser populated area whereas the purpose lies in a fairer distribution of population into other areas for the sake of the development within that area. Transmigration then also serves the function to prevent any area/city to have the right amount of population following their capability and capacity. If such disproportion occurred, the distribution of public services to all of the people may not be rendered properly by the government. Such predicament could be worsened as it might be a chain effect into structural poverty wherein eventually the people would stay in poverty if the incapability of the local government still exists to provide job security, social and economic protection for these people.

The UNDP already had an analysis in terms of poverty alleviation. One of the recommendations is to establish a positive work-cycle (Bhawuk et al., 2014, p. 65), whereas it includes empowerment, goal-setting, and skill development as factors that should be emphasized. It also encourages the government to provides socio-political

support (e.g., justice perceptions, access to resources, and peer/social support), a proper work design, and high-performance practices in which it encompasses a positive impact at work, feedback and job characterization, training of trainer, and job awareness program to attract all of the people to have the information of a greater opportunity.

Despite the aforementioned recommendation alongside a transmigration program to move the people onto an “idle land” to provide a better opportunity to them and to prevent the increment of slums area within the urban area, yet with a limited resource, it may just seem utopian. For instance, in Indonesia through General Soeharto’s regime, transmigration was done from Java, Bali, and Madura island onto the other islands such as Sumatra and Kalimantan to balance the demographic development. With average resettlement costs of US\$7000 per family in the mid-1980s, a transmigration program was an economic nightmare at that time (Adhiati & Bobsien, 2001), in which it would also need approximately 40 percent of the national economic budget for the development of the outer islands (Adhiati & Bobsien, 2001). More than 2 decades have passed from a massive transmigration program of General Soeharto’s regime, thus, it is important to see the relevance nowadays and how it impacts the national development agenda. Taking an example from Indonesia, the

transmigration process had been conducted throughout all of the major islands in Indonesia, yet most of the provinces like Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, and three provinces from Kalimantan have an increment of the poverty percentages. Although Maluku, Papua, and most of Eastern Indonesia do not have an increment of their poverty percentage, yet most of the provinces lived way below the poverty line. It needs to be taken into account that transmigration policy needs to be ensured first whether the new city may have the capability to absorb such influx because if not, it would create another continuing problem such as structural poverty, massive unemployment, economic and social disparity.

5. Covid-19 and Social Protection Systemic Problems: Connecting Dots

The COVID-19 pandemic presented the world with unprecedented challenges. Many of which threaten the stability and livelihood of many in developing countries, leaving them at the mercy of government response plans and respective social protection systems. As published by Oxfam in December 2020, it is shown that 2.7 billion lives lack social protection to cope with the economic crisis tailing COVID-19. Over the past year, the world had spent USD 11.7 trillion to cope with the pandemic, but as much as 83 percent of the money (USD 9.8 trillion) was spent by 36 rich countries,

compared to 0.9 percent (USD 42 billion) spent in 59 low-income countries. If broken down, cash specifically put aside for social protection could be distributed as much as USD 695 per person in 28 rich countries but only as low as between USD 28 and USD 4 in low-income or emerging countries. Oxfam International's Executive Director, Gabriela Bucher depicts this perfectly with the statement "The coronavirus united the world in fear but has divided it in response." To make matters worse, out of the half-billion unemployed people, the numbers are twice as many for women than for men (Oxfam International, 2020).

Again, those living in low-income countries suffered the most, with workers residing in said countries losing over 23 percent of their working hours. However, further research has led to staggering results. As much as 41 percent of the 126 countries studied do have social protection schemes. The only problem is, they are only one-off payments, long since exhausted with only 13 percent of the countries having programs that last more than 6 months. Among these said countries, 8 out of 10, have not even reached half of their citizens. This is evidence of years of under-investment and often discredited advice. Many view this as the perfect time to counter said crises with unprecedented investments towards the betterment of social protection schemes to mitigate the long-term impact of the pandemic. Additionally, countries also can't

solely rely on foreign aid, especially during Covid-19 – because their development agenda and social protection has to be preserved by resolving the upstream core issues. However, the World Bank is providing an emergency funding for developing countries struggling with Covid-19 to assist the economic stimulus and maintaining a healthy macroeconomic performance (The World Bank, 2020).

6. Multilateral Solutions in Social Protection Agenda: Labor, Human Rights, and Economic Development Perspective

Social protection is important either in labor welfare, human rights, and even economic development. Multilateral organizations like the ILO through the adoption of ILO Convention No. 152 back in 1952 stipulated the minimum standards for all nine fundamental sectors of social security protection. The set norms within the convention can be reflected with the current state of ILO's governance in handling social protection issues where the scope of social security is reciprocating around the two-dimensional strategy of social security which emphasized the stipulations of social protection baseline within the horizontal dimension and the extension and upgrades of social security guided by the ILO convention within the vertical dimension (International Labour Office, 2012). The international community commonly hold the principle where social protection is also

linked with labor productivity, in which in times of crisis like the current Covid-19 pandemic the lockdowns and social restrictions has forced people to work from their home and this is not a problem for the skilled labor who are working in corporations, however, this will be a problem to the labor who are working on informal sectors and other vulnerable vital and the primary sectors.

The data from OECD also concluded, to traverse the gaps amidst the uncertainty, boosting confidence for the market and producer is imperative as most of the countries all over the world is collapsing with minus 5 – 20 percent in GDP growth in 2020, which made uncertainty should be handled with sound and persistent efforts (OECD, 2020). Therefore, keeping the global supply chain going, specifically for the essential goods is a priority. The problem is not all developing countries' governments are aware of the importance of engagement for the people especially the forefront business actors to stay connected, because if any stimulus and trade-related measures were adopted without any conscious manner from the actor, the actors will just assume their business models in Covid-19 based on prejudices. So what is the correlation? In conclusion, with the crisis ongoing and corporations aren't able to fund their social protection program, member states need to take the sound steps to at least partially/ fully cover the minimum

threshold for the unskilled labor to survive while waiting for the manufacturing and the corporation situation to return onto stability.

Therefore what are the other key problems that could be resolved? Developing countries tend to be lower in terms of GDP compared to other member states and this has made pure government intervention isn't a sustainable solution. This can be resolved by identifying the systemic problems within the national legislation and provisions that ruled out the social protection procurement scheme, labor's contribution, incentives, and contributions to sustain the protection in the long run (Behrendt & Nguyen, 2018). Additionally, a clear mechanism between the contractors, sub-contractors, users, and the labor unions need to be consulted with an approach that has high burdens and insurance-based labor welfare to achieve specific and targeted measures.

From the perspective of human rights, a proportionate and justified social protection policy is needed as part of the fundamental rights to acquire protection and economic prosperity. The concerns of social protection are intertwined largely with the concern of the livelihood of the people. The role of human rights governance approach itself on this issue should be able to promote civil and political rights of the people to stand as the value enshrined within the perspectives for all policymakers when deliberating the solutions to address the

social protection problems through the legal framework to pursue much more responsible welfare and socially equal community livelihood in each industry. Multilateral efforts should be concentrated not only as mere financial assistance or capacity building to improve either the human resource or the welfare but also to correctly help the countries (semi-peripheral and peripheral countries) to thrive in the post-crisis situation where stimulus and incentives are imperative to restart the economy and sustain the social protection to help the poor communities. However, bureaucracy concerns still become a tangible obstruction to achieve this notion.

Several contentions need to be understood in regards to the economic dimension in rethinking multilateral efforts to accelerate development. *First*, the deprived macroeconomic performance and bad investment climate should be the concern by the UN and national government. The macroeconomic status quo is one of the vital benchmarks when it comes to the deliberation of labor demand, capacity-building policies, and wage-setting provisions. The condition of macroeconomic policy needs to be concerned more when resolving the labor welfare issue, why is that so? Theoretically, the macroeconomic labor productivity by the concept is defined as the average output of the work progress in the construction per the workers, this concept will eventually be led

to the conclusion that macroeconomic labor productivity is not merely assessed from its physical development but through the sub-sectors productivity performance that can be created by pre-development research and market mapping (Choi et al., 2013). Not limited to that, the macroeconomic performance is also correlated where the models in reviewing the prosperity of the labor from macro-economic policy analysis will require more extensive assessment regarding how the employees' dynamics will simultaneously impact the earning level of labor within a particular sector/subsector. In which, this narrative is somehow relevant to the factor of institutional forces from the stakeholders and how the government's judgment could assess how deprivation and setbacks within a labor system can be surfacing up and what are the flaws of it.

The size of the labor force and its component within the industry will surely affect the national economic growth especially to determine the gyroscope of the industry and how reliable these labors to improve national valuation (Li & Prescott, 2009). Hence, from this, we can see that labor welfare itself from the status quo can only be empowered if the government maps the policy correctly. And without a correct policy mapping when analyzing the pre-existing policy instruments to predetermine the model which can eventually forecast the outcome, the parameters and indicators that the government might use will not be on

target and the evaluation criteria to top-up the policies for labor welfare betterment will be assumed by a wrong prejudice among the policymakers. Thus, with blurred policy criteria and unprecise implementation, it could lead to a wrong assumption in legislating legal provisions and bills to create more investments to increase the labor opportunity and the industrial market valuation. Logically, this will increase the national GDP and it could increase income for the government to fund the social protection program for the labor. Moreover, the investment climate supported by the correct macroeconomic policy will secure mutual benefits and not only the relative engagement from the public and private actors. Continuous capital investment will also support the notion of sustainable sector empowerment and industrial advancement which will increase not merely the labor's prosperity but also the purchasing power, which will be a cross-cutting concept with the elimination of poor society.

Second, the underpaid and overworked labor with no social protection and inadequate working conditions tend to be the first vulnerable actor to be exploited as forced labor. Minimum wage unregulated by the government and lack of monitoring and compliance from the corporations tends to proliferate the problem onto another extensive dilemma as most of the forced labor were not highly educated thus making them vulnerable to be deceived under the

name of incentives. The linkage between underpaid workers and exploitation has always been perceived the same, about the characteristics where the nature of supply and demand within the labor industry and the increasing urgency for the business actors to keep the production cost low and slashing the number of outcomes has made these conditions linked to the notion of exploitation. With shifting understandings where institutional framework where the labor is being affiliated with, bargaining process between the workers and the employer, and the presence of its labor union community stood within the wage determination process as the reason for the existence of underpaid workers as a common norm.

With this issue is highly potential to be escalated as an exploitation issue –or we know it as forced labor, member states must establish clear legal provisions. There are several key problems within this spectrum. First, with the government struggling on the issue of economic recession and lack of investments to recover the economy, they may pass a bill that could eventually stand as the lubricant for the FDIs, projects, contracts, and other investments to establish and attracts more labor, but the detrimental effect is when they are deprived in terms of their human rights and safety as labor. Because rapid investments may open more jobs but the corporations who are driven by profits are not operating with political

motivation and therefore compliance should be there. As the adoption of ILO Convention No. 29 has brought the idea where member states who are ratifying the convention should refrain from modern slavery, mobilization of labor with force and not voluntarily, labor exploitation from the status quo with 14.200.000 cases should be concerned more as state-imposed forced labor has decreased dramatically (ILO, 2014).

7. Relevant International Past Efforts by the United Nations

a. The establishment of the UN Development Programme (UNDP)

United Nations Development Programme or UNDP is one of the UN's specialized programme agencies that has the main mandate to assist and monitor the development of member states in achieving the sustainable development goals and addressing certain thematic issues ranging from environment, development capacity building, human security, and addressing the issues of the socio-economic field. Established in 1965 with 170 countries as the member, UNDP also assists member states to promote inclusive and effective governance in member states, building resilience to improve the livelihood of the people, and also eradicating poverty & promoting

equality (UNDP, 2020). Historically, UNDP itself was a merger between EPTA and Special Fund Programme, these are the UN specialized technical assistance efforts in 1962 to be more effective in assisting UN member states (Murphy, 2006).

To assist member states in achieving the sustainable development goals and increasing their resilience to face the five challenges (poverty, inequality, crisis prevention, environment, and innovative partnership) UNDP worked with member states in guiding and channeling the international assistance through sponsored pilot projects, trade reformation, debt relief, and inclusive development dialogue (UNDP, 2017). The tremendous effect of the global economic crisis has led UNDP to accelerate their programs based on the SDGs and MDGs to act as the “score-keeper” for member states national development program and these efforts were proven as successful when UNDP in 2013 was evaluated has progressively combating poverty and the vulnerable communities through their efforts and relief measures directed towards member states (UNDP, 2017).

- b. UNDP 2018 - 2021 strategic plan
UNDP 2018 - 2021 strategic plan is a 3-year comprehensive strategic action

implemented by the UNDP as the guiding vision and principle of their operations in assisting member states to grow their national development plan thus catalyzing it so the SDGs themselves could be achieved by 2030. The UNDP Strategic plan itself is being used as a medium to visualize the periodic and comprehensive efforts by UNDP to assist member states in achieving sustainable development goals. Current UNDP 2018-2021 strategic solutions outlined the importance of the efforts to enhance their innovation, strengthen mutual goal partnerships, establish result-oriented roadmap policies to achieve the 2030 SDGs, and other technical recommendations and guiding principles (UNDP, 2018).

- c. Social security (minimum standards) convention, ILO Convention No. 102
This convention was adopted in 1952 and is accounted as the flagship convention of all ILO Social Security Conventions and it's the only legal and labor law instrument until now that upholds international ratifications and accessions. The convention itself is also adopted based on the social welfare principles and establishes the minimum standards based on the best practices from all nine sectors of labor welfare (ILO, 2018). The convention itself allows

the legal compliance from its state parties to extend the step-by-step social welfare spectrum and relate it to the social security schemes based on the populations and the beneficiary of the social protection program. This convention also trademarks several key provisions such as collective financing and benefits by insurance contribution mechanism. Complementing social security channels and also progressive national policy objectives were also elaborated in this recommendation.

d. Sustainable Development Goals

The adoption of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) began from Rio+20 or also known as the United Nations Conference on Sustainable Development (UNCED, 1992). Rio+20 was held in 2012 as a twenty-year follow-up of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). In Rio+20, it is noted that most of the world leaders that came were from the G20 (UNCED, 1992). The world leaders that attended the Rio+20 believe that they have to create a global agenda that contains key issues that the world is facing – this agenda is intended to be the blueprint for every country in the world. With that purpose, the governments make up their mind to establish global

Sustainable Development Goals (SDGs) (UNFPA, 2015). Beforehand, there was an agenda that is similar to the SDGs - that agenda is called Millennium Development Goals (MDGs). Thus, we can have a conclusion that SDGs are not just built to create a blueprint for countries but also to continue, and to formulate a “better version” of MDGs. SDGs could improve and address the points that were reviewed by a lot of actors. One of the points that were previously reviewed was about the limited scope and goals in MDGs - MDGs only has 8 goals and it seems to be economy or poverty eradication oriented. With that review taken into account, the governments then created a more inclusive, broad, and constructive scope in SDGs. With a total of 17 goals and 169 targets, the SDGs will address and encourage the implementation of all the critical sectors in each scope until 2030.

As the international community continuously enhance and cope up with the status quo to execute the best scenario out of the worst options on decision-making, the delay of SDGs achievement is inevitable unless the global community could have the guidelines and compliance on channeling the efforts to recover and inject stimulus to the weakened

capital through the importance of green economy-boosting, effective institutionalization for sustainable infrastructure & superstructure, and looking for an innovative way to establish the maintenance of progress so the SDGs can be achieved punctually with its optimum implementation (Srivastava, et al., 2020). If this could be achieved, therefore the negative forecasts and projections in regards to the SDGs won't take place and the global community will be more resilient than before under the principle of timely responses and adjustments to be more flexible overall negativities. This narrative is surely intertwined on how the perspective of SDGs should be incorporated when trying to alleviate the social protection problem.

- e. UN-related resolutions regarding economic and social fundamental concerns related to social protection. Most of the UN ECOSOC's resolutions were completely comprehensive on stipulating the importance of SDGs in this matter especially including the financial assistance for the people and social protection. Social protection was integrated into these resolutions such as from the ECOSOC resolution E/2020/L.14; E/RES/2020/22; and E/2019/2. And also, for most of the resolution given,

ECOSOC is now expected to address the issue with a much more general approach to the principal organ within the UN. For most of the resolutions given above, the flow of the resolution focuses on the topic of social inequalities, comprehensive review of the policies adopted by member states, and maintaining the efforts to achieve SDGs on time by the comprehensive policy review (ECOSOC, 2017). For the General Assembly, the UNGA resolution 70/1, this resolution is pretty much controversial because this resolution stipulated the fundamental stipulations about SDGs. Thus, the approach itself has to be comprehensive and dynamic when taking collective approaches in policy recommendations related to social protection.

8. The Overview of Countries Challenges in the Issues

- a. Developing countries or semi/periphery countries
Developing countries during this pandemic might face many challenges in regards to how they could recover as a state. It is then an obvious thing that many countries have already reallocated their national budget not only for mitigation programs, but also for its prevention, response, and recovery

program. By shifting their budget mostly going for the health sector, it will be a challenge on how they could devise, implement, or try to adopt new programs that may not become their national priority. It should be taken into account that although the developing countries are struggling with COVID-19, such challenges like socio-economic problems will always become one of the fundamental challenges in regards to providing social protection and poverty alleviation. For instance, following a limitation on movement and budget, affects the way such entity like the local government should find an alternative funding mechanism, manage any public-private sector complexity (if any), or even try to maintain the quality of the human resources itself to maintain, monitor, or even the evaluation of the related programs in regards of social protection and poverty alleviation.

- b. Developed countries or core countries

We cannot deny that developed countries are also affected by this pandemic in which there is a huge budget reallocation and shift within their policy for the recovery or response program towards COVID-19. Nevertheless, developed countries already had a bigger privilege in

regards to capital investment, technology, facility, or even the capability to ensure social protection towards vulnerable actors in this kind of situation. Problems that may lie within developed countries are on how they could contribute towards other developing countries through international cooperation as a part of the moral obligation of the international community to recover from this pandemic. Moreover, international cooperation may be related towards reciprocity that exists so that both of the parties involved could gain mutual benefits for them, hence, the problem is on what kind of feedback and benefits could developed countries get by having to cooperate with the developing countries. If mere cooperation with good faith on poverty alleviation programs can be done, the global community then must provide a good train of thought or rationalization on why this kind of cooperation could be on the developed countries' concern

C. CONCLUSION

Despite the current pandemic, poverty alleviation and social protection systems would always face the aforementioned challenges. Whether it is the availability of the human resources to provide proper public services, bureaucracy process, or

even the inclusivity of the assistance provided to ensure social security to the society, it will always become a dynamic process as it will adjust the political decision of the government and also its economic capability to provide those. It needs to be taken into account that the international community through the UN entities had strived to offer many assist-ances through their guidelines and programs in a form of in-kind assistance, information-sharing, or funding. Yet, the international community still needs to scrutinize the current status quo on what kind of technicalities could become a sustainable answer to resolve the current issue and/or fill the current loopholes of the past international actions. Lastly, the rural-urban development nexus needs to be addressed timely and shouldn't be forgotten by the member states and the stakeholders when trying to achieve a more sustainable endeavor in development goals. Following the elaboration on this paper, the nexus between rural and urban development is proven to be strategically connected and further technical research to see the intersectional issues and cross-cutting solutions are expected to be deliberated.

References

- Adhiati, M.A. S., & Bobsien, A. (2001, July). *Indonesia's Transmigration Programme - An Update*. Indonesia's Transmigration Programme - An Update. Retrieved from <https://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/ctrans.htm> (March 15, 2021)
- Behrendt, C., & Nguyen, Q. A. (2018). *Innovative Approaches for Ensuring Universal Social Protection for the Future of Work*. Geneva: International Labour Organization.
- Bezemer, D., & Headey, D. (2008). Agriculture, Development, and Urban Bias. *World Development*, 36 (8), 1342-1364. doi: 10.1016/j.worlddev.2007.07.001
- Bhawuk, D. P.S., Carr, S. C., Gloss, A. E., Thompson, L. F., & UN Development Programme. (2014). *Poverty reduction through positive work cycles: Exploring the role of information about work, culture and diversity, and organizational justice* Barriers to and Opportunities for Poverty Reduction. Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/istanbul/docs/2014_Barriers_to_and_Prospects_for_Poverty_Reduction.pdf (March 14, 2021)
- Chen, M., Zhang, H., Liu, W., & Zhang, W. (2014). The Global Pattern of Urbanization and Economic Growth: Evidence from the Last Three Decades. *PLoS One*, 9(8).
- Choi, K., Haque, M., Lee, H. W., Cho, Y., & Kwak, Y. (2013). Macroeconomic labour productivity and its impact on firm's profitability. *Journal of the Operational Research Society*, 64(10), 1258-1268.
- DESA (2013). *World Economic and Social Survey 2013: Sustainable Development Challenges*. New York: United Nations Publication.

- ECOSOC (2017). *Guiding Operational Activities for Development*. Retrieved from UN Economic and Social Council: <https://www.un.org/ecosoc/en/oas-qcpr> (27 May 2021)
- Eurostat (2020). *Territorial typologies manual - urban-rural typology*. Retrieved June 30, 2021 from European Union Statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Territorial_typologies_manual_-_urban-rural_typology
- Gentilini, U. (2005) 'Mainstreaming Safety Nets in the Social Protection Policy Agenda: A New Vision or the Same Old Perspective?', *Journal of Agricultural and Development Economics*, 2(2), 133-157, <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/af137e/af137e00.pdf>.
- Gracia, A.B., Gruat, J.V., & ILO (2003). *Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment For Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*. Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment For Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development. <https://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf>
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2006). Decentralization, Democratic Transition, and Local Governance in Indonesia. In P. Bardhan, & D. Mookherjee, *Decentralization and Local Governance in Developing Countries* (pp. 81-124). Cambridge: MIT Press.
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-Urbanisation in East Asia: A New Challenge for Planning? *Journal International Development Urban Planning Review*, 29(4), 503-519.
- IFAD (2015). Leveraging the Rural-Urban Nexus for Development. *IFAD Post-2015 Policy Brief 1*.
- ILO (2014). *PROFITS AND POVERTY: The economics of forced labour*. Geneva: International Labour Office.
- ILO (2018). *Financing Social Protection for the Future of Work: Fiscal Aspects and Policy Options*. Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Office (2012). *Social security for all. Building social protection floors and comprehensive social security systems. The strategy of the International Labour Organization*. Geneva: International Labour Organization.
- Jaiyesimi, R. (2016). The Challenge of Implementing the Sustainable Development Goals in Africa: The Way Forward. *African Journal of Reproductive Health*, 20(3), 13-18. doi:10.29063/ajrh2016/v20i3.1
- Li, X., & Prescott, D. (2009). *Measuring Productivity in the Service Sector*. Ontario: Canadian Tourism Human Research Council and University of Guelph.
- Merrien, F. (2013). Social Protection as Development Policy: A New International Agenda for Action. *Revue Internationale De Politique De Développement*, (4.2), 89-106. doi: 10.4000/poldev.1525

- Murphy, C. N. (2006). *The United Nations development programme: A better way?* Cambridge University Press.
- Nguyen, H., & Nguyen, L. (2018). The relationship between urbanization and economic growth: An empirical study on ASEAN countries. *International Journal of Economics*, 45(2), 316-339.
- OECD (2011). *OECD Regional Typology*. OECD. From https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf
- OECD (2020). *Shocks, risks, and global value chains: insights from the OECD METRO model*. OECD. From <https://www.oecd.org/trade/documents/shocks-risks-gvc-insights-oecd-metro-model.pdf> (27 May 2021)
- Oxfam International (2020). *2.7 billion people have had no social protection to cope with Covid-19 economic crisis*. Retrieved from <https://www.oxfam.org/en/press-releases/27-billion-people-have-had-no-social-protection-cope-covid-19-economic-crisis>
- Pechrova, M. (2015). Impact of the Rural Development Programme Subsidies on the farms' inefficiency and efficiency. *Agricultural Economics*, 61(5), 197-204.
- Sambit, B. (2015). *The Historical Origins of Poverty in Developing Countries*. Munich Personal RePEc Archive. Retrieved from https://mpira.ub.uni-muenchen.de/67902/1/MPRA_paper_67902.pdf
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Clarendon Press.
- Shannon, T.R. (1996). *Introduction to the world-system perspective*. Westview.
- Sheikhnejad, Y., & Yigitcanlar, T. (2020). Scientific Landscape of Sustainable Urban and Rural Areas Research: A Systematic Scientometric Analysis. *Sustainability*, 12(1293), 1-28.
- Spicker, P. (2007). *Definitions of poverty: twelve clusters of meaning*. In P. Spicker, S. A. Leguizam, & D. Gordon (Eds.). *Poverty: An International Glossary*. London: Zed Books.
- Srivastava, A., Sharma, R., & Suresh, A. (2020). Impact of Covid-19 on Sustainable Development Goals. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9), 4968-4972.
- The World Bank (2020). *\$1 Billion from World Bank to Protect India's Poorest from COVID-19 (Coronavirus)*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/13/world-bank-covid-coronavirus-india-protect-poor> (17 March 2021)
- UNCED (1992, June). *United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992*. From United Nations: <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992> (25 May 2021)
- UNDP (n.d) *UNDP Strategic Plan*. UN Development Programme. Retrieved from <https://strategicplan.undp.org/#:~:text=The Strategic Plan 2018-2021,2030>

- Agenda for Sustainable Development. (14 March 2021)
- UNDP (n.d). *Results at a glance*. UN Development Programme. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/about-us/results-at-a-glance.html> (14 March 2021)
- UNDP (n.d). *Six Signature Solutions*. UN Development Programme. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/six-signature-solutions.html> (14 March 2021)
- UNDP (2017). *UNDP Annual Report 2017*. Retrieved from UNDP: <https://annualreport.undp.org/2017/> (27 May 2021)
- UNDP (2018). *UNDP's mandate for health and development*. Retrieved from UNDP: <https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/about-us/undps-mandate-for-health-and-development/> (25 May 2021)
- UNDP (2020). *COVID-19 Pandemic Response*. Retrieved from UNDP Indonesia: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/coronavirus.html> (27 May 2021)
- UNDP (n.d). *UNDP Strategic Plan: 2014-2017*. UN Development Programme Retrieved from https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/Changing_with_the_World_UNDP_Strategic_Plan_2014_17/
- UNFPA (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Retrieved from <https://www.unfpa.org/resources/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development> (17 March 2021)
- United Nations News (n.d). *Onset of COVID-19 pandemic boosts support for international cooperation*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2020/04/1062122> (15 March 2021)
- Varshney, A. (1993). Introduction: Urban Bias in perspective. *Journal Of Development Studies*, 29(4), 3-22. doi: 10.1080/00220389308422293
- Webster, D. (2002). *On the Edge: Shaping the Future of Peri-Urban East Asia*. Stanford: Stanford University Press.
- WHO (2020). Timeline of WHO's response to COVID-19. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline> (18 March 2021)
- WHO (n.d) *Strategic preparedness and response plan for the novel coronavirus*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus> (16 March 2021)
- Woltjer, J. (2014). A Global Review on Peri-Urban Development and Planning. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 1-16.
- World Bank (2012). *Public Expenditure Review Summary - Social Assistance Program and Public Expenditure Review 1*. Washington DC: World Bank.
- World Bank Group's Operational Response*

to COVID-19 (coronavirus) –
Projects List (25 Mei 2021). Diakses
dari
<https://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/world-bank-group-operational-response-covid-19-coronavirus-projects-list> (16 April 2021).

Xie, S., Chen, J., Ritakallio, V.-M., & Leng, X. (2020). Welfare migration or migrant selection? Social insurance participation and rural migrants' intentions to seek permanent urban settlement in China. *Urban Studies Journal*, 1-21.

Pemikiran Mark Doel tentang *Teaching Social Work Practice* (Sesi *Context of Practice Teaching*)

Muttaqin

Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial
e-mail: muttaqinpusdiklat67@gmail.com

Abstrak

Penulis memfokuskan tulisannya pada pemikiran Mark Doel dan kolega pada Modul 1 *Context of Practice Teaching*. Tujuan penyampaian sesi *Context of Practice* diharapkan dapat membantu praktisi pendidikan menjadi pendidik praktik pekerjaan sosial yang sesuai kaidah keilmuan pekerjaan sosial dan kedua membantu pembaca belajar menjadi pendidik praktik pekerjaan sosial. Penulis mencoba menggabungkan pemikiran mereka, khususnya sesi *Context of Practice Teaching*, dengan pemikiran Martin Davies tentang pentingnya *Clients Point the Way* yang menjelaskan bahwa ada Delapan Pelajaran untuk Dipelajari. Beberapa hal yang akan dibahas yaitu tujuan, metode dan berbagai kegiatan. Kegiatan pertama terkait dengan model praktik mengajar; kedua terkait dengan pembelajaran sebelumnya; dan terakhir terkait dengan pelibatan orang lain.

Kata kunci: Praktik pembelajaran, pemikiran Doel dan kolega, pemikiran Davies.

Abstract

The author focuses his writing on thoughts of Mark Doel and his colleagues in Module 1 Context of Practice Teaching. The purpose of delivering the Context of Practice Teaching session is aimed at helping education practitioners to become social work practice educators and secondly helping or helping readers learn to become social work practice educators. The author tries to combine their thoughts, especially the Context of Practice Teaching session, with Martin Davies' thoughts about the importance of Clients Point the Way which explains that there are Eight Lessons to Learn. Several things will be discussed, namely objectives, methods and various activities. The first activity is related to models of practice teaching; second is related to prior learning; and lastly related to involving others.

Key words: Practice teaching, thoughts of Doel & colleagues, thoughts of Davies.

A. PENDAHULUAN

Mark Doel *et al.* (1996) dengan bukunya yang berjudul *Teaching Social Work Practice* telah mengemukakan pemikirannya yang sangat penting bagi

para pekerja sosial *setting* pendidikan. Buku *Teaching Social Work Practice* oleh Doel *et al.* dibagi ke dalam tujuh modul yaitu: 1) *Context of Practice Teaching*; 2) *Organization of the Placement*; 3) *Anti-*

Oppressive Practice Teaching; 4) *Models of Learning*; 5) *Content of Practice Teaching*; 6) *Methods of Practice Teaching*; dan 7) *Examination of Ability*.

Pemikiran Doel *et al.* (1996) di Modul 1 *Context of Practice Teaching* ini penting dan menjadi tantangan seorang pendidik. Terutama tentang peningkatan kemampuan mentransfer kompetensi teknis dengan keberagaman *setting* layanan pekerjaan sosial. Pelatihan yang baik adalah pelatihan didasarkan pada kompetensi (Ife & Tesoriero, 2008, p. 551). Demikian juga yang dikatakan Midgley (2005, p. 27), kompetensi pekerja sosial harus selalu di-*update* untuk menjawab tantangan bahwa layanan profesi harus semakin profesional. Di lain pihak sepertinya Davies memandang bahwa dunia klien membutuhkan penerimaan pelayanan dan berbagai intervensi kesejahteraan. Jenis pelayanan yang harus mereka terima harus terakomodir ke dalam kebijakan sosial, diperhitungkan saat membuat perencanaan, pemberian praktik pekerjaan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klien adalah *central point*-nya dalam penanganan praktik pekerjaan sosial.

Penulisan buku *Teaching Social Work Practice* oleh Doel *et al.* (1996) ditujukan pada dua hal pertama membantu para praktisi pendidikan untuk menjadi pendidik praktik pekerjaan sosial dan kedua menolong atau membantu

pembaca belajar menjadi pendidik praktik pekerjaan sosial. Selanjutnya, penulis membatasi penulisannya hanya pemikiran Doel *et al.* (1996) pada Modul 1 *Context of Practice Teaching*. Pemikiran Doel *et al.* (1996) di Modul 1 *Context of Practice Teaching* perlu digali dan dijabarkan kembali secara kontekstual kedalam dunia *clients* sebagai sasaran pelayanan dalam praktik pembelajaran pekerjaan sosial dengan *Clients Point the Way: Eight Lessons to Learn* (dalam Davies, 1995, p.49).

Selanjutnya penulis akan mencoba mengelaborasi kedua pemikiran tersebut sehingga bisa diharapkan menjadi referensi bagi praktisi pendidikan praktik pekerjaan sosial. Beberapa yang akan di-*elaborasi* adalah berkaitan dengan *Models of Practice Teaching*; *Prior Learning*; dan *Involving Other*.

B. ORIENTASI PADA KLIEN/KPM

Penulis menganggap, seorang fasilitator sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar harus mampu membaca situasi dan kondisi yang bersifat '*sea of practice teaching*'. Mampu memperoleh gambaran tentang kemampuan diri; mempunyai harapan terhadap proses pembelajaran; memahami profil kepesertaan; mempunyai gambaran hambatan apa yang akan dihadapi; mempunyai referensi terhadap dunia klien; memahami resiko /dampak yang akan dihadapi; mempunyai

format evaluasi proses; dan gambaran akan ketidakefektifan proses pembelajaran. Bila memahami itu semua maka proses pembelajaran dengan menekankan pada klien sebagai fokus sasaran pemberdayaan akan berhasil lebih baik. Sesuai pandangan Davies (1995, p. 49) tentang *Clients Point The Way: Eight Lesson to Learn*, dimana klien/keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai *center of point*.

Lesson 1: Improve the Pathways to Social Work Services (Meningkatkan Layanan Pekerjaan Sosial)

Pelajaran pertama, Davies menjelaskan empat cara memperbaiki sistem pelayanan. Pertama adalah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya layanan kelembagaan kesejahteraan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan klien. Kedua, kelembagaan kesejahteraan sosial harus mengantisipasi stigma yang kuat ketika klien berhubungan dengan lembaga kesejahteraan sosial. Ketiga memberikan edukasi kepada para lembaga kesejahteraan sosial sebagai sistem rujukan dan menghindari kesalahpahaman serius yang merusak hubungan kerja sosial sebelum dimulai. Keempat masalah muncul saat klien/masyarakat kurang menerima layanan penuh. Musti ada penerimaan layanan dari berbagai macam profesi dan penerimaan layanan secara merata. Oleh Davies

dikatakan “*all referral should be treated equally*”.

Lesson 2: Handle the Intake Process with Imagination, Sensitivity and Tact - Put Clients Their Ease.

Pekerja sosial harus mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada klien. Terutama saat menangani proses Intake dengan mengeksplorasi kemampuan berimajinasi, membangun sensitivitas pelayanan, dan kebijaksanaan. Bagi kita sebagai pekerja sosial atau bagi semua badan layanan publik, merupakan kegiatan rutin, biasa saja dan normal saat penerimaan klien, namun bagi klien, proses awal saat penerimaan pelayanan adalah pengalaman yang baru dan mungkin unik. Untuk tersenyumpun perlu keberanian tersendiri. Beberapa fakta yang harus diperhatikan dan ditunjukkan oleh pekerja sosial adalah memahami pentingnya proses penerimaan klien yang kadang pekerja sosial melupakannya.

Pertama *resepsionis/front office* harus memperlakukan setiap pendatang baru dengan serius, penuh senyuman dan kehangatan. kedua bahwa secara prinsip lembaga harus berusaha memberikan tanggapan positif untuk setiap permintaan awal; dan ketiga bahwa jika rujukan ke agen lain tidak dapat dihindari. Maka harus benar-benar dikaji kemanfaatan proses rujukan dan bila memungkinkan memberikan pengenalan pribadi klien secara utuh, misalkan lewat hasil

asesment yang jujur. Rees and Wallace (Davies, 1995, p. 51) mengatakan,

... in the review of client-perception research studies, confirm the sense of stigma felt by many who come for social worker help and as well as emphasizing the importance of an unhurried approach, a friendly reception and non judgmental response to all applicants for help, they say that it is especially important for intake staff to learn the art of enabling the client to ask for help.

Tinjauan hasil kajian/studi penelitian tentang persepsi klien yang dikutip Rees dan Wallace, mengkonfirmasi bahwa rasa stigma yang dirasakan oleh banyak klien saat meminta bantuan pelayanan pekerjaan sosial. Hasil penelitian itu juga menjelaskan bahwa tindakan pelayanan pekerjaan sosial tidak dilakukan secara tergesa-gesa; ada penerimaan yang hangat; dan tanggapan yang tidak menghakimi klien untuk meminta bantuan. Maka bagi staf *intake* harus mempelajari *seni memungkinkan klien untuk meminta bantuan (the art of enabling)*.

Lesson 3: Be Concerned with the Client as a Person

Pekerja sosial harus melihat klien sebagai pribadi. Pendekatan kajian dari perspektif klien dapat membantu mendefinisikan praktik pekerjaan sosial

secara profesional. Profesionalitas sebenarnya bukan pada yang pelaksanaan pekerjaan dengan tenang, tidak terikat, berpikiran karier, dan tidak tertarik tetapi merupakan pekerja yang dapat menunjukkan keramahan, pengertian, dan kehangatan sikap yang meyakinkan klien tentang minat aktifnya dan perhatiannya terhadap keadaan buruk klien. Jadi pandangan Davies tentang profesionalitas seorang profesi terletak pada kemampuan diri untuk kepentingan klien. Klien merasa nyaman, percaya, menunjukkan kemina-tan, dan perasaan lainnya.

Lesson 4: Identify the Client's Expectations and Relate These to the Agency's obligations and resources. Be active, Be alert, Be helpful, and don't string the client along.

Esensi *Lesson 4* ini adalah membangun kemampuan pekerja sosial untuk meng-ases dengan mengidentifikasi harapan dan kebutuhan/ekspektasi klien. Setelah itu harus mampu menjadi penghubung dengan berbagai sumber daya kelembagaan. Maka dalam prosesnya seorang pekerja sosial harus aktif, membangun kewaspadaan, niat membantu, dan tidak mengikat klien.

Lesson 5: Be good counsellor (menjadi konselor yang baik)

Davies menganggap seorang pekerja sosial harus mampu menjadi *'be good counsellor'* dimana berbagai aktivitas konseling harus didasari oleh

sebuah keahlian/keterampilan. Ia berpendapat bahwa untuk menjadi *be good counsellor* maka seorang pekerja sosial harus mampu mewujudkan pertolongannya bersumber pada keyakinan pada *“the values of tangible help”*. Ia mencontohkan beberapa wujud pertolongan yang nyata, yang mungkin dianggap sepele oleh seorang pekerja sosial, namun bagi klien itu dianggap sangat penting. Pekerja sosial tak acuh dengan keberadaan klien, cenderung tidak diperhatikan saat klien hadir. Hanya dengan ketidakhadiran klien, lantas pekerja sosial menyadari ada sesuatu yang salah terhadap klien. Padahal kesalahan awal bersumber dari sikap pekerja sosial yang kurang hangat.

Lesson 6: Remember that the social work role puts you in a position of power and privilege.

Pada langkah 6 ini, Davies (1995, p. 54) menempatkan peran pekerjaan sosial pada posisi berkuasa dan istimewa.

The fact of the social worker's authority carries with two obligations. First, it is her job to give structure to the working relationship, to direct and make positive use of verbal exchange, to focus on appropriately restricted issues., always to explain procedures, and to be absolutely that if further appointments are thought to be needed the client is aware of the fact and knows that the social worker remains available the

second obligation is the traditional one accorded to the privileged person in a service relationship always to use her influence on behalf of the client where it is pertinent and feasible to do so. (Davies, 1995, p. 54)

Davies menilai peran pekerja sosial sangat istimewa karena secara empirik mempunyai otoritas dan menjadi kewajiban. Menurutnya, ada dua kewajiban, pertama, tugasnya adalah membangun hubungan kerja yang terstruktur, mengarahkan dan memanfaatkan pertukaran verbal secara positif, berfokus pada masalah yang dibatasi secara tepat. Karenanya seorang pekerja sosial harus paham dan selalu berpegang pada prosedur kelembagaan. Termasuk jika diperlukan janji temu lebih lanjut. Yakinkan klien menyadari fakta dan mengetahui bahwa pekerja sosial tetap bersedia mengadakan kontak lebih lanjut. Kewajiban kedua adalah kewajiban tradisional yang diberikan kepada klien dan selalu menggunakan pengaruhnya atas nama klien.

Sehubungan dengan dua kewajiban tersebut maka sudah selayaknya seorang pekerja sosial harus jujur dan terbuka antara tanggung jawab kelembagaan dengan proses pemberian layanan terhadap klien. Dalam konteks inilah sering terjadi dilema. Apalagi menghadapi masyarakat egaliter. Terutama dalam konteks pemberdayaan komunitas.

Lesson 7: Use your knowledge and experience for the benefit of the client.

Pekerja sosial harus menggunakan segala pengetahuan dan pengalaman untuk keuntungan klien, maka pekerja sosial harus selalu memperbarui pengetahuan pengalaman. Terutama berkaitan dengan kontekstual apa yang diinginkan klien sebagaimana dinyatakan oleh *Rose and Wallace* (Davies, 1995, p.54). Ia telah mengidentifikasi ada tiga hal yang diinginkan klien yaitu (1) mereka suka pekerja sosial yang memiliki pengalaman hidup yang cukup dan dunia yang secara efektif tak tergoyahkan. Pengalaman hidup pekerja sosial dapat menjadi modal untuk memahami dunia klien. Dunia klien yang penuh kekerasan; perilaku menyimpang; degradasi dan fantasi psikologis; (2) mereka menyukai pekerja sosial yang memiliki '*self evidently*'. Nilai 'kejelasan diri' yang dimiliki pekerja sosial akan membangun inisiatif pekerja sosial untuk belajar memahami masalah klien melalui pengalaman hidup mereka sendiri. Karena pekerja sosial juga mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang serupa dengan klien; serta (3) mereka menyukai pekerjaan sosial yang memiliki pengetahuan khusus tentang kelompok klien, penyandang cacat mental, dan lain-lain.

Lesson 8: Always be trustworthy, always be reliable (selalu bisa dipercaya, selalu bisa diandalkan).

Seorang pekerja sosial harus mampu menjaga kepercayaan, dan selalu bisa diandalkan demi kepentingan klien. Sikap tersebut, akan membuat klien memberikan penghargaan atas kebaikan moral pekerja sosial. Karena sekembalinya peserta ke tempat pengabdian melaksanakan praktik pekerjaan sosial peserta diharapkan mampu: (1) meningkatkan layanan kelembagaan kesejahteraan sosial; (2) membangun kemudahan layanan dari mulai proses intake sampai pada terminasi; (3) melihat klien sebagai pribadi. Tunjukan keramahan, pengertian, kehangatan, mampu meyakinkan klien tentang minat pemberdayaannya dan selalu peduli pada kondisi apapun klien; (4) pekerja sosial mampu meng-ases harapan dan kebutuhan klien; (5) mempunyai '*the value of tangible help*' yaitu pemberian pertolongan yang diberikan kepada klien, betul-betul dirasakan oleh klien; (6) semakin kuatnya kesadaran bahwa pekerja sosial mempunyai '*a position of power and privilege*' di mana ia mempunyai posisi, kedudukan dan keistimewaan karena yang bersangkutan bisa mengatasnamakan kelembagaan kesejahteraan sosial dan berdiri atas nama klien; (7) selalu meng-*update knowledge*; dan terakhir (8) pekerja sosial harus selalu menampilkan performa sebagai pribadi selalu bisa dipercaya dan dapat diandalkan.

Hal itu sejalan dengan pemikiran Saporin (1975, p. 3) bahwa: “*social work is a social institution, human services profession, and a technical, scientific art of practice.*” Profesi pendidik pekerjaan sosial harus memahami bahwa pekerja sosial dan kompetensinya harus memenuhi kebutuhan layanan kelembagaan kesejahteraan, mengedepankan pelayanan yang menjunjung sisi kemanusiaan dan terampil mengembangkan pengetahuan seni berpraktik.

C. MODEL OF PRACTICE TEACHING

Setelah memahami kerangka kerja praktik pekerjaan sosial baik secara profesi maupun dalam lingkup kerja kelembagaan kesejahteraan sosial, maka aktivitas pertama yang akan dilakukan menurut Doel *et al.* (1996) *to supervise or to practice teach*. Di awal tulisannya, Doel mengingatkan fasilitator agar pesertanya mampu memahami dan mengenal perbedaan empat model pembelajaran secara umum. Walau kadang menurutnya keempat model tersebut sering terjadi tumpang tindih. Untuk menghindari ketumpang tindihan keempat modul ini maka sudah seharusnya kita memahami masing-masing tujuan, penerapan metode, memahami substansi keragaman variasi metode.

Rumusan tujuan perlu dibuat, agar peserta didik mendapatkan pemahaman

perbedaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran praktik pekerjaan sosial. Selain itu ia berharap para peserta didik juga familiar/terbiasa dengan beberapa perkembangan maupun perubahan praktik pembelajaran pada suatu waktu pengajaran. Setelah itu perlu menetapkan metode atau caranya yang akan disampaikan dengan (1) pertimbangkan bagaimana empat model yang diperkenalkan bisa diterapkan untuk bisa *to supervise* atau *to practice teach*? Tapi sepertinya, pengalaman praktik mengajar seorang peserta akan menentukan keberhasilan dalam menerapkan *to supervise* atau *to practice teach* kedalam keempat model tersebut. (2) memikirkan keuntungan dan kekurangan beruntungan menerapkan keempat pendekatan tersebut (3) memikirkan minat kita saat ini dalam praktik mengajar, pendekatan apa yang paling menarik bagi kita? Dengan pemikiran Doel ini, penulis berharap dengan berbagai variasi model peserta akan terbantu didalam menerapkan aktivitas pertamanya. Selanjutnya fasilitator/pendidik dapat mengembangkannya kedalam kelompok kecil untuk memperluas diskusi. Doel mengingatkan hasil diskusi perlu disimpan ke dalam beberapa catatan portofolio terutama para peserta pekerja sosial tentang cara mengatasi masalah dengan berbagai macam pendekatan. Gambaran keempat pendekatan tersebut

dapat dilihat pada Tabel 1 (Doel *et al.*, 1996, p. 4).

Tabel 1. Matriks empat model atau pendekatan

1. <i>Growth and Development</i>	2. <i>Apprenticeship</i>
1. Largely individual teaching 2. Emphasizing on student's feeling 3. Development of self awareness 4. Reflective style of supervision 5. Premium on confidentiality	1. Primary relationship with supervisor 2. Work with available cases 3. Global ad hoc approach 4. Supervision as discussion, use of process records 5. Rate of progress measured
<i>Philosophy</i>	<i>Philosophy</i>
1. Theurapeutic models 2. Professional performance depends on personal growth 3. Psychological theories 4. Emphasis on process	1. Learning by doing 2. Good practice means replication exating work practices 3. Behavioural theories 4. Process and outcome in balance
3. <i>Structured Learning</i>	4. <i>Managerial</i>
1. A planned curriculum, often modular form 2. Systematic and varied teaching methods 3. Use of simulation 4. Pre-defined standards for assessment 5. Team teaching common	1. Planned workload 2. Skill based 3. Problem solving approach in supervision 4. Success measured as ability to follow procedures 5. Emphasis on agency policy as arbiter of good practice
<i>Philosophy</i>	<i>Philosophy</i>
1. Educational models 2. Direct observation important 3. Adult learning theories 4. Outcome and process in balance	1. Learning by doing 2. Protection of clients paramount 3. Rule-directed behavior 4. Emphasis on outcome

Sumber: Doel *et al.* (1996, p. 4)

Doel *et al.* (1996) tidak menjelaskan secara rinci tentang empat pendekatan ini. Namun penulis mencoba mengelaborasi pemikirannya dengan

setting layanan *clients point* sebagaimana yang digagas oleh Davies di atas.

1. Model 1 *Growth and Development* Pendekatan *growth and development*, adalah sebuah pende-

katan yang berbasis klinis, lebih menekankan permasalahan perkembangan dan pertumbuhan personal klien. Dalam penerapan langkah pertama yaitu *to supervise* atau *to practice teach*, seorang fasilitator harus mengingatkan peserta, bahwa sekembalinya dari proses belajar. Peserta diklat sebagai pekerja sosial harus belajar memahami perasaan individual klien; memfasilitasi pengembangan kesadaran diri klien; bisa mengembangkan gaya pengawasan reflektif; dan terakhir harus mampu menjaga kerahasiaan klien.

Karena pendekatannya adalah terapi klinis personal maka seorang fasilitator harus dibekali dengan berbagai kompetensi. Seperti memahami perkembangan personal individual; memahami berbagai teori psikologis, dan berorientasi pada proses intervensi pekerjaan sosial bukan pada hasil/target.

2. Model 2 *Apprenticeship* (magang)
Dalam proses magang, peserta dihadapkan pada minimal dua orang supervisor, yaitu fasilitator itu sendiri berperan sebagai supervisor dan penanggung jawab kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial ditempat magang. Dalam proses magang atau *job on the training*, fasilitator dan

penanggung jawab kelembagaan berperan sangat penting untuk mengawasi, mengarahkan, dan membimbing proses penerapan ilmu yang telah diterima selama pelatihan/ pendidikan. Proses magang itu sendiri, adalah sebuah proses pembelajaran mempraktikkan dalam dunia praktik pekerjaan sosial yang sebenarnya atau biasa kita kenal dengan istilah *on the job training*. Maka dalam pelaksanaan magang, seorang peserta harus bekerja sesuai dengan standar kompetensi nasional maupun internasional. Untuk memperoleh hasil maksimal atau sebagai upaya memperbaiki hasil yang lebih baik perlu juga diadakan diskusi dan mencatat proses hasil magang untuk melihat perkembangan hasil peningkatan kompetensi praktik pekerjaan sosial.

Dari gambaran tersebut di atas, esensi dari penerapan pendekatan *Apprenticeship* adalah proses pemberlajaran dilakukan dengan *Learning by Doing* (Belajar dengan melakukan) dengan mempraktikkan apa yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mempraktikkan namun mengadaptasi dan mereplikasi praktik kerja yang sudah ada. Untuk memperkuat pengembangan

kompetensi sesuai setting layanannya maka pekerja sosial harus memahami berbagai teori-teori perilaku. Selain hal tersebut, fasilitator juga harus mengingatkan kepada para peserta bahwa proses magang harus berorientasi pada proses dan hasil yang seimbang.

3. Model 3 *Structured Learning* (pembelajaran terstruktur)

Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang terstruktur. Terutama tersedianya modul atau materi. Ketersediaan moduler harus dilalui melalui proses analisis kebutuhan diklat (AKD) yang merekomendasikan kurikulumnya. Dari kurikulum inilah nantinya dikembangkan menjadi modul dengan metode pengajaran yang sistematis dan variasi. Proses pembelajaran seyogyanya juga menggunakan pendekatan simulasi, *role playing*, demonstrasi dsb. Diakhir sebuah proses pembelajaran perlu ada penilaian proses pembelajaran yang terstandar.

Dari gambaran tersebut seorang fasilitator dituntut memahami model-model pendidikan, teori belajar orang dewasa dan perlu ada proses pengamatan langsung. Jadi proses pembelajaran tidak bisa

murni e-learning, harus *blended learning*. Fasilitator juga harus mampu menyeimbangkan antara target hasil pembelajaran dengan prosesnya. Dua-duanya harus diperhatikan.

4. Model 4 *Managerial*

Pendekatan managerial difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi fasilitator untuk mampu merencanakan beban proses pembelajaran. Dalam proses fasilitasnya seorang fasilitator harus melakukan tranfer teknologi bagaimana merancang beban kerja yang akan dikerjakan oleh seorang peserta ketika kembali ditempat kerjanya. Tidak mudah merancang beban kerja, maka proses pembelajarannya juga mengutamakan peningkatan keterampilan yang diorientasikan kepada pemecahan masalah. Ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran ini diukur dari kemampuan fasilitator mengikuti prosedur pembelajaran. Selain itu kebijakan kelembagaan kesejahteraan sosial menentukan keberhasilan praktik pembelajaran.

Proses pembelajaran diarahkan kepada '*learning by doing*'; mengutamakan perlindungan klien; memfokuskan pada aturan-aturan berperilaku dan diorientasikan kepada hasil proses pembelajaran.

Dari keempat model tersebut, penulis akan meng-elaborasi dengan pemikiran apa yang disampaikan oleh Davies (1995:49), tentang “*Clients Point the Way: Eight Lesson to Learn*”. Pada prinsipnya harus memperhatikan keseluruhan langkah-langkah yang digagas oleh Davies, agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun menurut penulis, minimal pendidik/ fasilitator didalam menerapkan keempat model tersebut, mampu menerapkan minimal 3 langkah *Clients Point The Way: Eight Lesson to Learn*. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan langkah 7 yaitu selalu meng-update mengetahui. Penguasaan keempat model jelas membutuhkan pengetahuan yang lebih kompleks, apalagi dengan menggunakan pendekatan yang lebih variatif, seperti *learning by doing*, *on the job training*, magang dll yang tentunya seorang peserta didik akan dihadapkan proses pendidikan pada dunia realita. Maka tantangannyapun akan lebih realita, otomatis seorang fasilitator membutuhkan banyak dan variasi pengetahuan yang lebih kompleks.

Selanjutnya adalah penerapan langkah 8 yaitu mampu menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Karena sesungguhnya dalam dunia perubahan perilaku, pekerja sosial sebagai terapis harus dapat diterima dan

dapat diandalkan oleh kliennya. Kondisi ini akan memudahkan proses praktik pekerjaan sosial selanjutnya. Untuk itu fasilitator harus mampu memfasilitasi dan mengajarkan cara-cara agar keberadaan pekerja sosial bisa diterima dalam proses refungsionalisasi klien. Terakhir adalah mampu membangun ‘*the value of tangible help*’. Bila nilai ini akan berkembang, seorang pekerja sosial akan mampu mengembangkan kesadaran yang menempatkan klien adalah seorang yang membutuhkan pertolongan yang nyata dari mulai awal penerimaan sampai terminasi. Selanjutnya dengan demikian, penguasaan ketiga langkah akan berdampak pada penerapan penguasaan langkah-langkah selanjutnya. Pekerja sosial akan secara otomatis mengeksplorasi kemampuan lainnya terutama berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan baik klinis.

Dari keseluruhan metode pembelajaran yang digagas oleh Doel dan kolega di atas, secara teknis akan lebih dielaborasi lagi oleh widyaiswara sebagai fasilitator dengan menggunakan metode praktik pekerjaan sosial yang oleh Pincus dan Minahan (1973, p. xi) dikatakan, “*we both had been students and teachers in traditional social works method courses: casework, group work, and community organization.*”

1. *Prior Learning*

Aktivitas kedua yang harus diperhatikan dan menjadi *Prior Learning* adalah memahami pentingnya *previous experiences* (Doel *et al.*, 1996, p. 9). Dimana pada sesi ini seorang pendidik harus menggali berbagai pengalaman para peserta atau pengalaman fasilitatornya dan bahkan menggabungkan pengalaman keduanya. Penting menjadi catatan sasaran akhir dari proses pelatihan ini adalah para klien/KPM sehingga mereka disebut sebagai “customer” atau penerima manfaat dari proses pelatihan yang dijalankan. Menurut Egan (1990, p.17), *Clients are our customers and have every right to expect the best of service from us*”. (Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para peserta yang dapat mendukung proses pembelajaran. Cara atau metode yang digunakan bisa membangun komunikasi ke berbagai arah baik dengan tanya jawab maupun diskusi kelompok.

Menurut Doel *et al.* (1996, p. 10) ada beberapa pengalaman unik dalam proses belajar mengajar, namun mereka tidak menjelaskan lebih rinci pengalaman unik tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa beberapa pengalaman unik sebagai berikut: (a) *Experiences of Learning and teaching*, (b) *Experiences of Risk taking and challenge* (c) *Experiences of Difference and Diversity*, (d) *Experiences of*

Trauma and Crisis, (e) *Experiences of Success and Failure*, (f) *Experiences of Organizing time and Priorities* dan (g) *Experiences of Teams and Groups*.

Berbagai jenis pengalaman diatas, bisa menjadi referensi bagi para fasilitator untuk mengembangkan proses pengajaran. Fasilitator bisa memfasilitasi, mediasi dan menginisiasi tiap perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta. Contoh yang sederhana adalah fasilitator sendiri bisa mendiskusikan dan berbagi pengalaman dalam satu kelompok dan bisa mensintesis dengan pengalaman fasilitator itu sendiri.

Sehingga memanfaatkan keragaman pengalaman peserta bisa menjadi proses pengayaan peserta bahkan bagi fasilitator itu sendiri. Seperti berbagi: (a) pengalaman belajar dan mengajar; (b) pengalaman mengambil risiko dan tantangan; (c) pengalaman perbedaan dan keragaman; (d) pengalaman trauma dan krisis; (e) pengalaman sukses dan kegagalan; (f) pengalaman mengorganisir waktu dan prioritas; terakhir (g) pengalaman dalam tim dan grup.

Dari beberapa keragaman pengalaman tersebut diatas, seorang fasilitator dituntut untuk mampu mengambil manfaat dari berbagai keragaman pengalaman tersebut. Untuk itu seorang fasilitator ditahap awal harus mampu melakukan pengamatan kelas. Siapa pesertanya, apa pengalaman mereka, latar belakang

pendidikan, keterampilan teknisnya dan lainnya. Dengan mempunyai pengetahuan awal tentang kondisi kelas akan membantu fasilitator untuk mengelola kelas; mengembangkan teknis pembelajaran; dan mampu menggunakan metode pembelajaran yang lebih beragam.

Jadi tujuan akhir penerapan aktivitas kedua yaitu memahami pentingnya *previous experiences* perlu di-elaborasi. Karena akan memberi dampak dan manfaat yang luar biasa terutama buat lembaga dimana peserta diklat melaksanakan praktik pekerjaan sosialnya dan meningkatkan daya kemampuan dan keterampilan peserta diklat menerapkan metode dan teknik yang diperoleh selama proses pembelajaran. Bila merujuk dari pandangan Davies tentang “*Clients Point The Way: Eight Lesson to Learn*” maka ada dua penekanan, yaitu penekanan pada langkah pertama dan langkah keenam. Untuk penerapan langkah pertama, seorang fasilitator harus mendorong kepada para peserta, setelah kembali ke tempatnya bekerja untuk membantu lembaga meningkatkan layanan kesejahteraan sosial. Seperti membangun kesadaran publik tentang pentingnya layanan kelembagaan yang dapat memenuhi kebutuhan klien, mengurangi stigma terhadap kelembagaan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial); memberi edukasi kepada masyarakat bahwa LKS bisa

dijadikan rujukan dan menginformasikan pelayanan *multi task* lainnya.

Selanjutnya fasilitator juga harus mengingatkan pentingnya langkah 6 yaitu peserta sebagai seorang pekerja sosial mempunyai dua kekuasaan dan keistimewaan. Pertama pekerja sosial adalah bagian dari kelembagaan yang bisa menjembatani kepentingan klien. Dan kedua pekerja sosial harus mengutamakan kepentingan klien. Setelah menguatkan dua langkah tersebut maka penerapan langkah selanjutnya akan lebih mudah.

2. Involving Other

Aktivitas ketiga adalah *triangulations*. Doel *et al.* (1996, p.15) mengatakan bahwa triangulasi adalah cara berpikir tentang siapa yang harus kita libatkan saat mengumpulkan dan menyajikan bukti tentang kemampuan praktik mengajar kita. Pengajar harus mempunyai gambaran menyenangkan dari dunia pengajaran praktik dirancang untuk memicu gagasan tentang pendapat siapa yang mungkin kita cari. Lebih lanjut, Doel *et al.* (1996) mengatakan bahwa, tujuan perlunya aktivitas triangulasi ini adalah agar pendidik memperoleh gambaran kemampuan peserta, client atau pihak lain. Menurutnya, ada beberapa cara agar kita mampu membaca secara triangulasi seperti kemampuan membaca sumber referensi dari berbagai sumber; mampu membaca risiko/tantangan yang akan

dihadapi; dan pendidik juga harus mempunyai peta atau gambaran orang-orang yang mungkin bisa membantu proses pembelajaran praktik pekerjaan sosial.

Karenanya dalam posisi ini, menurut Doel *et al.* (1996), fasilitator berada di dalam *sea of practice teaching*, karena harus memperhatikan banyak hal, di antaranya: (a) *self view* (melihat diri sendiri); (b) *point of self delusion* (titik khayalan Diri); (c) *studentia* (peserta didik); (d) *collusion reef* (karang kolusi); (e) *client world* (dunia klien); (f) *rocks of overwork* (batuan kerja berlebihan); (g) *fog of obscurity* (kabut ketidakjelasan); (h) *colleague land* (kolegial); (i) *Cape practice assessor* (penilai praktik Cape); dan (j) *winds of ineffectiveness* (angin ketidakefektifan).

Agar aktivitas ketiga optimal maka perlu ada optimalisasi kemampuan fasilitator untuk mengelaborasi sistem sumber kelas dengan metode *self help group*. Wilson (1995, p.7) mengatakan "*story of four self help groups provide snapshots of a variety of group, introduce their distinctive flavour and illustrate some of their special ingredients.*" Maka secara garis besar media *self help grup*/kelompok dapat digunakan oleh widyaiswara sebagai fasilitator untuk memfasilitasi kelompok dengan keragaman dinamikanya, keragaman keunikan masing-masing kelompok dan bagaimana

kelompok bekerja untuk memberikan solusi pada anggotanya.

D. PENUTUP

Pendidik/fasilitator harus selalu membangun spirit dan kesadaran untuk mampu memberikan yang terbaik terhadap para siswa didiknya. Menurut Lilian Too (1997, p. 66) maka membangun spirit dan kesadaran diatas sebagai cara untuk membangun citra diri dan penegasan bahwa kita suka dengan gaya dan kompetensi kita. Itu menjadi *triger* bagi siapapun terutama widyaiswara sebagai pendidik untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan praktik pekerjaan sosial. Dampak yang diharapkan di kemudian hari adalah meningkatnya layanan praktik kesejahteraan sosial sesuai dengan apa yang dikatakan Jordan (1987, p. 7) bahwa negara yang berorientasi pada kesejahteraan warganya adalah negara yang mampu memberikan layanan, membangun arah kebijakan, dan advokasi yang diarahkan kepada rasa keadilan dengan memberikan layanan yang merata dan berkualitas.

Karena itu sebagai praktisi pendidikan pekerjaan sosial, seorang widyaiswara harus terus meng-*update* ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan hanya tentang pekerjaan sosial tapi ilmu lainnya sebagai komplementaritas. Keragaman dan keluasan ilmu akan

memberikan suasana pembelajaran akan terasa lebih dinamis. Semoga bermanfaat.

Referensi

- Davies, M. (1995). *The Essential Social Work (An Introduction to Profesional Practice)*. Third Edition. England: Arena.
- Doel, M., Shardlow, S., Sawdon, C., & Sawdon D., (1996). *Teaching Social Work Practice: A Programme of Exercises and Activities Towards the Practice Teaching Award*. Third Editon. England: Routledge.
- Egan, G. (1990). *The Skilled Helper, A Systematic Approach to Efffective Helping*. Fourth Edition. California: Brooks/Cole Publishig Company Pacific Grove.
- Ife, J. & Tesoriero, F., (2008). *Commnity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terj. Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, & M. Nursyahid. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jordan, B. (1987). *Rethinking Welfare*. First Published. Oxford, UK: Basil Blackwell.
- Midgley, J, (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Terj. Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Depag RI.
- Pincus, A. & Minahan, A. (1973). *Social Work Practice: Model and Method*. Second Printing. Itasca Illinois: Peacock Publiser Inc.
- Siporin, M. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Too, L., (1997). *Explore the Frontiers of Your Mind: Membangkitkan Pikiran Kreatif Anda*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Wilson, J. (1995). *How to Work with Self Help Groups: Guidelines for Profesionals*. England: Arena.

Supervisi terhadap Relawan Kemanusiaan (Studi Kasus pada Organisasi Masyarakat Relawan Indonesia)

Ahmad Shofwan Syaukani, Sri Sulastri, & Hadiano Achmad Rachim

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

E-mail: assyaukani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses supervisi dalam aspek administrasi, edukasi, dan dukungan yang dilakukan oleh supervisor atau pengurus dari organisasi Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi literatur dan dokumentasi serta observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesnya, supervisi yang dilakukan terhadap relawan saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lain berdasarkan konsep Harkness dan Kadushin. Proses supervisi yang dilaksanakan oleh supervisor juga disesuaikan dengan kondisi kepengurusan maupun karakteristik relawan MRI di tingkat wilayah dan daerah. Hal ini semakin menambah substansi pembahasan mengenai mekanisme supervisi terhadap relawan dalam organisasi relawan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh MRI sebagai salah satu organisasi relawan terbesar di Indonesia.

Kata kunci: Proses supervisi, relawan, organisasi relawan kemanusiaan.

Abstract

This study aims to identify and describe the supervision process carried out by supervisors or administrators of the Indonesian Volunteer Society (MRI) organization in terms of administrative, educational, and support aspects. This study used a qualitative method with a descriptive type of research. The techniques used were in-depth interviews, literature and documentation studies, and participatory observation. The results show that in the process, the supervision carried out on volunteers was interrelated from one aspect to another based on the concept presented by Harkness and Kadushin. The supervision process carried out by supervisors is also adjusted to the management conditions and characteristics of MRI volunteers at the local and regional levels. This adds to the substance of the discussion regarding the supervision mechanism of volunteers in humanitarian volunteer organizations that has been carried out by MRI as one of the largest volunteer organizations in Indonesia.

Keywords: Supervision process, volunteers, and humanitarian volunteer organization.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 *Charities Aid Foundation* (CAF), sebuah lembaga donor kemanusiaan asal Inggris mempublikasikan laporan *World Giving Index* yang dinilai dari aspek membantu orang yang tidak dikenal, donasi amal, dan menjadi sukarelawan (*Charities Aid Foundation*, 2018). Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati urutan pertama mengalahkan Australia, New Zealand, Amerika, dan Irlandia. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi kederewanan dan SDM relawan yang dapat dimanfaatkan oleh pegiat organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

Fakta tersebut didukung dengan adanya jumlah peningkatan organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang berbadan hukum di Kemenkumham selama tiga tahun terakhir, yaitu: (1) tahun 2017 berjumlah 321.482 organisasi; (2) tahun 2018 berjumlah 354.297 organisasi; dan (3) tahun 2019 berjumlah 397.497 organisasi. (*Mendagri: Ada 344 ...*, 30 Agustus 2017; *Kemendagri: 420.381 Ormas ...*, 1 Agustus 2019).

Fakta mengenai tumbuhnya organisasi sosial tidak terlepas dari sifat sukarelawan masyarakat Indonesia untuk saling membantu satu sama lain. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial

di setiap daerah merupakan wujud dari bentuk kontribusi dalam membantu sesama warga masyarakat. Selanjutnya, masyarakat ini yang dikenal sebagai relawan (*volunteer*), yaitu seorang individu yang secara sukarela menyumbangkan energi, waktu, pemikiran, harta dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan (dibayar).

Melihat potensi kerelawanan yang sangat besar, sebuah organisasi kerelawanan yang bernama Masyarakat Relawan Indonesia (selanjutnya disingkat MRI) berusaha untuk mewadahi dan memfasilitasi beragam kepedulian yang ditampilkan oleh para relawan dalam bingkai kemanusiaan. Tercatat sampai tahun 2020, MRI sudah memiliki kepengurusan yang tersebar di 330 kota/kabupaten seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat (nasional), wilayah (provinsi), daerah (kota/kabupaten), cabang (kecamatan), hingga ranting (kelurahan).

Selain itu, MRI sebagai organisasi kerelawanan memiliki mitra utama dalam menjalankan setiap aksinya, yaitu ACT sebagai sebuah lembaga kemanusiaan profesional yang memfokuskan kegiatannya pada program penanganan bencana, mulai dari bencana alam hingga bencana sosial yang mengakibatkan kerja sama dan pencapaian kedua lembaga tersebut tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, ACT pernah meraih penghar-

gaan dari *INews Maker Award* 2017 sebagai lembaga kemanusiaan terpopuler (*ACT Raih Penghargaan ...*, 22 Mei 2017). Selanjutnya, pada tahun 2018 ACT menerima penghargaan *Indonesia Corporate Public Relation (IPRA) Award* sebagai *The Most Popular Company in Foundation (Aksi Cepat Tanggap ...*, 17 Agustus 2018), dan pada tahun yang sama ACT meraih penghargaan dari *Gerakan Indonesia Beradab Award* sebagai salah satu organisasi *non-profit* yang menghimpun dan menyalurkan dana sosial bagi keberlangsungan keberadaban kemanusiaan (*ACT Raih Penghargaan ...*, 13 Agustus 2018). Dengan demikian, penghargaan yang diperoleh ACT tidak dapat terlepas dari peran relawan MRI dalam melakukan aksi sosial kemanusiaan.

Di samping itu, pada penelitian yang dilakukan Raharjo (2015) mengenai manajemen relawan pada organisasi pelayanan sosial dijelaskan bahwa sebagian besar dari organisasi sosial masih dikelola secara tradisional. Dalam arti bahwa secara struktur serta penyelenggaraannya masih bercirikan tradisional yang didominasi dan dikelola secara ‘kekeluargaan’ dengan dorongan ‘altruistik’. Faktor lainnya adalah masih minimnya penelitian yang membahas mengenai kerelawanan, mengakibatkan terbatasnya ketersediaan informasi yang berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dalam mening-

katkan kualitas manajerial organisasi dan pengelolaan sumber daya relawan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Raharjo (2015), menyebabkan peneliti ingin mengetahui bagaimana MRI mampu menjawab tantangan pengelolaan organisasi sosial yang pada umumnya masih bersifat tradisional dan kekeluargaan. Sebab apabila dikaitkan dengan keberadaan relawan dalam organisasi sosial, Dunn (1995) melihat bahwa para relawan harus dilatih; disupervisi; dicatat; dievaluasi dan dibimbing ketika kegiatannya tidak efektif.

Penentuan MRI sebagai lokasi penelitian disebabkan MRI telah menunjukkan kinerjanya dengan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk pengakuan profesionalitas dan keseriusan lembaga untuk dapat terlibat aktif dalam setiap aksi sosial kemanusiaan. Aktivitas supervisi sendiri merupakan bagian vital dalam proses manajemen pengelolaan organisasi sosial, dikarenakan supervisi termasuk ke dalam bagian integral dari praktik reflektif pekerjaan sosial (Fook, 1996). Konsep supervisi yang dimaksudkan mengacu pada pendapat Kadushin dan Harkness (2002) bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan mendelegasikan, mengkoordinasikan, menambah dan mengevaluasi performa pekerjaan supervise secara akuntabel. Pada implementasinya, tanggung jawab super-

visor mencakup pada ketiga aspek, yaitu aspek administrasi; aspek edukasi; dan aspek dukungan yang dibangun dalam interaksi dan hubungan yang positif dengan supervise.

Pada praktik pekerja sosial, seorang supervisor memberikan pendampingan sebagai proses penjaminan kepada pekerja sosial baru yang belum berpengalaman agar dapat beradaptasi dan siap bekerja di bidang pekerjaan sosial (Darwis, 2018). Sementara itu, supervisi terhadap relawan merupakan upaya organisasi pelayanan sosial untuk memperoleh SDM dalam pelaksanaan program pelayanan kepada penerima manfaat. Hal tersebut disebabkan karena relawan bersifat sukarela, serta bertugas sebagai pelopor di semua bidang pekerjaan sosial, tidak hanya dalam kelompok, tetapi juga dalam kerja kasus, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat (Friedlander, 1965). Tentunya pada penelitian ini, pihak yang menjadi supervise adalah relawan dengan berbagai macam latar belakang dan motivasi yang ingin mereka temukan ketika bergabung di organisasi MRI.

Selain itu, konsep supervisi memiliki sistem kerja yang mengharuskan kedua belah pihak untuk saling memberikan umpan balik formatif dan motivatif. Umpan balik ini berfungsi untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas hasil atau mengubah hal-hal yang sedang

terjadi. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mencari tahu bagaimana proses supervisi yang dilakukan supervisor MRI dalam aspek administrasi, aspek edukasi dan aspek dukungan berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Kadushin dan Harkness (2002). Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat berfungsi sebagai kajian akademis mengenai supervisi relawan bagi lembaga sosial maupun organisasi yang bergerak pada bidang relawan kemanusiaan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dalam menggambarkan proses supervisi yang dilakukan supervisor terhadap relawan MRI berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Selain itu, teknik penelitian yang dipakai adalah teknis studi kasus. Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan menerapkan kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh data primer, melakukan studi dokumentasi dan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder penelitian. Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif

dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan kerelawanan MRI selama kondisi pandemi Covid-19, sehingga karena beragam keterbatasan peneliti belum bisa mengikuti secara keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh MRI.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Supervisi Aspek Administrasi

Supervisi administrasi adalah salah satu aspek supervisi yang berhubungan dengan administrasi dalam konteks berjalannya suatu organisasi. Stein (1965) menggambarkan sebagai proses merumuskan dan mencapai tujuan dari organisasi melalui sistem yang terkoordinasi dan kooperatif. Bentuknya dapat berupa birokrasi organisasi yang rasional, efisien, dan efektif untuk mengkoordinasikan kerja sama pada orang-orang yang jumlahnya banyak, sekaligus upaya pemberian pelayanan yang dikembangkan melalui pendekatan institusional.

Pada aspek administrasi supervisor memainkan perannya sebagai seorang manajer (Kadushin dan Harkness, 2002). Selain itu, domain administrasi identik dengan manajemen dan merupakan implementasi metode administrasi yang memungkinkan pekerja sosial untuk

memberikan pelayanan efektif kepada klien (Pujileksono, 2018). Sehingga berdasarkan ungkapan informan, bahwa secara administrasi MRI memiliki tugas untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi relawan berdasarkan penjenjangan keanggotaan relawan MRI. Setidaknya ada beberapa pembahasan yang diteliti dalam supervisi administrasi, yaitu:

a. Rekrutmen dan Seleksi

Berdasarkan hasil temuan, mekanisme pendaftaran resmi relawan MRI dilakukan dengan berbasis website sebagai basis data terpadu keanggotaan relawan ke <https://membership.relawan.id//>.

Calon relawan yang mendaftarkan diri akan mendapatkan nomor anggota dan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh masing-masing kepengurusan MRI sesuai domisili relawan. Hal demikian dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan calon relawan untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kerelawanan.



Gambar 1. Prosedur pendaftaran relawan MRI berbasis website
Sumber: <https://membership.relawan.id/prosedur-pendaftaran>

Kegiatan orientasi bertujuan untuk proses awal pengenalan lembaga, kode etik relawan dan wawasan tentang kerelawanan, bahwa tidak adanya paksaan untuk mengikuti kegiatan kerelawanan. Hal ini menunjukkan bahwa ciri khas dari organisasi pelayanan sosial adalah sifat kerelawanannya yang kental, dimana istilah “*voluntary*” menunjuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan bebas atau secara sukarela, tanpa paksaan (Brown dan Korten, 1991). Namun, akibat pandemi Covid-19 banyak mekanisme orientasi harus dilakukan secara online tanpa mengurangi substansi kegiatan yang diberikan kepada calon relawan MRI.

Selain itu, orientasi relawan merupakan tahapan yang fundamental untuk menanamkan pola pikir, kode etik dan pemahaman

untuk senantiasa merawat keikhlasan dalam menjalankan setiap aksi relawan kemanusiaan. Kemudian tidak ada seleksi khusus bagi calon pendaftar, selama relawan memiliki komitmen untuk aktif dalam kegiatan MRI secara sukarela.

b. Pelantikan dan Penempatan

Relawan yang sudah mengikuti kegiatan orientasi diperbolehkan untuk mengikuti setiap aktivitas MRI, namun secara *de facto* proses pelantikan secara resmi akan dilaksanakan ketika relawan sudah mengikuti kegiatan *volunteer camp*, yaitu suatu pelatihan atau pendidikan dasar yang muatannya dilengkapi dengan teknik dan kegiatan simulasi dalam menangani kondisi bencana tertentu.

Kemudian dalam hal penempatan, informan mengungkapkan bahwa pengelompokan relawan dilakukan

berdasarkan cluster peminatan dan keahlian. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Kadushin dan Harkness (2002) bahwa menempatkan anggota dilakukan sesuai dengan keinginan dan kemampuan pekerja sosial dengan tujuan organisasi. Hal demikian dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan potensi relawan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MRI. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa relawan akan berpindah kluster sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing relawan.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ketertarikan relawan atas kesesuaian ruang kontribusi yang tersedia secara *bottom-up*, dengan harapan bahwa relawan akan mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal jika ditempatkan sesuai pilihan dan minat relawan.

c. Perencanaan kerja

Salah satu kegiatan yang MRI lakukan menjelang akhir tahun adalah rapat kerja organisasi. Informan menyatakan bahwa rapat kerja dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mengevaluasi kegiatan satu tahun sebelumnya.

Fungsi rapat kerja adalah momentum konsolidasi relawan dalam menyusun program kerja yang melibatkan perwakilan MRI wilayah, daerah maupun pihak terkait untuk mencari tahu kebutuhan relawan di lapangan. (Wawancara dengan MRI Pusat, Mei 2020).

Pada Anggaran Rumah Tangga MRI dijelaskan mengenai jenis rapat kerja yang dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu mulai dari tingkat nasional, wilayah, daerah, cabang hingga unit/kelompok kecil relawan. Hal penting lainnya, bahwa proses perencanaan program merupakan ranah kerja yang dilakukan oleh pengurus MRI, sehingga peran relawan secara umum terbatas dalam konteks pengambilan keputusan organisasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi relawan untuk bisa menyampaikan aspirasi maupun usulan program yang akan dilaksanakan pada tahun kegiatan selanjutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MRI sudah memiliki mekanisme dalam perumusan program kegiatan yang bersifat *bottom-up* berdasarkan hasil musyawarah relawan. Pelibatan relawan sangat dibutuhkan

dalam merumuskan program-program yang tepat sasaran, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi relawan kemanusiaan.

d. Penugasan kerja

Supervisor MRI adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penugasan kepada para relawan. Biasanya supervisor akan melihat beberapa aspek seperti keuangan waktu, kemampuan dan pengalaman sebagai bahan pertimbangan relawan yang akan ber-

tugas berdasarkan skala kegiatan pelaksanaan program. Selain itu, setiap relawan yang akan melakukan penugasan akan diberikan surat tugas sebagai tanda bukti bahwa relawan sedang menjalankan tugas kerelawanan maupun untuk mempermudah proses perizinan kepada stakeholder terkait. Peneliti coba rangkum penjelasan mengenai skala penugasan relawan MRI pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala penugasan relawan MRI

Aspek	Lokal (Kota)	Regional (Provinsi)	Nasional (Negara)	Internasional
Jumlah Sumber Daya Relawan	Tidak banyak	Diutamakan relawan yang sudah punya pengalaman	Berdasarkan seleksi dari perwakilan MRI lokal & regional	Diutamakan bagi pengurus atau staf MRI/ACT
Kompetensi Relawan	Tidak membutuhkan keahlian khusus	Penugasan berdasarkan kluster peminatan	Relawan dengan kompetensi spesifik & melibatkan banyak <i>stakeholder</i>	Bekerjasama dengan lembaga perwakilan negara terkait
Bentuk Kegiatan	Penggalangan dana, asesmen program, dsb.	Bencana alam, SAR, dsb.	Bencana alam, konflik sosial	Program Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam (SKDI)

e. *Monitoring* dan evaluasi

Setelah memberikan tugas maupun mendelegasikan pekerjaan, supervisor memiliki tanggung jawab lebih lanjut untuk melakukan pe-

mantauan berdasarkan laporan lisan, catatan, dan statistik dari supervise serta penggunaan waktu oleh supervise (Harkness dan Kadushin, 2002). Kegiatan *moni-*

toring yang dilakukan tentu saja dilakukan dalam setiap pelaksanaan program, mulai dari skala penugasan tingkat lokal hingga internasional.

Minimal laporan kegiatan dilakukan dengan format 5W+1H (*What, Who, Why, When, Where* dan *How*) yang ditambahkan dokumentasi pasca kegiatan. (Wawancara dengan MRI Temanggung, Juli 2020)

Laporan yang didokumentasikan berfungsi untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program. Selain itu, monitoring juga dilakukan untuk memunculkan rasa kepercayaan dari publik sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan.

f. Koordinasi kerja

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi kerja dilakukan seiring dengan kebutuhan dari organisasi. Misalnya ketika penanganan bencana skala nasional, mengharuskan MRI dan ACT untuk berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari BNPB, TNI, masyarakat sipil, kementerian/lembaga pemerintah serta organisasi sosial kemanusiaan

lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya sinergi dan kolaborasi dalam proses penanganan bencana alam.

Tidak hanya dalam penanganan bencana, melakukan koordinasi dengan komunitas di luar MRI merupakan langkah yang tepat untuk menjaga eksistensi organisasi. Kondisi MRI yang terbatas mengharuskan supervisor harus mau membuka hubungan dengan pihak eksternal dalam mengimplementasi program sosial kemanusiaan.

Kolaborasi bagi pengurus MRI yang tidak memiliki banyak relawan adalah hal wajib dan perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi organisasi. (Wawancara dengan MRI Temanggung, Juli 2020).

Dharma (1985) menjelaskan bahwa tanggung jawab utama seorang supervisor adalah mencapai hasil sebaik mungkin dengan mengkoordinasikan sistem kerja pada unit kerjanya secara efektif. Akan tetapi, menurut ungkapan salah satu informan dari MRI Pusat bahwa secara umum MRI masih terus memperbaiki pola koordinasi karena cakupannya yang sangat luas, walaupun di beberapa MRI wilayah maupun daerah sudah memiliki

alur koordinasi yang cukup efektif satu sama lain.

g. Fungsi komunikasi

Kadushin dan Harkness (2002) menjelaskan bahwa tugas supervisor adalah rantai dalam komunikasi, baik itu secara vertikal maupun horizontal kelembagaan dan instansi lain. Namun berdasarkan hasil penelitian, para supervisor sudah melakukan upaya untuk membangun komunikasi yang efektif, walaupun masih belum optimal secara keseluruhan. Hal ini dapat ditemukan bahwa pola komunikasi yang dilakukan adalah terkonsentrasi dari MRI Pusat secara demokratis dengan mengedepankan aspek keterbukaan informasi dan aspirasi dari para relawan.

Semua informasi mengenai kebijakan organisasi tersentralisasi dari MRI Pusat. Sentralisasi dilakukan supaya semua wilayah dapat menjalankan arahan dari pengurus pusat. Namun jika ada ketidaksesuaian kebijakan, pengurus wilayah maupun daerah akan mengkomunikasikannya secara *bottom-up* kepada MRI Pusat. (Wawancara dengan MRI Jogja, Juni 2020)

Pada kondisi tersebut, relawan harus memahami pola komunikasi yang sifatnya instruktusional untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang

optimal dan sesuai dengan harapan supervisor. Selain itu, MRI juga sudah memiliki alur komunikasi dengan pihak ACT ketika akan atau sedang melaksanakan program kemanusiaan, mulai dari proses perencanaan hingga penggunaan metode briefing untuk meminimalkan adanya miskomunikasi dengan para relawan.

Dengan demikian, peneliti menganggap bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh supervisor sudah mendorong relawan untuk mampu berpartisipasi aktif dalam organisasi MRI. Namun, tetap perlu adanya optimalisasi komunikasi yang dititik beratkan oleh MRI Pusat.

h. Supervisor sebagai advokat, penyangga administrasi, dan agen perubahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisor MRI sudah berusaha secara maksimal dalam menjalankan tugas untuk mengedepankan kepentingan para relawan. Mulai dari mencari tahu kebutuhan yang perlu diterjemahkan dalam rencana kegiatan, hingga proses pelatihan relawan yang sudah terkelola sebanyak 10 persen dari total 50.000 relawan terdaftar di seluruh Indonesia. Walaupun, secara ideal informan mengakui belum bisa mengako-

modir semua kebutuhan relawan MRI.

Masih banyak jeritan hati relawan yang belum bisa pengurus pusat fasilitasi secara optimal. Kami juga memahami keterbatasan tersebut, sehingga menjadi sangat penting sinergi dengan seluruh pengurus MRI di tingkat nasional, wilayah dan daerah dalam menampung aspirasi para relawan. (Wawancara dengan MRI Pusat, Juni 2020).

Kemudian tidak hanya advokasi, supervisor juga harus melindungi organisasi dari penyimpangan dan tindakan kesewenangan dari pimpinan organisasi maupun masyarakat. Disampaikan dari hasil wawancara dengan informan, bahwa pernah terjadi kasus pelanggaran kode etik organisasi yang dilakukan oleh oknum yang menggunakan rompi relawan untuk kepentingan pribadi. Sehingga pasca kejadian tersebut, supervisor langsung memberikan sanksi dan menjadi lebih hati-hati dalam memberikan atribut relawan untuk mencegah tindakan serupa terjadi kembali. Fenomena tersebut merupakan pembelajaran berharga yang dapat dimaknai bagi para pegiat organisasi relawan kemanusiaan, untuk mampu mendisiplinkan setiap pelanggaran kode etik organisasi

oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Setiyawati *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa para pekerja sosial dan organisasi sama-sama saling membutuhkan; para pekerja dipahami sebagai anggota organisasi lainnya dalam organisasi, termasuk pengguna jasa; dan organisasi merupakan lokasi strategis untuk berpartisipasi dalam proses pembaruan dan perubahan. Dengan demikian dari semua upaya yang telah supervisor lakukan, peneliti menilai bahwasannya supervisor memiliki semangat perubahan dan perbaikan yang nampak pada setiap perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program untuk menjadikan MRI lebih baik lagi setiap harinya.

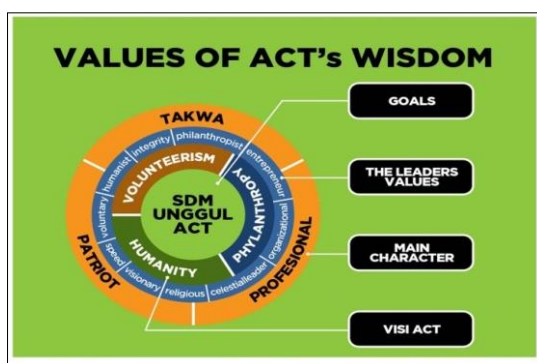
2. Supervisi Aspek Edukasi

Kadushin dan Harkness (2002) menjelaskan aktivitas supervisor sebagai guru dalam konteks supervisi edukasi meliputi kegiatan mengajar, memfasilitasi pembelajaran pelatihan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, menginformasikan, mengklarifikasi dan membimbing, membantu pekerja menemukan solusi, meningkatkan profesionalitas, memberi nasehat, menyarankan dan membantu pekerja memecahkan masalah. Domain tersebut bermakna bahwa supervisi berfokus pada pengembangan kapasitas pekerja

sosial melalui supervisi (Pujileksono, 2018).

Berdasarkan hasil temuan lapangan, supervisi edukasi dilakukan secara terpadu oleh Global Volunteer Academy (GVA), yaitu salah satu unit yang dirancang khusus oleh MRI Pusat untuk mengoptimalkan proses edukasi kepada seluruh relawan MRI. Beberapa program yang sudah pernah dilaksanakan di

antaranya seperti serial kajian relawan (sekawan), *volunteer class online* (volcano), *volunteer academy class* (VAC) serta program pengembangan dan pelatihan lainnya. Hal menarik lainnya adalah semua kegiatan dapat disaksikan melalui media sosial youtube, guna memanfaatkan teknologi demi menjangkau relawan yang tersebar di seluruh Indonesia.



Gambar 2. *Framework Value of ACT's Wisdom*

Landasan kurikulum edukasi yang dilakukan bersumber dari buku berjudul *The Values of ACT's Wisdom: THE LEADERS* karangan Nurrohman *et al.* (2020). Kurikulum yang dimaksud mencakup aspek akal, jasmani dan ruhani bagi seluruh relawan MRI. Selain itu, proses pelatihan dan pengembangan sengaja didesain berdasarkan penjenjangan keanggotaan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki relawan. Hal ini berdampak pada aspek administrasi, yaitu berkaitan dengan penugasan relawan dalam melaksanakan implementasi prog-

ram. Berikut penjelasan penjenjangan keanggotaan relawan MRI, yaitu:

- a. Anggota pemula adalah anggota biasa yang telah terdaftar secara resmi dan memperoleh verifikasi dari pengurus pusat setelah mengikuti kegiatan rekrutmen, baik pada kegiatan orientasi relawan maupun *volunteer camp*.
- b. Anggota terampil adalah anggota biasa yang telah mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar), Pendidikan Menengah (Dikmen), dan Pendi-

dikan Khusus (Diksus) yang sesuai dengan kluster kerelawanannya.

- c. Anggota ahli adalah anggota biasa yang telah memenuhi seluruh kualifikasi pendidikan jenjang anggota terampil dan menuntaskan program *volunteer leadership camp* dan *volunteer leadership class*.

Peneliti hendak berpartisipasi dalam salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh GVA. Manfaat yang peneliti dapatkan pasca mengikuti kegiatan, bahwa peneliti semakin menyadari akan pentingnya memiliki kompetensi dalam aktivitas kerelawanan. Ternyata hal ini sejalan dengan yang disampaikan Pujileksono (2018) bahwa pada aspek edukasi dalam kegiatan supervisi, memungkinkan supervise untuk memahami pekerjaan dan tugasnya, lebih sadar diri (*self-awareness*), dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan-pilannya.

3. Supervisi Aspek Dukungan

Supervisor sebagai seorang pemimpin memiliki dua variabel yang harus diperankan dalam aktivitas supervisi, yaitu berfokus pada penyelesaian tugas (*task-oriented*) dan memberikan motivasi kepada anggota tim (*people-oriented*) untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Hal ini senada dengan ungkapan Kadushin dan Harkness (2002),

yaitu komponen supervisi dukungan berfokus pada *people-oriented*, sedangkan supervisi administrasi dan edukasi berfokus pada *task-oriented*. Sehingga pembahasan mengenai supervisi dukungan secara fundamental meliputi upaya peningkatan motivasi, komitmen dan kepuasan kerja supervisi.

Berdasarkan hasil penelitian, supervisor MRI cenderung menggunakan pendekatan spiritual untuk memotivasi kembali semangat para relawan, mulai dari bentuk kegiatan *sharing session* yang diselenggarakan oleh GVA maupun acara informal seperti pergi wisata bersama sebagai bentuk pengapresiasian diri kepada para relawan. Pendekatan lain yang menarik adalah interaksi yang dibangun oleh supervisor MRI adalah hubungan kerelawanan, yaitu peran dan tugas supervisor sebagai relawan tetaplah sama dan sederajat satu sama lain. Hal tersebut didukung dengan gaya kepemimpinan supervisor yang bertipe demokratis, artinya supervisor MRI selalu membuka dialog dengan relawan, sehingga hubungan diantara keduanya terlihat akrab, saling mempercayai serta berjalan dengan baik dan harmonis.

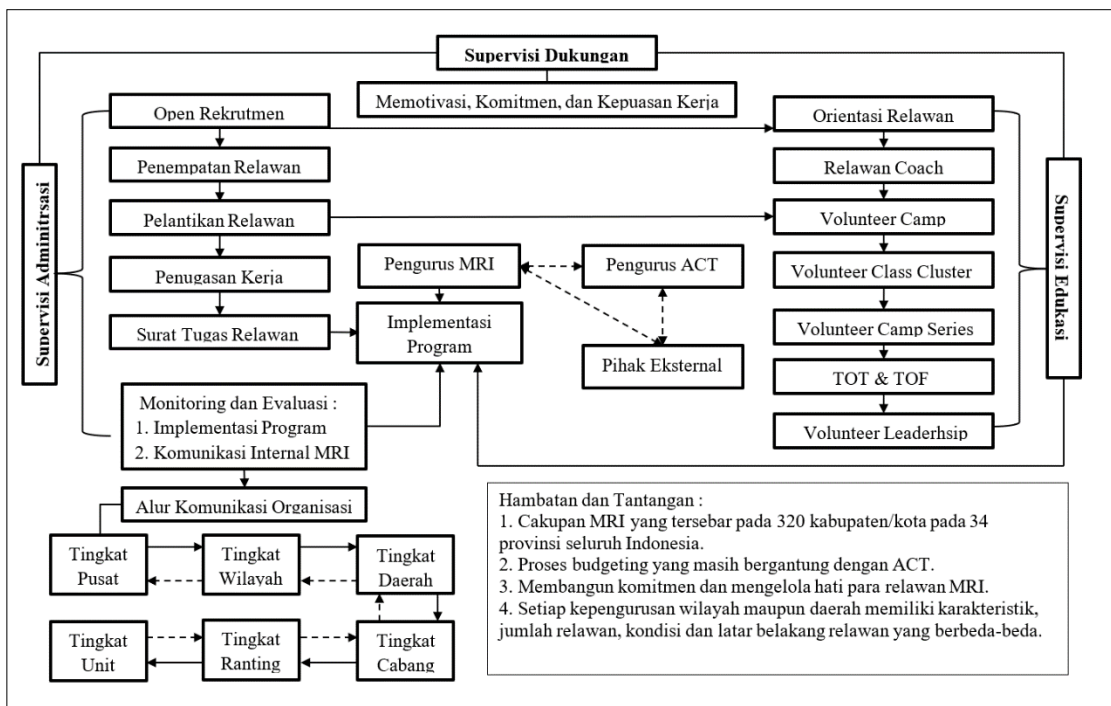
Nilai keikhlasan merupakan poin penting yang harus selalu diingatkan kepada para relawan MRI sebagai sumber utama dalam menjalankan aktivitas kemanusiaan. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, setidaknya terdapat tiga

upaya yang bisa dilakukan untuk merawat komitmen para relawan MRI yaitu:

- a. Senantiasa menjadikan aktivitas kerelawanan sebagai ibadah untuk mencari keridhoan Allah Swt.
- b. Menjadikan setiap peristiwa sebagai semangat dalam menjalankan kehidupan. Semakin sering relawan terlibat, maka akan semakin sering pula relawan dapat melatih ke-

pekaan hati untuk terus menolong orang lain.

- c. Menjauhi sifat *hubbuddunya* (men-cintai dunia secara berlebihan), sebab relawan tidak perlu menjadi orang penting, karena bagain yang terpenting adalah amal kebairkannnya.



Gambar 3. Proses supervisi relawan pada organisasi MRI

Ketiga poin tersebut selalu ditanamkan MRI sebagai upaya untuk merawat hati dan konsistensi relawan untuk terus terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Terakhir, peneliti

akan memberikan gambaran dalam bentuk Gambar 3 mengenai proses supervisi relawan yang telah dilakukan oleh MRI berdasarkan konsep supervisi dari Kadushin dan Harkness (2002).

D. PENUTUP

Berdasarkan paparan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam prosesnya, supervisi yang dilakukan terhadap relawan MRI saling berkaitan antar satu aspek dengan aspek yang

lainnya. Selain itu, proses supervisi yang dilaksanakan juga menyesuaikan dengan kondisi kepengurusan dan karakteristik relawan, sehingga semakin memperkaya substansi pembahasan mengenai supervisi terhadap relawan dalam organisasi relawan kemanusiaan.

Referensi

ACT Raih Penghargaan iNews Maker Awards 2017 (22 Mei 2017). Diakses dari <https://news.act.id/berita/act-raih-penghargaan-inews-maker-awards-2017> (30 Mei 2021).

ACT Raih Penghargaan Peradaban GIB Awards 2018 (13 Agustus 2018). Diakses dari <https://news.act.id/berita/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-2018> (30 Mei 2021)

Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kembali Raih IPRA Award 2018 (17 Agustus 2018). Diakses dari <https://www.kanalkalimantan.com/aksi-cepat-tanggap-act-kembali-raih-ipra-award-2018/> (30 Mei 2021)

Charities Aid Foundation (2018). *CAF World Giving Index 2018: A Global View of Giving Trends*. Inggris: The Charities Aid Foundation.

Dharma, A. (1985). *Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis bagi Para Supervisor*. Jakarta: Raja Persindo Persada.

Dunn, P.C. (1995). *Volunteer management*. Washington DC: Encyclopedia of Social Work.

Fook, J. (1996). *The Reflective Researcher: Social Workers' Theories of Practice Research*. Sydney, Australia: Allen & Unwin,

Friedlander, W. (1965). *Concept and Methodes of Social Work*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

<https://membership.relawan.id/prosedur-pendaftaran> (30 Mei 2021).

Kadushin, A. & Harkness, D. (2002). *Supervision in Social Work*. New York: Columbia University Press.

Kemendagri: 420.381 Ormas Terdaftar di Indonesia (1 Agustus 2019). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/01/18223501/kemendagri-420381-ormas-terdaftar-di-indonesia>

Mendagri: Ada 344 Ribu Ormas yang Terdaftar tapi Tak Berbadan Hukum (30 Agustus 2017). <https://news.detik.com/berita/d-3621869/mendagri-ada-344-ribu-ormas-yang-terdaftar-tapi-tak-berbadan-hukum>

- Nurrohman, Ihsan, M., Wibowo, B.S., & Kusaeri, M.A. (2020). *The Values of ACT's Wisdom: THE LEADERS*. Jakarta: Aksi Cepat Tanggap.
- Pujileksono, S. (2018). *Metoda Supervisi Pekerja Sosial. Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial: Seni Menjalani Profesi Pertolongan*. Malang: Intrans Publishing & Wisma Kalimetro.
- Raharjo, S.T. (2015). *Manajemen Relawan: Model Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Relawan pada Organisasi Pelayanan Sosial*. Jatinangor: Unpad Press.
- Setiyawati, E., Raharjo & Fedryansyah (2016). *Pelayanan Sosial: Faith Based Organization*. Sumedang: Unpad Press.
- Stein, H.D. (1965). *Theory for Social Work Practice*. New York: Columbia University Press.

Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger Cipayung Jakarta Timur

Nana Amalia¹, Elly Susilowati², & Rini Hartini Rinda Andayani³

Mahasiswa Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

¹Email: nanaamalia9@gmail.com

² Email: ellya_stks@yahoo.com

³Email: rini_stks@yahoo.co.id

Abstrak

Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis pada anak asuh, seperti kebutuhan anak asuh akan kasih sayang dan perhatian akan membuat anak asuh kesulitan mengontrol emosi dan perilakunya. Keadaan psikologis anak asuh akan berdampak pula pada kehidupan sosialnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa nyaman dan aman anak asuh dengan pengasuh/orang tua penggantinya, bagaimana tanggapan mereka terhadap pengasuh/orang tua penggantinya dan bagaimana peran pengasuh/orang tua pengganti tersebut dalam pembentuk kondisi psikososial anak asuh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 97 anak dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan jumlah sampel penelitian ini adalah 67 responden yang ditentukan melalui teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, observasi dan studi dokumentasi. Alat ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan tingkat pengukuran ordinal. Dalam mengukur kevaliditasan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas muka. Sedangkan uji reliabilitas, peneliti melakukannya kepada 10 responden dengan hasil nilai alpha sebesar 0,896. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kondisi biologis responden adalah 70,43 persen, kondisi psikologis adalah 63,12 persen, sedangkan kondisi sosial adalah 63,28 persen.

Kata kunci: Pengasuhan alternatif, Panti Sosial Asuhan Anak, dan psikososial.

Abstract

Unfulfilled psychological needs in foster children, such as foster children's needs for love and attention, will make them difficult to control their emotions and behavior. The psychological state of the foster children will also have an impact on their social life. The purpose of this study is to find out whenever a foster care child is comfortable and safe with the substitute caregiver/parent, how they respond to the caregiver/substitute parent and how the caregivers play their role as parent in shaping the psychosocial condition of the foster child. This research was conducted using a descriptive method with quantitative approach. The number of population in this study was 97 boys. Meanwhile, the number of samples was 67 respondents determined through simple random sampling technique. The data techniques

used in this study were questionnaires, observation and documentation study. The measuring instrument that researchers use in this study is a measuring instrument developed by researchers using an ordinal level of measurement. In measuring the validity of the measuring instrument used in this study is the validity in advance. While the reliability test, the researcher did the 10 respondents with the alpha value of 0.896. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics. The results show that the psychological condition of the respondents is 70.43 percent, the psychological condition is 63.12 percent, while the social condition is 63.28 percent.

Keywords: *Alternative care, Childcare Social Institution, and psychosocial.*

A. PENDAHULUAN

Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dan hak-hak yang harus dilindungi dalam hidupnya, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangannya (Tristanto, 2020). Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat mereka penuhi dengan bantuan dari diri mereka sendiri dan dari lingkungannya. Salah satu lingkungan yang dimaksud adalah keluarga anak.

Keluarga merupakan sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan anak dan melindungi hak-hak anak. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak. Orang tua bertugas untuk memberikan pengasuhan terhadap anak. Sayangnya tidak semua anak dapat tinggal bersama orang tuanya. Beberapa dari mereka hanya mempunyai satu orang tua, kehilangan kedua orang

tuanya, dan bahkan ada pula yang sama sekali tidak mempunyai anggota keluarga (hidup sebatang kara).

Tidak adanya orang tua maupun sanak saudara yang dapat mengasuh mereka, membuat kebutuhan dan hak-hak anak tersebut tidak dapat dipenuhi. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah keterlantaran pada anak. Keadaan yang demikian akan membuat kebutuhan dan hak anak menjadi tidak terpenuhi, sehingga anak harus mendapatkan pengasuhan alternatif dari pihak lain agar kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Pengasuhan Anak* (Permensos 21/2013) dijelaskan bahwa pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis residensial. Pengasuhan alternatif dapat mereka terima salah satunya dengan cara memasukkan anak ke dalam panti. Pengasuhan dalam panti merupakan

pengasuhan alternatif terakhir bagi anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya.

Anak-anak dalam pengasuhan dalam panti tentunya mempunyai kondisi psikososial yang berbeda dengan anak yang tinggal dengan orang tua dan diasuh oleh orang tua kandung mereka. Penelitian *Save the Children* dan Kementerian Sosial tentang Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak tahun 2007 dalam Permensos 30/2011 memberikan gambaran tentang situasi anak di dalam panti. Sisi yang menyenangkan bagi anak yang tinggal di panti diantaranya mereka mempunyai banyak teman, sedangkan bagian yang menyedihkan adalah kenyataan bahwa mereka jauh dari keluarga mereka, makanan yang buruk, keharusan bekerja di panti, dan aturan yang ketat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kehidupan mereka di sekolah. Sekolah memberikan sumbangan kekhawatiran terhadap anak akan masa depannya. Umumnya, mereka mencemaskan kondisi mereka setelah mereka lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Kecemasan ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pada saat mereka di panti, ketidakdekatan dengan keluarga dan kehilangan teman di lingkungan rumah serta panti saat harus keluar panti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa penempatan anak di panti akan mengganggu kondisi

psikososialnya terutama kondisi psikologis anak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger. Dari observasi awal tersebut diketahui bahwa anak-anak dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger cenderung hanya mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiknya saja. Mereka tidak mendapat pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang dan pengasuhan yang baik dari pengasuh/orang tua penggantinya. Pengasuhan yang baik tersebut seperti, selalu mendengarkan pendapat anak, tidak memperlakukan anak secara kasar, dan membentuk relasi yang baik dengan anak. Hal ini disebabkan kurangnya kelekatan dan kedekatan anak asuh dengan pengasuh/orangtua pengganti. Ketidaklekatan dan ketidakdekatan tersebut akibat dari kurangnya komunikasi di antara mereka, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan psikologis anak yang kemudian akan berdampak pada kondisi sosialnya.

Beberapa contoh gangguan kondisi psikososial pada anak dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger yaitu perilaku anti sosial, menarik diri, malas, membangkang, berkata kasar, merokok dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebersihan dirinya. Menurut Tungga (2013, p.15) psikososial yaitu

perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan sosial pada sisi lain. Teori ini memperhitungkan pola-pola perkembangan individual yang muncul dari proses biopsikososial.

Kondisi anak asuh di PSAA Putra Utama 3 Ceger berdasarkan aspek biologisnya yaitu tubuh terlihat kurus namun masih tergolong normal. Kurangnya perhatian sebagian anak asuh terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya, seperti kesehatan gigi dan mulut, tempat tidur, kamar mandi, dan pakaian yang mereka kenakan, sehingga mereka mudah terserang penyakit.

Kondisi anak asuh jika dilihat dari aspek psikologisnya yaitu anak merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari pengasuh/orang tua penggantinya. Hal ini membuat anak asuh kesulitan mengontrol emosi dan perilakunya. Keadaan psikologis anak asuh akan berdampak pula pada kehidupan sosialnya.

Kondisi anak asuh di PSAA Putra Utama 3 Ceger dilihat dari aspek sosialnya yaitu sebagian anak asuh mempunyai hubungan yang kurang baik dengan teman dan pengasuhnya. Perilaku tersebut seperti, sering berkata kasar, sering menjadi korban atau pelaku *bully*, beberapa

responden juga menunjukkan perilaku menarik diri karena takut diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya, merasa kurang dekat dan nyaman dengan pengasuh, serta sering diperlakukan kasar oleh pengasuh.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger. Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana kondisi psikososial anak setelah mendapatkan pengasuhan alternatif dari pengasuh/orang tua penggantinya. Peneliti ingin mengetahui seberapa nyaman dan aman anak asuh dengan pengasuh/orang tua penggantinya, bagaimana tanggapan mereka terhadap pengasuh/orang tua penggantinya dan bagaimana peran pengasuh/orang tua pengganti tersebut dalam membentuk kondisi psikososial anak asuh.

Peneliti berharap setelah diadakannya penelitian yang berjudul “Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger Cipayung Jakarta Timur” ini akan banyak orang yang mengetahui kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori tentang praktik pekerjaan sosial dan dapat dijadikan salah satu

bahan referensi dalam melakukan praktik atau penelitian pekerjaan sosial yang berkaitan dengan kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif.

B. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah anak-anak dalam pengasuhan alternatif, berusia 12 sampai 18 tahun, berasal dari keluarga kurang mampu, anak yatim piatu, yatim, piatu, dan hidup dari panti ke panti serta tinggal di PSAA Putra Utama 3 Ceger. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 97 anak dengan jenis kelamin laki-laki. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2014, p. 122) *simple random*

sampling adalah “teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”

Peneliti menggunakan teknik tersebut karena teknik ini cocok dan tepat jika digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dengan teknik ini akan menghasilkan nama-nama anak secara *random*. Peneliti memutuskan tidak mengambil sampel sesuai jumlah sampel yang ada karena jumlah populasi dianggap terlalu besar jika akan dijadikan sampel. Pengambilan sampel dengan teknik ini menggunakan rumus dari Isaac dan Michael.

Penelitian ini mempunyai jumlah populasi (N) sebanyak 97 anak dan tingkat kesalahan 5 persen, maka sampel dari penelitian “Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger” adalah 67,037. Perhatikan Gambar 1.

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} = \frac{3,841 \times 81 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2(81-1) + 3,841 \times 0,5 \times 0,5} = 67,037$$

Gambar 1. Perhitungan sampel penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 67,037 jika dibulatkan

akan menjadi 67 anak dengan jenis kelamin laki-laki. Pengambilan sampel sebanyak 67 anak ini dilakukan dengan melihat kondisi dan situasi anak asuh di

PSAA Putra Utama 3 Ceger. Anak asuh yang dijadikan sampel dalam penelitian ini merupakan anak asuh yang sedang dalam kondisi baik/sehat dan memungkinkan untuk mengisi angket penelitian atau sedang memiliki waktu luang, seperti sedang tidak mengerjakan PR atau aktivitas penting lainnya. Enam puluh tujuh sampel ini diharapkan mampu memberikan peneliti informasi tentang kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, observasi dan studi dokumentasi. Alat ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan tingkat pengukuran ordinal. Pengukuran ordinal menurut Soehartono (2011, p.76) merupakan pengukuran yang menggolongkan objek penelitian dalam golongan-golongan yang berbeda, artinya golongan tersebut diketahui lebih tinggi atau lebih rendah. Penelitian ini menggunakan lima penggolongan (alternatif jawaban) yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), kurang setuju (KS), dan tidak setuju (TS). Instrumen yang peneliti buat menggunakan pernyataan bernilai positif dan

bernilai negatif. Pernyataan bernilai positif mempunyai nilai 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan pernyataan bernilai negatif bernilai sebaliknya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Peneliti menggunakan pernyataan positif dan negatif dalam penelitian ini, sehingga nilai secara berurutan dari setiap tanggapan yang peneliti gunakan (SS, S, R, KS, dan TS) yaitu 5, 4, 3, 2, dan 1, dan begitu sebaliknya. Penggunaan pernyataan positif dan negatif ini bertujuan untuk melihat kekonsistensian responden dan agar responden tidak secara asal memberikan tanggapan.

Dalam mengukur validitas, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas muka. Sedangkan uji reliabilitas, peneliti melakukannya kepada 10 responden yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan calon responden yang akan peneliti teliti, yaitu responden laki-laki berusia 12 sampai 18 tahun, duduk di bangku SMP dan SMA, serta tinggal di dalam panti. Peneliti melakukan uji reliabilitas di Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Bandung. Tabel 1 dan Tabel 2 adalah hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan cara *Alpha Cronbach* dengan bantuan program komputer SPSS 2.3.

Tabel 1. *Case processing summary*

		N	Persentase (%)
Cases	Valid	10	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	10	100,0

Listwise deletion based on all variables in the procedure

Tabel 2. *Reliability statistics*

Cronbach's Alpha	N of Items
,896	80

Berdasarkan kedua tabel di atas, uji reliabilitas yang dilakukan kepada 10 orang responden menunjukkan nilai alpha sebesar 0,896. Menurut Sebastian Rainsch jika nilai alpha $> 0,7$ artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*) sementara jika alpha $> 0,80$ ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh item pada instrumen kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger memiliki reliabilitas yang kuat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, p.147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalis. Dalam penelitian ini, hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah mengelompokan data berdasarkan jawaban instrumen, mentabulasi data berdasarkan jawaban instrumen, dan melakukan perhitungan untuk jawaban rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Lokasi Penelitian

PSAA Putra Utama 3 Ceger adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan sosial berupa perawatan, pengasuhan dan pembinaan bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial, terutama keterlantaran. Panti ini

beralamat di jalan Bina Marga RT 02/RW 04 nomor 57 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan berdiri sejak tahun 1993 dengan luas tanah 12.000 m² dan luas bangunan 2.300 m². Sebelum menjadi panti sosial asuhan anak, panti ini merupakan panti yang dikhususkan bagi orang-orang yang menderita penyakit kusta dan panti rehabilitasi hasil dari razia. Banyak masyarakat lingkungan sekitar panti yang tidak setuju ketika panti ini didirikan bagi orang yang mempunyai penyakit kusta, sehingga pada tahun 1996 panti kusta ini diganti menjadi panti sosial asuhan anak. Sejak tahun 1996 sampai sekarang panti ini juga telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan administrasi sebelum akhirnya menjadi PSAA Putra Utama 3 Ceger (*Profil PSAA Putra Utama 3 Ceger*, 2016).

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	12	0	0.00
2	13	6	8.96
3	14	5	7.46
4	15	15	22.39
5	16	10	14.93
6	17	21	31.34
7	18	10	14.92
Jumlah		67	100.00

Berdasarkan Tabel 3, usia responden berkisar antara 13 sampai 18 tahun. Hal ini dikarenakan anak asuh PSAA Putra Utama 3 Ceger

2. Analisis Deskriptif Data Responden

Karakteristik responden dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, dan latar belakang masuk ke panti.

- a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, seluruh responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini karena PSAA Putra Utama 3 Ceger hanya memberikan pelayanan bagi WBS berjenis kelamin laki-laki.

- b. Karakteristik responden berdasarkan umur/usia

Karakteristik responden berdasarkan umur/usia dapat dilihat pada Tabel 3.

berusia 12 sampai 18 tahun atau anak yang bersekolah SMP sampai SMA.

- c. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini yaitu, SMP atau sederajat sebanyak 34 anak dan SMA atau sederajat sebanyak 33 anak.

- d. Karakteristik responden berdasarkan keberadaan keluarga

Berdasarkan keberadaan keluarganya karakteristik responden peneliti dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik responden berdasarkan keberadaan keluarga

No.	Kaberdadaan keluarga	Jumlah	Persentase (%)
1	Lengkap	25	37.31
2	Yatim	7	8.96
3	Piatu	3	4.48
4	Yatim piatu	2	2.99
5	Bercerai	15	22.39
6	Terlantar	15	22.39
Jumlah		67	100.00

Berdasarkan Tabel 4, mayoritas responden peneliti masih memiliki orang tua yang lengkap. Kebanyakan anak asuh masuk ke panti bukan karena mereka yatim, piatu atau tidak mempunyai orang tua, melainkan karena kondisi ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang memasukkan anaknya ke PSAA Putra Utama 3 Ceger berharap anaknya dapat hidup dengan layak dan mendapat pendidikan seperti anak pada umumnya, namun mereka mengalami kesulitan ekonomi.

3. Analisis Masalah Penelitian

- a. Kondisi biologis

Kondisi biologis mencakup penampilan responden, kemampuan dan kondisi responden, kondisi kesehatan responden, kedisabilitas-an yang dialami, dan masalah tidur yang dialami responden. Berdasarkan hasil jawaban responden pada pernyataan yang menggambarkan kondisi biologis, sebagian besar responden mempunyai kondisi biologis yang tinggi (70.43%). Responden memiliki ukuran tubuh yang normal seperti anak pada umumnya karena pemenuhan

kebutuhan makan dengan gizi seimbang sangat diperhatikan. Responden makan tiga kali sehari dengan pemberian *snack* satu sampai dua kali sehari yaitu setelah makan siang dan terkadang pada waktu sore atau malam hari. Hal ini sesuai dengan pengaturan makan menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak* (Permensos 30/2011) Pasal 4 Bab IV bahwa anak harus mengonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam LKSA, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai makanan utama minimal tiga kali dalam sehari dan *snack* minimal dua kali sehari.

Berdasarkan hasil observasi, ukuran tubuh responden terlihat kurus namun masih tergolong pada ukuran tubuh normal. Hal ini karena masih ada beberapa responden (65.7%) yang mempunyai masalah makan. Kurangnya pengawasan dari pengasuh saat responden makan juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV,

menemani anak saat makan merupakan cara membangun komunikasi yang terbuka untuk menciptakan suasana kekeluargaan, misalnya dengan bersikap santai dan mendengarkan pendapat anak, juga dengan mendorong anak untuk bercerita tentang kegiatan yang mereka lakukan setiap hari tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi anak, termasuk hal yang mengganggu pikiran anak, juga untuk mengetahui sifat relasi di antara anak.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa terbangunnya komunikasi yang baik antara pengasuh dengan anak asuhnya akan membuat pengasuh mengetahui kondisi yang dialami oleh anak asuh. Melalui pembicaraan yang santai antara pengasuh dengan anak asuhnya, pengasuh juga dapat mengetahui gangguan makan yang dialami anak asuh, termasuk hal-hal yang menyebabkan anak mengalami gangguan makan. Melalui proses tersebut, pengasuh juga dapat membantu anak asuh untuk tetap menjaga pola makan sesuai takaran yang dibutuhkan oleh tubuh anak saat anak mengalami masalah sekalipun.

Berdasarkan hasil penelitian, responden mendapat pemenuhan

kebutuhan sandang dengan baik. Responden mendapat seragam sekolah berdasarkan kebutuhan dan ketika seragamnya sudah tidak layak pakai lagi. Setiap satu tahun sekali responden juga mendapatkan pakaian bermain, pakaian beribadah, pakaian dalam, sepatu, sandal, kaos kaki, dan pakaian sehari-hari yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing responden dan tren zaman sekarang. Hal ini juga sesuai dengan Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV yang mengatur tentang pemenuhan kebutuhan pakaian anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran, dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, hampir setengah dari jumlah responden (47.8%) selalu merasa sehat di dalam panti. PSAA Putra Utama 3 Ceger menyediakan klinik dan mendatangkan dokter setiap hari Rabu sesuai dengan ketentuan Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV yang mengharuskan anak memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga profesional di bidang kesehatan untuk merekam catatan perkembangan kesehatan. Kegiatan yang biasa dilakukan dokter setiap kali datang

ke panti yaitu memeriksa berat dan tinggi badan responden serta memeriksa kesehatan responden.

Panti juga bekerjasama dengan beberapa Puskesmas, seperti Puskesmas Ceger dan Puskesmas Cipayung. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang menderita sakit parah dan perlu perawatan intensif akan didampingi oleh pengasuhnya dari proses pengantaran sampai proses perawatan anak di Puskesmas dan Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV yang mengharuskan LKSA untuk segera memeriksakan anak jika terdapat gejala-gejala yang menunjukkan anak sakit.

Beberapa pengasuh seringkali mengingatkan responden untuk mandi, menjaga kebersihan pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan kamar serta lingkungan panti. Penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kebersihan, panti realisasikan dengan menyediakan peralatan mandi kepada responden dan peralatan kebersihan di lingkungan panti. Berdasarkan hasil observasi, meskipun peralatan mandi sudah tersedia, masih banyak responden yang malas mandi dan beberapa responden belum mandi dengan

cara yang benar. Banyak peralatan mandi responden yang diambil oleh temannya untuk keperluan pribadi atau untuk dijual.

Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV juga mengharuskan LKSA untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok, dan narkoba sesuai perkembangan anak. Bentuk promosi kesehatan reproduksi dan narkoba di PSAA Putra Utama 3 Ceger masih belum terlalu digiatkan. Panti lebih memfokuskan untuk melakukan beberapa upaya pemberian informasi mengenai bahaya merokok karena berdasarkan hasil observasi, sebagian responden merupakan perokok aktif.

Upaya menjaga kesehatan bagi responden juga dilakukan dengan memberikan fasilitas dan kegiatan olahraga untuk responden, seperti voli, futsal, silat dan senam. Kegiatan olahraga ditujukan untuk melatih kebugaran, mengembangkan minat dan bakat, serta mengisi kegiatan responden di panti. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak anak yaitu hak terhadap tumbuh kembang anak.

Berdasarkan hasil penelitian, hampir setengah responden (41.3%) masih mempunyai gangguan tidur. Beberapa responden mempunyai

kesulitan untuk tidur tepat waktu dan beberapa lagi sulit tidur karena terganggu oleh aktivitas temannya yang sulit tidur, seperti *mengobrol* hingga larut malam dan bermain gitar sambil bernyanyi. Kesulitan tidur yang dialami responden juga dipengaruhi oleh perubahan fisik responden seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Carskadon, dalam Papalia *et al.* (2008, p.545) remaja mengalami pertukaran dalam siklus tidur alami otak atau *circadian timing system*. Waktu keluarnya *melatonin*, sebuah hormon yang dideteksi terletak di liur, merupakan ukuran kapan otak siap untuk tidur. Setelah pubertas, pengeluaran ini terjadi semakin lama.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun ada beberapa pengasuh yang piket. Pengasuh yang bertugas untuk piket lebih banyak menghabiskan waktu ketika malam hari di dalam kantor dan akan ke kamar responden ketika sudah pagi yaitu untuk membangunkan responden sekitar pukul 04.30 sampai 05.00, sehingga belum maksimal dalam mendisiplinkan anak untuk tidur tepat waktu

b. Kondisi psikologis

Berdasarkan hasil penelitian, aspek kondisi psikologis merupakan as-

pek dengan jumlah skor terendah yaitu 3172 (63,12%). Kondisi psikologis mencakup kecakapan intelektual responden, persepsi yang dimiliki responden dalam melihat sesuatu, dan kemampuan responden melakukan pengendalian emosi negatif. Kondisi psikologis responden dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger termasuk ke dalam kategori cukup, bahkan hampir mendekati baik. Kondisi psikologis responden merupakan aspek yang mempunyai skor paling rendah dari pada skor aspek psikososial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, responden mempunyai kecakapan intelektual yang baik. Sebagian responden (50.8%) mengaku sering dibilang pintar oleh teman maupun pengasuhnya. Mayoritas responden (89.6%) juga mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Pada tahap ini anak-anak pada usia remaja sudah mulai memiliki pikiran yang lebih matang. Menurut Papalia (2008, p.555) perkembangan remaja yaitu remaja tidak hanya tampak berbeda dari anak yang berusia lebih muda, mereka juga berpikir berbeda. Walaupun pikiran mereka masih kurang matang dalam beberapa

aspek, banyak di antara mereka yang cakap melakukan penalaran abstrak dan penilaian moral yang rumit serta dapat membuat rencana yang lebih realistis bagi masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian responden mempunyai hubungan yang baik dengan pengasuhnya. Sebagian responden (58.2%) menganggap bahwa pengasuh adalah orang yang paling mengerti responden, sebagian responden (59.7%) menganggap bahwa pengasuh bersikap seperti orangtua responden, sebagian responden (55.2%) merasa mudah menghadapi masalah, dan sebagian responden (53.7%) tenang dan tidak khawatir karena pengasuh selalu ada untuk memberikan perhatian dan dukungannya kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden (66.2%) merasa bahwa dirinya merupakan anak yang nakal karena pengasuh sering berkata demikian padanya. Perkataan pengasuh tersebut dapat menimbulkan konsep diri negatif pada responden, dan hal ini tidak sesuai dengan Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV yang mengharuskan LKSA untuk menjamin bahwa anak terhindar dan terlindungi dari

semua bentuk perlakuan, termasuk perkataan dan hukuman yang dapat mempermalukan atau merendahkan martabat mereka.

Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV juga mengharuskan anak agar dapat diakui, diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang utuh, memiliki karakter yang unik, memiliki pendapat, pilihan, dan kapasitas serta kemampuan masing-masing. Jadi, tidak dibenarkan juga jika pengasuh mengatakan kata-kata kasar ataupun kata-kata yang mengandung stigma negatif karena hal tersebut akan mengganggu perkembangan psikologis negatif terutama dalam hal pembangunan konsep diri responden.

Sebagian besar responden merasa minder (85.0%) dan sebanyak 59.7 persen responden menganggap bahwa anak yang tinggal dengan orangtuanya akan mempunyai masa depan yang lebih cerah daripada anak-anak yang tinggal di panti. Hasil penelitian *Save the Children* dalam Permensos 30/2011 juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggal di panti mencemaskan kondisinya setelah lulus dari SLTA dan mengkhawatirkan masa depannya. Berdasarkan hasil observasi, responden mencemaskan hal tersebut karena

responden bingung harus memilih melanjutkan kuliah atau bekerja. Jika harus bekerja, responden bingung harus mencari pekerjaan di mana dan jika responden ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, responden bingung karena tidak adanya dukungan finansial.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden (79.1%) merasa layak mempunyai pacar. Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV juga mengatur tentang relasi yang positif dan pantas antara laki-laki dan perempuan yaitu LKSA harus menjadi lingkungan yang positif untuk mendukung anak mendiskusikan aspek positif dan aman dari relasi antara laki-laki dan perempuan serta membangun pemahaman untuk melakukan pilihan yang bertanggung jawab dari relasi tersebut. PSAA Putra Utama 3 Ceger tidak melarang adanya hubungan yang dekat antara responden dengan teman perempuannya asalkan hubungan tersebut berlandaskan atas norma dan etika.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden (62.6%) masih merasa tidak nyaman dengan pengasuhnya. Responden telah menganggap pengasuh seperti orang tuanya dan merasa mudah menghadapi masalah karena sering men-

dapat dukungan, namun demikian tidak membuat responden merasa nyaman. Responden tersebut masih merasa bahwa tidak semua hal yang berkaitan dengan dirinya harus diketahui oleh pengasuhnya. Bahkan ada beberapa responden yang kurang dekat dengan pengasuhnya sehingga pengasuh tidak mengetahui beberapa hal tentang masa lalu dan rahasia responden. Beberapa responden juga merasa kurang nyaman karena mendapat perkataan kasar dan perlakuan dari pengasuh. Berdasarkan hasil observasi, responden hanya memerlukan kesempatan dan sedikit waktu untuk benar-benar diperhatikan oleh pengasuh. Responden ingin pendapat dan pemikirannya didengar oleh pengasuh.

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian emosi negatif oleh responden dapat dikatakan belum terlalu baik, seperti perasaan tertekan di dalam panti, tidak merasa baik-baik saja ketika kehilangan orang yang disayangi, dan perasaan ingin membalas perlakuan kasar yang diterima responden. Berdasarkan hasil observasi, beberapa emosi ini merupakan emosi yang disebabkan oleh lingkungan panti, seperti perasaan tertekan dan

perasaan marah karena ketidakadilan yang dirasakannya.

Perasaan sedih saat kehilangan orang yang disayangi merupakan perasaan yang lazim dirasakan oleh orang yang mengalami kehilangan. Hal ini dapat dikatakan bermasalah jika responden menunjukkan tanda-tanda murung dan tidak melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, sulit makan, sulit tidur, dan lain-lain. Ketika hal-hal tersebut terjadi maka pengasuh yang bertindak sebagai orangtua dapat menjadi tempat bagi anak untuk berdiskusi dan meminta dukungan agar dapat lebih mudah menghadapi masalahnya seperti yang telah tercantum dalam Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV yaitu LKSA harus mendukung terbangunnya relasi individual antara anak dengan pengasuh sebagai pengganti orang tua sehingga anak mendapat perhatian secara individual dari pengasuh, dapat menemui pengasuh jika memerlukan dukungan ketika menghadapi masalah atau sekedar ingin berbicara pribadi.

c. Kondisi sosial

Kondisi sosial responden mencakup tentang interaksi dan riwayat masa lalu responden. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial

responden dalam pengasuhan alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger dapat dikatakan cukup dan mendekati baik. Interaksi yang terjalin pada responden adalah interaksi antara responden dengan teman dan pengasuhnya.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar responden (85.1%) mempunyai hubungan yang baik dengan teman-temannya di panti, seperti responden mempunyai banyak teman dan responden sering menjadi tempat *curhat*. Sedangkan sebagian responden (14%) lagi merasa bahwa responden mempunyai hubungan yang kurang baik dengan beberapa temannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan ditemukannya fakta bahwa sebagian responden (53.7%) sering berkata kasar kepada temannya, sebagian besar responden (76.1%) menjadi korban *bully* teman-temannya, dan sebagian responden (56.7%) memilih untuk menyendiri karena takut diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang dirundung oleh teman-temannya di panti merupakan responden yang baru masuk panti /junior, responden yang pendiam dan tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan.

Berdasarkan hasil observasi, kurangnya pengawasan dari pengasuh terhadap anak secara intensif merupakan salah satu penyebab mengapa tindakan kekerasan dan senioritas masih ada di lingkungan panti, meski tidak banyak dan tidak terjadi pada seluruh responden. Menurut Permensos 30/2011 Pasal 4 Bab IV, pengasuh harus melaksanakan pengasuhan dalam rentang waktu 24 jam kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Berdasarkan hasil observasi, meskipun panti sudah menerapkan sistem piket 24 jam, hal ini tidak cukup berpengaruh karena beberapa pengasuh menghabiskan banyak waktunya di kantor daripada berada di kamar-kamar atau tempat biasanya responden berada. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian responden mempunyai hubungan yang baik dengan pengasuhnya terbukti dengan seringnya responden *curhat* kepada pengasuh (sebanyak 37.3% responden), diusap-usapnya kepala responden sebagai bentuk kasih sayang pengasuh (sebanyak 43.3% responden), seringnya responden diberi motivasi oleh pengasuh ketika merasa jenuh di panti (sebanyak 62.7% responden), tidak membangkangnya responden ketika

dinasihati (sebanyak 55.3% responden), dan seringkali pengasuh mengunjungi kamar untuk melihat kondisi responden (sebanyak 58.2 % responden). Berdasarkan hasil observasi, hal-hal semacam ini merupakan hal-hal yang terjadi ketika responden merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang baik dengan pengasuhnya. Sayangnya tidak semua responden mengalami hal yang sama.

Beberapa responden mempunyai hubungan yang kurang baik dengan pengasuhnya, hal ini dikarenakan seringkali pengasuh berperilaku kasar (sebanyak 59.7% responden) dan berkata kasar kepada responden (sebanyak 61.1% responden). Tindakan kasar beberapa pengasuh seperti menampar atau memukul anak merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak anak yaitu hak perlindungan anak. Berdasarkan hasil observasi, beberapa pengasuh melakukan hal tersebut jika pemberian teguran tidak efektif lagi untuk menegur responden. Beberapa pengasuh melakukan tindakan tersebut hanya untuk kasus-kasus berat seperti kasus merokok di dalam panti, melompat pagar, membolos dari sekolah, memukul teman di sekolahnya, dan kabur dari panti. Responden dengan

keadaan ini lebih sering menghabiskan waktu dengan pengasuhnya untuk dihukum dari pada untuk berdiskusi atau *curhat*.

Responden mempunyai masa lalunya masing-masing. Sebagian responden (59.7%) ingin menghapus ingatan masa lalunya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden mempunyai masa lalu yang kurang mengenakan. Banyak dari mereka harus menghadapi masa-masa sulit sebelum berada di panti, bahkan beberapa responden mengalami hal yang kurang menyenangkan ketika pulang ke rumah.

Sebagian responden (46.3%) menceritakan masa lalunya kepada pengasuh di panti. Responden melakukan hal tersebut karena telah menganggap bahwa pengasuh merupakan pengganti orangtua di panti. Beberapa responden juga merasa bahwa hal-hal yang bersifat rahasia akan disimpan oleh pengasuhnya karena pengasuh merupakan salah satu orang yang dapat responden percaya. Beberapa responden juga menceritakan masa lalunya kepada teman-temannya di panti. Responden menceritakan masa lalunya tersebut tidak ke semua temannya, melainkan kepada teman yang mereka anggap dekat atau akrab serta nyaman.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, aspek psikologis merupakan aspek yang mempunyai skor paling rendah dari ketiga aspek psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis anak yang diasuh oleh pengasuh belum dapat dikatakan baik. Kondisi psikologis anak yang demikian disebabkan karena anak belum merasa nyaman dengan pengasuh, meskipun mereka telah menganggap bahwa pengasuh mereka merupakan pengganti orang tua mereka selama mereka di panti karena jaranganya pengasuh mengunjungi mereka dan mengajak mereka berbicara secara intensif. Akibatnya anak menjadi kurang dekat dengan pengasuh dan membuat anak tidak dapat mengendalikan persepsi dan emosi negatifnya.

Kondisi psikologis anak yang demikian juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengasuh akan pengasuhan yang baik (*good parenting*) dan pengetahuan pengasuh akan peran pengasuh sebagai orang tua pengganti sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pengasuh juga kurang memahami tugas perkembangan pada anak, sehingga pengasuh kurang dapat merespon anak secara tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Berpijak pada hasil penelitian maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu:

(1) Program sebaiknya mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang dapat mendukung terlaksananya program, sehingga program dapat terlaksana. Pihak-pihak tersebut seperti Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Ceger dan Dinas Sosial DKI Jakarta; (2) Jika anggaran pelaksanaan program merupakan penghambat yang dapat menggagalkan pelaksanaan program maka sebaiknya pihak panti mengajukan proposal “Program Peningkatan Pengasuhan melalui Pelatihan Pengasuhan dan Kegiatan *One Hour Sharing* di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Ceger” kepada donator atau pihak-pihak yang bisa membantu pelaksanaan program secara finansial, seperti JIKS dan Dinas Sosial DKI Jakarta; (3) Saran untuk penelitian lanjutan dalam penelitian “Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Ceger Cipayung Jakarta Timur” adalah bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif sebaiknya melakukan penelitian kondisi psikososial anak dalam pengasuhan alternatif dengan sistem pengasuhan alternatif lainnya, seperti pengasuhan alternatif dengan sistem orang tua angkat, wali, dan orang tua asuh.

Referensi

- Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2008). *A Child's World. Infancy through Adolescence*. Boston: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang *Pengasuhan Anak*.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Profil Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger Tahun 2016*.
- Save the Children (2011). *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Save the Children.
- Soehartono, I. (2011). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tristanto, A. (2020). *Implikasi Teori Hierarki Kebutuhan dalam Praktik Pekerjaan Sosial Anak*. Diakses dari <https://puspensos.kemensos.go.id/Publikasi/topic/583> (11 April 2021)
- Tungga, Y.E.M. (2013). *Terapi Psikososial Suatu Pengantar*. Bandung: STKSPRESS Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Analisis Soal Evaluasi Melalui Pendekatan Kuantitatif

Budi Nurdiansyah

Widyaiswara Ahli Pertama, BBPPKS Banjarmasin

E-mail: jangbud@gmail.com

Abstrak

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan pembelajaran dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran adalah dengan memberikan soal yang harus dijawab oleh peserta diklat. Untuk mengetahui kualitas soal apakah layak dijadikan evaluasi atau tidak, maka perlu dilakukan analisis soal. Salah satu cara analisis soal adalah melalui pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menghitung koefisien validitas, koefisien reliabilitas, dan indeks kesukaran. Soal dikatakan valid dan reliabel apabila soal tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk mengukur apa yang seharusnya diukur yaitu dalam hal ini kemampuan peserta diklat memahami materi. Sementara itu, indeks kesukaran soal adalah tingkat kesulitan soal untuk dijawab oleh peserta diklat. Kriteria yang diharapkan dalam suatu evaluasi pembelajaran adalah tiap butir soal tidak ada yang validitasnya sangat jelek, koefisien reliabilitas evaluasi pembelajaran tidak boleh memiliki interpretasi sangat rendah, dan komposisi soal yang mudah sebanyak 25 persen, soal sedang 50 persen, dan sukar 25 persen.

Kata Kunci: Analisis soal, evaluasi pembelajaran, validitas, reliabilitas, dan indeks kesukaran

Abstract

Learning evaluation is a systematic and continuous process to determine the efficiency of learning activities and the effectiveness of achieving the learning objectives that have been set. One of learning evaluation activities is to provide questions that must be answered by training participants. To find out whether the quality of the questions is good or not, it is necessary to analyze the questions. One way of analyzing them is through a quantitative approach, i.e. calculating the validity coefficient, reliability coefficient, and difficulty index. Questions are said to be valid and reliable if they have a good ability to measure what should be measured, exactly the ability of the training participants to understand the training material. Meanwhile, the item difficulty index is the level of difficulty of the questions to be answered by participants. The expected criteria in learning evaluation are that each item does not have very poor validity, the reliability coefficient of learning evaluation should not have very low interpretations, and the composition of easy questions is 25 percent, moderate questions are 50 percent, and difficult questions are 25 percent.

Keywords: Questions analysis, learning evaluation, validity, reliability, and difficulty index.

A. PENDAHULUAN

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui sampai sejauh mana efisiensi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Suherman, 2003). Evaluasi pembelajaran tidak hanya memberikan gambaran tentang kemampuan yang dimiliki peserta pendidikan dan pelatihan (diklat), tetapi bisa pula untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan widyaiswara dalam menerapkan metode pembelajarannya. Selain itu, evaluasi pembelajaran bisa pula bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan bagi penyelenggara diklat. Peranan evaluasi begitu hakiki dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi dapat mendorong peserta diklat untuk lebih giat belajar dan mendorong widyaiswara untuk lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong pengelola pendidikan untuk lebih meningkatkan fasilitas dan kualitas belajar peserta diklat (Idrus, 2019, p.921).

Salah satu bentuk kegiatan evaluasi pembelajaran adalah dengan memberikan soal-soal yang harus dijawab oleh peserta diklat baik itu berupa soal latihan, kuis, pretest, posttest, maupun ujian komprehensif. Untuk mengetahui apakah soal yang dibuat memiliki kualitas yang baik atau buruk maka diperlukan analisis soal

evaluasi. Analisis soal evaluasi bisa dilakukan secara objektif melalui pendekatan kuantitatif sehingga terbebas dari persepsi individu yang cenderung menjelekkan atau membaguskan kualitas soal. Dalam hal ini, analisis soal evaluasi melalui pendekatan kuantitatif dianggap lebih adil dalam menguji kualitas soal evaluasi. Analisis soal evaluasi pendekatan kuantitatif tersebut meliputi koefisien validitas, koefisien reliabilitas, dan indeks kesukaran. Ketiga unsur tersebut cukup untuk menentukan apakah soal memiliki kualitas baik atau buruk.

Analisis soal dilakukan setelah diperoleh data skor peserta diklat. Data tersebut diolah dengan perhitungan matematika sehingga diperoleh nilai koefisien validitas, koefisien reliabilitas, dan indeks kesukaran. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya (Priatna, 2008). Setelah diperoleh nilai-nilai tersebut, soal-soal dipilah yang memenuhi kriteria baik dipertahankan sedangkan yang buruk bisa direvisi atau diganti dengan yang baru.

B. PEMBAHASAN

1. Validitas

Suatu soal dikatakan valid apabila soal tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Ary, 2010). Sebagai analogi istilah valid adalah sebuah pisau

silet sangat valid digunakan untuk mencukur jenggot dibandingkan dengan gergaji meskipun gergajinya tajam. Pisau dapur yang tajam boleh dikatakan valid untuk mencukur jenggot tetapi lebih valid lagi untuk memotong sayuran. Begitu juga dengan soal yang sudah dibuat, apakah sudah benar-benar dapat mengukur keberhasilan peserta diklat dalam menguasai materi pada modul tertentu. Meskipun peserta diklat banyak yang menjawab benar, belum tentu benarnya itu menggambarkan bahwa peserta diklat menguasai materi dalam modul.

Cara cepat untuk menentukan soal evaluasi ini valid atau tidak valid bisa dengan pendekatan kualitatif yaitu menanyakan kepada yang ahli dalam menguasai modul setidaknya kepada tiga

orang ahli. Tetapi terkadang hal itu tidak bisa dilakukan karena beberapa hal seperti tidak tersedianya waktu orang yang dianggap ahli untuk menentukan validitas soal atau masih tabu untuk mengatakan bahwa soal yang dibuat tidak valid atau jelek. Dengan demikian jalan alternatif yang lebih “halus” untuk menentukan validitas adalah dengan pendekatan kuantitatif yaitu menentukan koefisien validitas.

Penentuan koefisien validitas soal dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara Skor tiap butir soal dan skor totalnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi ditunjukkan Gambar 1, dan klasifikasi koefisien validitas tampak pada Tabel 1.

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{\left(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right) \left(n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right)}}$$

Keterangan:

r_{xy}	= koefisien validitas/korelasi
x_i	= skor butir soal
y_i	= Skor total
n	= banyaknya peserta diklat

Gambar 1. Rumus penghitungan korelasi (Suherman, 2003)

Tabel 1. Klasifikasi koefisien validitas

Besarnya r_{xy}	Interpretasi
$0,90 < r_{xy} \leq 1,00$	Validitas sangat tinggi (sangat baik)
$0,70 < r_{xy} \leq 0,90$	Validitas tinggi (baik)
$0,40 < r_{xy} \leq 0,70$	Validitas sedang (cukup)
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Validitas rendah (jelek)
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Validitas sangat rendah (sangat jelek)
$r_{xy} = 0,00$	Tidak valid

Sumber: Guilford (1956, p. 145)

Apabila ada butir soal yang koefisien validitasnya tidak valid dan sangat rendah, maka sebaiknya soal tersebut tidak digunakan lagi. Apabila koefisiennya validitasnya rendah, maka bisa menjadi pertimbangan apakah masih mau digunakan atau tidak tergantung komponen lainnya seperti reliabilitas dan indeks kesukaran. Untuk yang validitasnya sedang, tinggi, dan sangat tinggi, soal tersebut masih bisa digunakan.

Beberapa yang menyebabkan suatu evaluasi menjadi tidak valid adalah petunjuk tidak jelas, kalimat yang sukar dimengerti, soal tes yang terlalu sukar /mudah, materi tes tidak sesuai dengan yang diujikan.

2. Reliabilitas Soal

Suatu mistar terbuat dari besi digunakan untuk mengukur pensil menunjukkan angka 20 cm. Mistar tersebut digunakan oleh orang lain untuk mengukur pensil yang sama maka

hasilnya juga akan tetap 20 cm. Lain halnya apabila mistar tersebut terbuat dari karet, maka belum tentu hasilnya sama. Kondisi tersebut menggambarkan reliabilitas suatu mistar digunakan untuk mengukur panjang. Tentunya mistar yang terbuat dari besi memiliki reliabilitas yang lebih bagus dibandingkan dengan yang terbuat dari karet.

Suatu soal dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila soal tersebut memiliki hasil pengukuran yang sama terhadap subjek yang sama (subjek sama bukan berarti orang sama) dan tidak berpengaruh terhadap pelaku tes, situasi, dan kondisi. Untuk menentukan reliabilitas soal, bisa dihitung nilai koefisien reliabilitasnya. Untuk menghitung koefisien reliabilitas soal *essay*, maka rumus yang digunakan ditunjukkan Gambar 2. Sementara untuk menghitung koefisien reliabilitas soal pilihan ganda pada Gambar 3.

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n s_i^2}{s_{total}^2} \right)$$

Keterangan:

n = banyaknya soal

s_i^2 = varians skor tiap soal

s_{total}^2 = varians skor total

Gambar 2. Rumus koefisien reliabilitas soal essay (Suherman, 2003)

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(\frac{s_{total}^2 - \sum_{i=1}^n p_i q_i}{s_{total}^2} \right)$$

Keterangan:

n = banyaknya soal

p_i = proporsi banyak subyek yang menjawab benar pada butir soal ke-i

q_i = proporsi banyak subyek yang menjawab salah pada butir soal ke-i

s_{total}^2 = varians skor total

Gambar 3. Rumus koefisien reliabilitas soal pilihan ganda (Suherman, 2003)

Rumus untuk menghitung varians skor total tertera pada Gambar 4 dan

Tabel 2 menunjukkan klasifikasi koefisien reliabilitas

$$s^2 = \frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n(n-1)}$$

Gambar 4. Rumus perhitungan varians skor total (Sudjana, 2005)

Tabel 2. Klasifikasi koefisien reliabilitas

Besarnya r_{11}	Interpretasi
$r_{11} \leq 0,20$	Koefisien reliabilitas sangat rendah
$0,20 < r_{11} \leq 0,40$	Koefisien reliabilitas rendah
$0,40 < r_{11} \leq 0,70$	Koefisien reliabilitas sedang
$0,70 < r_{11} \leq 0,90$	Koefisien reliabilitas tinggi
$0,90 < r_{11} \leq 1,00$	Koefisien reliabilitas sangat tinggi

Sumber: Guilford (1956, p. 145)

Seperti halnya koefisien validitas soal, koefisien reliabilitas juga memiliki interpretasi dan bisa digunakan sebagai pertimbangan apakah soal akan tetap digunakan atau dibuang. Kriteria soal buruk menurut koefisien reliabilitas adalah

koefisien reliabilitas memiliki interpretasi reliabilitas sangat rendah.

2. Indeks Kesukaran

Indeks Kesukaran (IK) menyatakan koefisien kesukaran suatu butir soal. Rumus untuk menentukan indeks kesukaran ditunjukkan Gambar 5. Sedangkan klasifikasinya ada pada Tabel 3.

$$IK = \frac{\bar{x}}{SMI}$$

Keterangan:
 $\bar{x}$ = nilai rata-rata tiap butir soal
 SMI = skor maksimal ideal

Gambar 5. Rumus perhitungan Indeks Kesukaran (Suherman, 2003)

Tabel 3. Klasifikasi indeks kesukaran

Besarnya IK	Interpretasi
$IK = 0,00$	Soal terlalu sukar
$0,00 < IK \leq 0,30$	Soal sukar
$0,30 < IK \leq 0,70$	Soal sedang
$0,70 < IK < 1,00$	Soal mudah
$IK = 1,00$	Soal terlalu mudah

Sumber: Suherman (2003)

Berdasarkan kriteria indeks kesukaran soal, maka sepatutnya buang soal yang memiliki interpretasi soal yang terlalu mudah dan terlalu sukar. Idealnya suatu tes memiliki komposisi soal 25 persen soal yang mudah, 50 persen soal yang sedang, dan 25 persen soal yang sukar.

3. Contoh Kasus

Sebagai contoh, suatu lembaga diklat akan memberikan ujian

komprehensif sebanyak delapan soal berbentuk pilihan ganda kepada sepuluh orang peserta pada kegiatan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS). Karena pelatihan tersebut masih akan dilaksanakan beberapa angkatan lagi dan lembaga diklat menginginkan soal-soal yang bagus pada ujian komprehensif, maka soal-soal ujian komprehensif tersebut dianalisis. Hasil pemeriksaan tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Contoh kasus jawaban peserta diklat

	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Total
Peserta A	1	1	1	0	1	0	1	1	6
Peserta B	1	0	1	1	0	0	1	1	5
Peserta C	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Peserta D	0	1	0	1	1	1	1	0	5
Peserta E	1	1	0	0	0	1	0	0	3
Peserta F	1	0	0	1	0	0	1	1	4
Peserta G	1	0	1	0	1	0	0	1	4
Peserta H	1	1	1	0	1	1	0	1	6
Peserta I	0	1	0	1	0	1	1	0	4
Peserta J	1	0	1	1	0	0	1	0	4

Keterangan: 1 artinya peserta menjawab benar dan 0 artinya peserta menjawab salah.

a. Validitas

Koefisien validitas butir soal nomor 1, menggunakan rumus

koefisien validitas seperti di atas (Gambar 6).

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \left(\sum x_i \right) \left(\sum y_i \right)}{\sqrt{\left(n \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2 \right) \left(n \sum y_i^2 - \left(\sum y_i \right)^2 \right)}}$$

Gambar 6. Rumus koefisien validitas

Isian tabel yang dibutuhkan untuk mencari koefisien validitas soal nomor 1 tampak pada Tabel 5.

Tabel 5. Isian tabel untuk menghitung koefisien validitas

	Soal 1 (X _i)	Total (Y _i)	X _i Y _i	(X _i) ²	(Y _i) ²
Peserta A	1	6	6	1	36
Peserta B	1	5	5	1	25
Peserta C	1	8	8	1	64
Peserta D	0	5	0	0	25
Peserta E	1	3	3	1	9
Peserta F	1	4	4	1	16
Peserta G	1	4	4	1	16
Peserta H	1	6	6	1	36
Peserta I	0	4	0	1	16
Peserta J	1	4	4	1	16
Jumlah	Σ X _i =8	Σ Y _i =49	Σ X _i Y _i =40	Σ X _i ² =8	Σ Y _i ² =259

Gambar 7 adalah perhitungan koefisien validitasnya. Itu artinya soal nomor 1 memiliki koefisien validitas sangat rendah sesuai dengan kriteria interpretasi koefisien

validitas sehingga soal nomor 1 perlu dibuang atau ditinjau ulang. Tabel 6 adalah data validitas soal untuk soal kasus di atas.

$$r_{xy} = \frac{10.40 - 8.49}{\sqrt{(10.8 - 8^2)(10.259 - 49^2)}} = 0,145$$

Gambar 7. Perhitungan koefisien validitas

Tabel 6. Contoh kasus interpretasi koefisien validitas

	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8
Koefisien validitas	0,145	0,386	0,535	0,089	0,655	0,218	0,270	0,535
Interpretasi	Sangat Jelek	Jelek	Cukup	Sangat Jelek	Cukup	Jelek	Jelek	Cukup

b. Reliabilitas

Untuk menghitung koefisien reliabilitas, langkah pertama adalah menentukan varians skor total yang

akan digunakan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Perhatikan Tabel 7.

Tabel 7. Isian tabel untuk menghitung varians

	Total (X_i)	X_i^2
Peserta A	6	36
Peserta B	5	25
Peserta C	8	64
Peserta D	5	25
Peserta E	3	9
Peserta F	4	16
Peserta G	4	16
Peserta H	6	36
Peserta I	4	16
Peserta J	4	16
Jumlah	$\sum X_i=49$	$\sum X_i^2=259$

Sehingga, diperoleh varians skor totalnya tampak pada Gambar 8.

Tabel 8 diperlukan untuk menentukan koefisien reliabilitas.

$$s^2 = \frac{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}{n(n-1)} = \frac{10.259 - 49^2}{10.9} = 2,1$$

Gambar 8. Perhitungan varians skor

Tabel 8. Isian tabel untuk menghitung koefisien reliabilitas

	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8
Menjawab benar	8	6	6	6	5	5	7	6
Menjawab salah	2	4	4	4	5	5	3	4
P	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Q	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	3	0,4
p.q	0,16	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,21	0,24

Diperoleh $\sum pq = 0,16+0,24+0,24+0,24+0,25+0,25+0,21+0,24 = 1,83$. Jadi, koefisien

reliabilitasnya adalah seperti ditunjukkan Gambar 9.

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(\frac{s_{total}^2 - \sum_{i=1}^n p_i q_i}{s_{total}^2} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{10}{10-1} \right) \left(\frac{2,1 - 1,83}{2,1} \right) = 0,143$$

Gambar 9. Perhitungan koefisien reliabilitas

Ternyata, koefisien reliabilitas adalah 0,143 sehingga memiliki interpretasi reliabilitas sangat rendah. Untuk analisis soal ditinjau dari reliabilitas, yang dilihat adalah bukan per butir soal melainkan soal tes keseluruhan. Kalau berdasarkan contoh kasus, maka Koefisien reliabilitas ujian komprehensif sangat rendah dan soal-soalnya tidak cocok untuk digunakan ujian komprehensif berikutnya.

c. Indeks kesukaran

Untuk menghitung indeks kesukaran, maka yang kita perlukan adalah

$$IK = \frac{\bar{x}}{SMI} = \frac{8}{10} = 0,8$$

Gambar 10. Perhitungan indeks kesukaran

Berdasarkan tabel interpretasi indeks kesukaran, maka soal nomor 1 tergolong soal yang mudah. Tabel

nilai rata-rata butir soal dan Skor Maksimal Ideal. Seperti contoh kasus di atas, untuk soal nomor 1 diperoleh nilai rata-rata soal nomor 1 adalah $\bar{x} = 0,8$ dengan menghitung jumlah nilai dibagi banyaknya peserta diklat. Skor maksimal idealnya adalah 1 karena pilihan ganda pada kasus ini berbobot 1 untuk benar. Dengan demikian, indeks kesukaran untuk soal nomor 1 ditunjukkan Gambar 10.

9 menunjukkan indeks kesukaran tiap butir soal untuk contoh kasus di atas.

Tabel 9. Contoh kasus interpretasi indeks kesukaran

	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8
$\bar{x}$	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
SMI	1	1	1	1	1	1	1	1
IK	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7	0,6
Interpretasi	Mudah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

C. PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Penelitian Pristiany Hadisuryani

Penelitian yang dilakukan oleh Pristiany Hadisuryani (2016) di Cigadung Kota Bandung pada siswa kelas IV dengan tujuan menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran Pendidikan matematika realistik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal matematika untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis.

Untuk mendapatkan soal matematika yang benar-benar mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis, maka sebelumnya dilakukan uji instrumen terlebih dahulu kepada siswa kelas V SDN Neglasari 4 Kota Bandung sebanyak 31 orang. Uji instrumen yang dilakukan adalah menghitung koefisien validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Hasilnya adalah 8 soal yang dirancang oleh peneliti memiliki validitas yang memadai, derajat reliabilitas tes sangat tinggi, dan memiliki 7 indeks kesukaran sedang dan 1 sukar sehingga dari hasil analisis tersebut diperoleh

bahwa tes siap digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis.

2. Penelitian Elviana

Penelitian yang dilakukan oleh Elviana dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik butir-butir soal Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Soal diujikan kepada 26 mahasiswa prodi PAI fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jumlah butir soal sebanyak 25 dengan bentuk soal pilihan ganda. Berdasarkan perhitungan koefisien validitas dan reliabilitas, terdapat 6 soal yang layak digunakan dan soal evaluasi tersebut memiliki koefisien reliabilitas 0,39 sehingga dikategorikan reliabilitasnya rendah. Soal tersebut memiliki indeks kesukarannya terlalu mudah berjumlah 2 butir, kriteria Mudah berjumlah 1 butir, kriteria Sedang berjumlah 15 butir, kriteria Sukar berjumlah 4 butir dan kriteria sangat sukar berjumlah 3 butir.

D. PENUTUP

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial adalah agar sumber daya manusia memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Terutama untuk mengukur unsur pengetahuan yang diperoleh oleh peserta diklat, perlu diberikan evaluasi hasil belajar berupa tes yang di dalamnya berisi soal-soal sesuai dengan indikator kompetensi jenis diklat. Supaya evaluasi hasil belajar tersebut benar-benar berfungsi, maka diperlukan alat ukur yang baik. Dengan kata lain, diperlukan soal-soal tes yang memenuhi kriteria valid dan reliabel. Oleh karena itu, analisis soal evaluasi perlu dilakukan dalam setiap kediklatan. Analisis soal tersebut setidaknya dilihat dari unsur validitas, reliabilitas, dan indeks kesukaran.

Adapun saran yang dapat diangkat di sini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan analisis soal evaluasi terdapat perhitungan matematis yang cukup rumit, untuk menghindari hal tersebut, analisis soal evaluasi bisa menggunakan aplikasi yang sudah beredar seperti anates atau SPSS (Hidayat, 2013)

bahkan bisa dibuatkan program analisis evaluasi baik berbasis web atau excel.

2. Untuk mendapatkan data skor hasil tes agar bisa dilakukan analisis soal, maka bisa dilakukan uji coba soal evaluasi atau data skor bisa diperoleh dari kegiatan *Training of Trainers* (TOT) sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan Diklat dapat memiliki kualitas soal yang memenuhi kriteria.
3. Interpretasi hasil analisis soal evaluasi ini berbasis skor sehingga apabila ada soal yang divonis tidak memenuhi kriteria tidak berarti mutlak soal tersebut jelek tetapi sebagai pertimbangan untuk direvisi atau dibuang. Salah satu kasus yang menggambarkan hal ini adalah pada pelaksanaan Diklat Penanganan Korban Tindak Kekeerasan terhadap Anak dan Perempuan di BBPPKS Banjarmasin tahun 2018, salah satu soal evaluasi hasil belajar yang berbentuk pilihan ganda telah divonis memiliki kriteria jelek. Setelah ditinjau kembali soal tersebut, ternyata terdapat salah kunci jawaban. Setelah diperbaiki kunci jawabannya, kemudian dilakukan analisis ulang lalu hasilnya soal tersebut berubah menjadi memiliki kriteria baik.

Referensi

- Ary, D. (2010). *Introduction to Research in Education*. Wadsworth Cengage Learning: Belmont USA.
- Elviana (2020). Analisis Butir Soal Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan Program Anates. *Jurnal MUDARRISUNA*, Volume 10 No. 2, 58-74.
- Guilford, J.P. (1956). *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York: Mc Graw-Hill Book Co. Inc.
- Hadisuryani, P. (2016). *Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik: Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas IV di SDN Cigadung Kota Bandung*. Skripsi di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- Hidayat, A. (2013). *Tutorial Cara Uji Validitas Dengan SPSS – Validitas Instrumen*. Diakses dari <https://www.statistikian.com/2013/02/tutorial-uji-validitas-dengan-spss.html> (4 Juni 2021)
- Idrus, L. (2019). Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Adaara*, 9(2), 920-935.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.
- Priatna, B.A. (2008). *Uji Coba Instrumen Penelitian dengan Menggunakan MS Excel dan SPSS*. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPMIP/A/JUR._PEND._MATEMATIKA/196412051990031-BAMBANG_AVIP_PRIATNA/M/Makalah_November_2008.pdf (4 Juni 2021)
- Sudjana (2005). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Suherman, E. (2003). *Evaluasi Pembelajaran Matematika untuk Guru dan Calon Guru Matematika*. Bandung: JICA

PANDUAN PENULIS NASKAH JURNAL PUSDIKLAT KESOS

Jurnal Pusdiklat Kesos menerima naskah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah merupakan hasil penelitian lapangan atau kelas pembelajaran, kajian teori/konsep, dan pengalaman praktik terkait isu kesejahteraan sosial dan bidang kediklatan.
2. Asli karya penulis.
3. Belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau tidak di-submit pada saat bersamaan ke jurnal lain.
4. Naskah harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah.
5. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
6. Tema yang diangkat bersifat baru dan menunjukkan perkembangan terkini dari suatu bidang atau isu.
7. Rujukan (referensi) diambil dari sumber primer mutakhir dan tidak menggunakan referensi yang kurang kredibel. Jumlah referensi minimal 10 buah, berasal dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain.
8. Format naskah menggunakan MS Word, *font Times New Roman, fontsize: 12, spasi 1,5*.
9. Jumlah halaman naskah sepanjang 8 - 15 halaman atau total 2500 - 4000 kata (dari halaman judul sampai daftar referensi)
10. Struktur atau format tulisan dapat dilihat dalam “Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos” pada bagian akhir panduan ini.
11. Tabel dan Gambar diberi keterangan dengan penomoran urut dan menyertakan sumber. Ukuran font 11.
12. Naskah dapat dikirim ke alamat e-mail: jurnal.pusdiklat@kemsos.go.id
13. Tata cara penulisan referensi mengacu ke APA style dengan sejumlah penyesuaian. Berikut ini adalah contoh penyusunan referensi:

- **Buku dengan satu atau lebih pengarang**

Cameron, L.J. (2019). *Everyday Mindfulness: Finding Focus, Calm, and Joy*. Washington: National Geographic Partners, LLC.

Christensen, C.M., Horn, M.B. & Johnson, C.W. (2008). *Disrupting Class: How Disruptive Innovation will Change the Way the World Learns*. New York: McGraw Hill.

- **Buku terjemahan**

Marcuse, H. (2000). *Manusia Satu Dimensi*. Terj. Silvester G. Sukur & Yusup Priasudiarja. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- **Buku bunga rampai atau antologi (book chapters)**

Collins, L. M. (2014). Optimizing Family Intervention Programs: The Multiphase Optimization Strategy (MOST). Dalam A. Booth, P. Amato, & S. M. McHale (Eds.).

Emerging Methods in Family Research (pp. 231-244). New York: Springer International Publishing.

▪ **Jurnal dan/atau e-journal atau proceeding**

Bah, A., Bazzi, S., Sumarto, S., & Tobias, J. (2019). Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia. *The World Bank Economic Review*, Volume 33, Issue 3, pp. 573-597. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx020>

Morawska, A. & Sanders, M. (2011). Parental Use of Time Out Revisited: A Useful or Harmful Parenting Strategy? *Journal of Child and Family Studies*, 20 (1), 1-8. doi:[10.1007/s10826-010-9371-x](https://doi.org/10.1007/s10826-010-9371-x)

▪ **Buku atau artikel online**

ADB (2019). *Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework*. Manila: ADB. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TIM199901-2>

▪ **Artikel dari koran/majalah cetak & online**

Nadia, A. (2020). *Aku Bangga Jadi Rakyat Indonesia*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q88kas440/aku-bangga-jadi-rakyat-indonesia> (15 April 2020)

Salahudin, A. (2018). *Melampaui Narasi Kebencian*. Kompas, 26 Februari 2018.

Zakaria, R.Y. (2019). *Omnibus Law untuk Masyarakat Adat*. Tempo, 9-15 Desember 2019.

▪ **Berita dari koran/majalah cetak & online**

Grab Gelontorkan Investasi Rp 9,1 Triliun. Koran Tempo, 3 Februari 2017.

Jumlah Kasus HIV/AIDS di Padang Tertinggi di Sumbar (18 Januari 2020). Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q4atf1383/jumlah-kasus-hivaidis-di-padang-tertinggi-di-sumbar> (7 April 2020)

Tajuk Rencana: Pesan di Balik Bencana. Kompas, 26 Februari 2018.

▪ **Ensiklopedia atau kamus online**

“Learning Management System” dalam *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System (28 Januari 2020)

“Stereotype” dalam *Encyclopaedia Britannica*. Diakses dari <https://www.britannica.com/topic/stereotype-social> (7 April 2020)

▪ **Laporan, modul, seminar/diklat, dan skripsi/thesis/disertasi**

Ariyanto, S. (2020). *Tantangan Pengelolaan Talenta Indonesia*. Bahan tayang pada Knowledge Sharing di Pusdiklat DPR, 11 Februari 2020.

Cahyono, E.D. (2014). *Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region*. Disertasi di The Ohio State University.

Hariadi, S.S. (2012). *History and Experiences of Agricultural Extension in Indonesia*. Paper yang dipresentasikan pada Roundtable “Agricultural Extension in Asia” di Beijing, 15-17 Maret 2012.

LAN (2011). *Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut*. Modul Diklat Calon Widyaiswara.

UNESCO (2007). *Report of the 10th UN Inter-Agency Round Table on Communication for Development*. 12-14 Februari 2007, Addis Ababa, Ethiopia.

- **Peraturan & perundang-undangan**

Kementerian Sosial (2016). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB)*. Jakarta: Direktorat PSKBA, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Asistensi Rehabilitasi Sosial*.

- **Media sosial (youtube, twitter, facebook, instagram, dll.)**

Facebook Pusdiklat Kesos. Diakses dari
<https://www.facebook.com/search/top?q=pusdiklat%20kesos> (30 Mei 2021)

Karikatur Budaya Restorasi Sosial, 4 Januari 2016. Diakses dari
<https://www.youtube.com/watch?v=cJwcFoXfmoo> (30 Juni 2017)

Twitter @KemensosRI, 2 April 2020. Diakses dari
<https://twitter.com/juliaribatubara/status/1247831661426819073> (12 April 2020)

Sistematika Naskah Jurnal Pusdiklat Kesos

Judul Naskah

Nama Penulis (tanpa gelar)

Jabatan dan nama instansi

Alamat e-mail

Abstrak

Bahasa Indonesia, 100 sampai 150 kata, dan 3-5 kata kunci.

Abstract

Abstract in English version with 3-5 keywords.

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan dapat berupa latar belakang, perumusan masalah (*presenting problems*), alur berpikir, signifikansi artikel, dan/atau penjelasan sistematika penyajian naskah.

B. POKOK BAHASAN SATU

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

- a. Tema subpokok bahasan poin 2a
- b. Tema subpokok bahasan poin 2b

C. POKOK BAHASAN DUA

1. Subpokok Bahasan Satu

2. Subpokok Bahasan Dua

3. Subpokok Bahasan Tiga

D. POKOK BAHASAN TIGA

E. PENUTUP

- Penutup dapat berisi kesimpulan, rekomendasi, dan/atau saran.

Referensi

- Penulisan daftar referensi secara umum mengacu ke *APA Style* dan disusun secara alfabetis.



JURNAL PUSDIKLAT KESOS

diterbitkan oleh:

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI**

